

EDISI #28 FEBRUARI 2022



BARTER KEKUASAAN MENUJU ISTANA

▶ MENANTI KOALISI
PERUBAHAN
MENEPATI JANJI

▶ DAERAH
DIMINTA
TERUS
WASPADA

▶ INFO
SUMSEL:
FOKUS ATASI
MASALAH
STUNTING

▶ INFO PALEMBANG:
KAWASAN KUMUH
TERUS BERKURANG

▶ OPTIMALKAN
PENDAPATAN
DARI GILI
TRAMENA

▶ MENGENANG
SEJARAH
MEMBANGUN
KOTA TEPIAN

▶ MENDAG PASTIKAN
BULOG SERAP HASIL
PANEN PETANI

▶ KASUS RUDAPAKSA
LIBATKAN
4 LEMBAGA NEGARA

▶ HILIRISASI LOMPATAN
BESAR PERADABAN
INDONESIA



Rp75.000,-

info indonesia INOVASI UNTUK NEGERI



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN DISPLAY/HAL

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

RP 65.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000



*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN
PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET
SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH
DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON
UNTUK PARA PELANGGAN**



**JALAN MPR III NO. 5B KELURAHAN CILANDAK BARAT,
KECAMATAN CILANDAK, JAKARTA SELATAN (12430), Telp 021-27812397**

PARPOL & NOMOR URUT PESERTA **PEMILU 2024**



EDISI
BULAN
FEBRUARI
2023

DAFTAR ISI



7

INFO UTAMA

Setahun menjelang pemilihan presiden dan anggota legislatif, masih tampak jelas peran Presiden Joko Widodo dalam dinamika politik dalam negeri. Jokowi masih memegang kendali.



22

INFO SUMSEL

Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menurunkan angka stunting mendapat apresiasi dari Kementerian Kesehatan. Apresiasi yang diberikan dalam bentuk penghargaan karena Sumsel terpilih sebagai provinsi dengan persentase jumlah sekolah terbanyak dalam Upaya Pencegahan Stunting.



36

INFO KALTIM

Provinsi Kalimantan Timur genap berusia 66 tahun pada 9 Januari 2023. Dengan semakin matang usia, banyak kemajuan yang sudah dicapai Benua Etam. Namun, banyaknya prestasi yang sudah diraih bukan alasan untuk berhenti membangun.



46

INFO NASIONAL

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mendapat julukan tukang impor karena seringnya mendatangkan komoditas pangan dari negara lain, seperti beras, gula hingga kedelai.



66

INFO KEMENAG

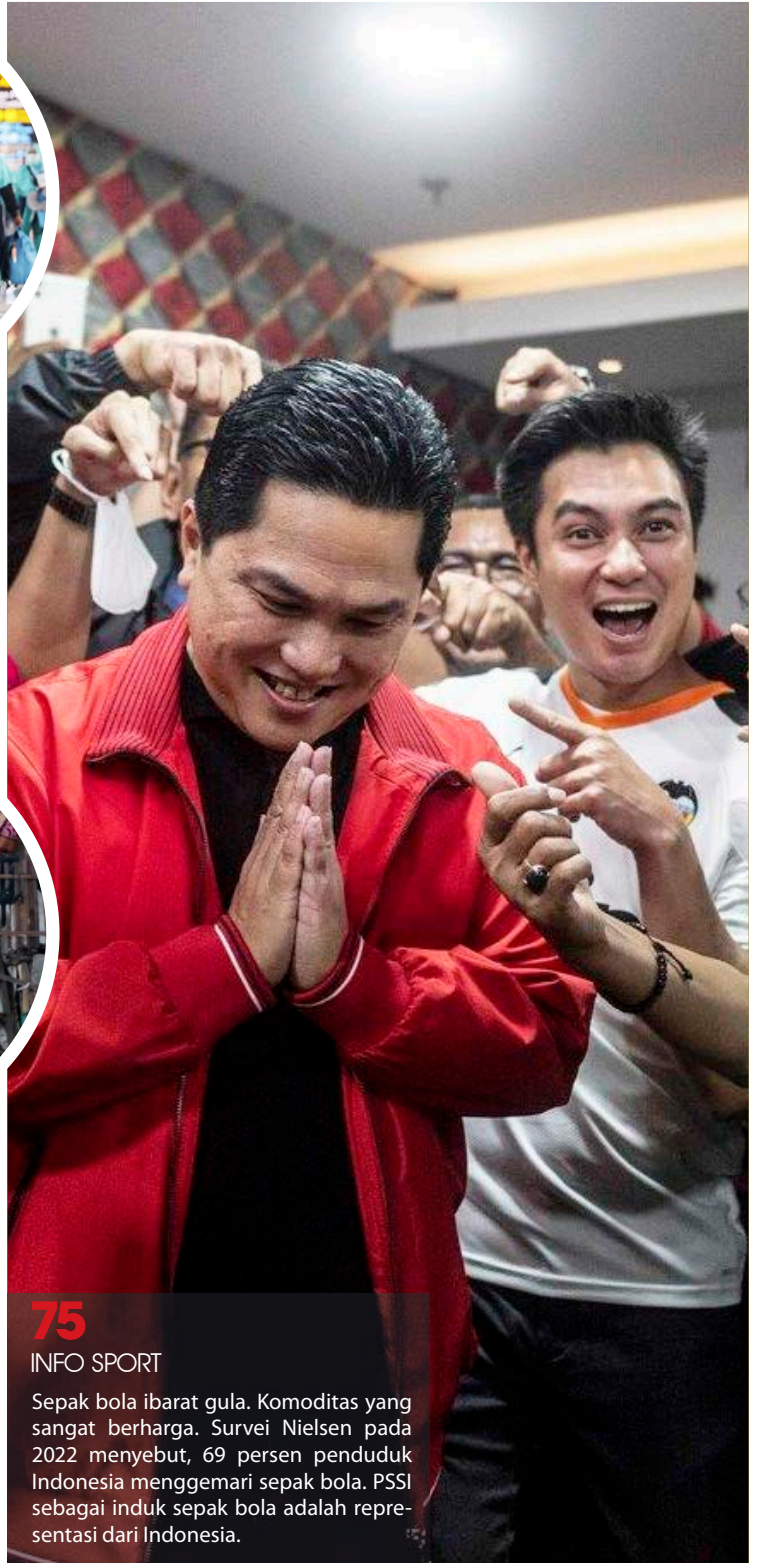
Umat Muslim di Tanah Air patut berbahagia karena Kerajaan Arab Saudi memberikan kuota untuk berangkat haji 2023 kepada Indonesia sebanyak 221 ribu orang tanpa batasan usia. Namun, calon Jemaah haji Indonesia dihadapkan pada kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang diusulkan Kementerian Agama sebesar Rp69 juta.



87

INFO KHUSUS

Jumlah penduduk miskin Indonesia kembali meningkat. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), per September 2022, ada sekitar 26,36 juta penduduk miskin di Tanah Air. Jika dibandingkan Maret 2022, jumlah itu bertambah sekitar 200 ribu jiwa.



75

INFO SPORT

Sepak bola ibarat gula. Komoditas yang sangat berharga. Survei Nielsen pada 2022 menyebut, 69 persen penduduk Indonesia menggemari sepak bola. PSSI sebagai induk sepak bola adalah representasi dari Indonesia.

3 DARI REDAKSI

18 OPINI

28 INFO NUSANTARA

32 INFO PALEMBANG

40 INFO NUSA TENGGARA BARAT

42 INFO SAMARINDA

58 INFO ISTANA

62 INFO MUBA

70 INFO POLITIK

72 INFO TEKNOLOGI

80 INFO WISATA

84 INFO SELEBRITI

86 KAJI

KOHESI

Mungkin kita terlalu sering mengunyah dan mencerna informasi tentang badai sempurna. Terjemahan bebas dari perfect storm. Alhasil, yang paling mungkin kita lakukan adalah menyesuaikan diri terhadap dampak badai itu. Mitigasi agaknya menjadi penyesuaian yang paling sempurna. Mencakup pencegahan keparahan jika bencana berulang kembali. Perfect storm tentu saja tergolong bencana.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah beberapa kali menguraikan badai itu dalam lima fakta jalin berkelindan satu sama lain dengan singkatan 5C. C pertama adalah Covid-19. Selanjutnya conflict terutama antara Rusia-Ukraina yang melibatkan banyak negara, atau blok ekonomi semisal Uni Eropa, Juga blok militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Dampak lanjutan konflik itu adalah disrupsi atau gangguan terhadap rantai pasok yang menyebabkan volatilitas, gejolak harga barang. Itulah C ketiga, Commodity price. Commodity price selanjutnya memicu C keempat, melonjaknya biaya hidup, Cost of living. Sedangkan C terakhir adalah Climate Change, perubahan iklim. C terakhir ini sebenarnya melekat dengan 4C sebelumnya, bisa menjadi pemicu sekaligus menjadi akibat dari aneka C yang berlarut-lurut.

Nah, bagaimana upaya penyesuaian dan mitigasi dalam suasana badai sempurna tadi? Banyak yang dengan mudah menemukan krisis energi dan pangan di berbagai negara. Begitu pula dengan negara-negara yang boleh dibilang gagal memitigasi badai itu sehingga harus menerima bantuan Dana Moneter Internasional (IMF). Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengemukakan, menyusul Sri Lanka, dua negara Asia Selatan lainnya sudah menjadi pasien IMF: Bangladesh dan Pakistan.

Namun, dampak negatif badai sempurna tak hanya berada di tingkat global, kawasan, atau masing-masing negara. Tapi juga meluas terus hingga ke kelompok-kelompok atau wilayah yang lebih kecil seperti keluarga hingga akhirnya dampak itu menyentuh pula ke tingkat perorangan secara berbeda. Para pengusung pandangan Charles Darwin di bidang evolusi sosial ekonomi biasanya melihat bahwa bukan yang terkuat atau tercerdas yang akan bertahan, melainkan yang paling sanggup menyesuaikan diri. Dalam hal ini menyesuaikan diri dengan kondisi badai sempurna.

Kita juga melihat, di tingkat keluarga dan perorangan, beberapa peristiwa belakangan ini yang dapat menjadi peringatan dini. Kematian satu keluarga penghuni Kompleks Citra Garden 1, Kalideres Jakarta Barat. Kemudian nasib ibu dan anak Enny-Tiko warga Kelapa Gading, Jakarta Utara, kematian sepasang muda-mudi di sebuah hotel di Tangerang Selatan, Banten. Juga kasus mutilasi yang pelaku dan korbannya ditemukan di satu titik lokasi, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Kasus-kasus di tingkat keluarga dan perorangan ini menunjukkan tanda-tanda rapuhnya kohesi, daya rekat dalam kehidupan di lingkaran terdekat kehidupan bermasyarakat. Peringatan yang sama sebenarnya sudah dikemukakan dalam hasil survei World Economic Forum pada 2022 dan 2023, Berturut-turut. ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12750

● TELP 021-791 96781
● FAX 021-791 96786

Twitter : @infoindonesia

Facebook : infoindonesia.id

Instagram : @infoindonesia.idn

Email : redaksi@infoindonesia.id

PENDIRI: Usman Rizal, Rizky Darmawindra **DIREKTUR/PEMIMPIN UMUM:** Usman Rizal

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Zulfahmi Jamba **PEMIMPIN REDAKSI:** Gunawan Effendi **WAKIL PEMIMPIN**

REDAKSI: Rahmad Romli **REDAKTUR PELAKSANA:** Rusdiyono **REDAKTUR :** Raden Mohd Solehin,

Nurkhamida, Irma Yani, Rusdiyono, Rosyda, Ega Tri Gustina **REPORTER:** Desi Wulandari, Anugrah Dany,

Rifky Ilmi, Pras Budi Prasetya, Ahmad Yani, Yuni Watiana, Mario Ananta, Rahmad KR, Iwan Fals, Heni Elsa

Wulandari, Dedy Sagita, Nina Iskandar, Jifran, Boyke Parningotan Hutapea (Bekasi), Dian Taresa (Kalimantan

Tengah), Zaki (Kalimantan Timur), Basri (Kalimantan Utara), Lalu Suparman Ambakti (Nusa Tenggara

Barat), Abu Bakar Usman (Kepulauan Bangka Belitung) **EDITOR & GRAFIS:** Al Amin, Achilles **TATA LETAK:**

Sujatmiko **MEDIA SOSIAL:** Haidir Ali **KEUANGAN:** Dra Nurhamida **SEKRETARIS REDAKSI :** Niken Rizky

Apriandani **PENGEMBANGAN BISNIS:** Kiki Ibrahim, RM Solehin, Zul Jamba **DISTRIBUSI:** Abdul Muchtar

BANK ACCOUNT: A/N : PT. Wahana Multimedia, BCA : No Rek : 553-041-4321, KCP Otista Jakarta Timur



MASIH DALAM KENDALI JOKOWI

Setahun menjelang pemilihan presiden dan anggota legislatif, masih tampak jelas peran Presiden Joko Widodo dalam dinamika politik dalam negeri. Jokowi masih memegang kendali.



Tanda-tanda itu kian menguat dengan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Dharma Paloh. Pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis petang, 26 Januari 2023 itu menyusul desakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyoroti menteri dari Partai NasDem.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan usulan mengevaluasi dua menteri NasDem, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup

gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya mengundurkan diri,” kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat.

Usulan reshuffle kabinet hanya satu soal. Namun, sulit menyangkal bahwa hubungan PDIP dengan Nasdem yang sama-sama berada di koalisi pemerintah Joko Widodo-Ma’ruf Amin merenggang setelah partai yang diketuai Surya Paloh mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta 2018-2022, Anies Rasyid Baswedan, sebagai calon presiden menjelang Pilpres 2024.

Pada sisi lain, PDIP yang menjadi pemenang Pemilu 2019 dan dapat men-

Dalam pada itu, Presiden Joko Widodo hadir di beberapa acara menjelang puncak peringatan Harlah (hari lahir) 1 Abad Nahdlatul Ulama. Antara lain Jalan Sehat yang berlangsung usai Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) NU di Solo, Jawa Tengah, pada pekan ketiga Januari 2023. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga hadir di acara Sholawatan dan Festival Islam Nusantara di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin malam, 9 Januari 2023. Jokowi pun dijadwalkan hadir di acara Resepsi Peringatan Harlah 1 Abad NU di Sidoarjo, Selasa, 7 Februari 2023.

Kehadiran Jokowi di rangkaian acara peringatan Harlah 1 Abad NU mudah



dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar tidak hanya didasarkan pada kinerjanya. Menurut dia, asal partai menteri tersebut juga mempengaruhi usulan reshuffle.

Syahrul dan Siti berasal dari Partai NasDem. Usai mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, desakan terhadap partai untuk keluar dari koalisi pendukung Jokowi menguat, salah satunya dari PDIP. “Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang

gajikan calon tanpa berkoalisi dengan partai lain belum menentukan capres untuk Pilpres 2024 dengan alasan, antara lain, mengutamakan dulu perolehan suara partai dalam pemilu legislatif yang berlangsung serentak dengan Pilpres. Namun di internal PDIP ada dua nama yang sudah disebut-sebut akan menjadi capres: Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

ditafsirkan sebagai upaya menjaga dukungan warga nahdliyin yang dalam berbagai studi menunjukkan sebagai penopang signifikan terhadap kemenangan Jokowi-Ma’ruf dalam Pilpres 2019. Di berbagai acara itu juga sejumlah figur politik penting yang berasal dari NU dan PDIP berada dalam satu panggung. Sebut saja antara lain Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Pramono Anung, Erick Thohir, Mahfud MD, Abdul-

lah Azwar Anas, Yenny Wahid, dan juga Khofifah Indar Parawansa.

Namun jelas pula bahwa sikap NU yang kini dinakhodai oleh KH Yahya Cholil Staquf berupaya menjaga jarak dengan partai-partai politik. Termasuk dalam penentuan Capres-Cawapres pada Pilpres 2024. "Ndak ada, pokoknya saya selalu tegaskan tidak ada calon presiden, atau wakil presiden atas nama NU. Tidak ada," ucap Gus Yahya di hotel Mercure, Jalan Darmo, Surabaya, Selasa, 11 Januari 2023.

Bahkan nama-nama besar tokoh NU, pun tak membuat Gus Yahya goyah. Sejumlah nama tokoh NU seperti Ketum PP

kinerjanya, prestasinya sendiri tidak atas nama NU. Sudah saya tegaskan berulang kali. Supaya jelas positioning, NU mencegah politik identitas," ungkap Gus Yahya.

Menurut dia yang terpenting adalah mempertahankan suasana yang aman, stabil, harmonis di antara masyarakat. Karena itu ia berharap partai-partai juga ikut menjaga suasana harmonis di tengah masyarakat. Sehingga tidak membangun desain politik yang berpotensi merugikan masyarakat.

"Kami berharap, mohon, mohon pikir tentang keselamatan masyarakat. Mohon, dengan cara berupaya game de-

Pileg 2024 berada.

Pada titik inilah maka koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) layak mendapat sorotan. Kedua partai telah membuka Sekretariat Bersama (Sekber) pada Senin, 23 Januari 2023 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Toh, jika pada dua Pemilu sebelumnya 2014 dan 2019 PKB dan NU seperti tak terpisahkan, pada Pemilu dan Pilpres 2024 belum terlihat tanda-tanda itu. Namun hasil Pemilu dan Pilpres 2024 yang akan menjadi jawaban yang paling konkret pada saatnya.

Gerindra sendiri tampaknya beru-



Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, Ketum PP Ansor sekaligus Menag RI, Gus Yaqut Cholil Qoumas, Ketum PKB, Muhaimin Iskandar disebut-sebut bakal meramaikan bursa Pilpres 2024.

"Ada yang tanya gimana kalau Bu Khofifah, kalau Yaqut, pokoknya tidak ada atas nama NU. Kalau ada capres yang orang NU itu atas nama kredibilitasnya sendiri bukan atas nama NU. Atas nama track recordnya sendiri, atas nama

sign dengan cara membangun rancangan permainan yang tidak berbahaya bagi masyarakat," ungkapnya.

Banyak tafsir politik lain dapat dikemukakan mengenai rangkaian acara peringatan Harlah 1 Abad NU itu. Namun, yang jelas, Presiden Jokowi tampak berhasil mengkonsolidasikan dukungan warga nahdliyin dan PDIP dalam konteks pemilih muslim terutama di Jawa, tempat pemilih terbanyak Pilpres dan

paya pula mendukung stabilitas pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dengan menyambarkan niat putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang mengemukakan hendak terjun ke politik. Tak kurang dari Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang berpasangan sebagai pasangan Capres pesaing Jokowi-Ma'ruf menyambut baik niat Kaesang.

"Saya dengar (Kaesang) mau masuk Gerindra ya? He he he," canda Sandiaga

Uno saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 25 Januari 2023. Ia menyambut baik langkah Kaesang untuk terjun ke dunia politik.

Menurut Sandi, generasi muda saat ini perlu andil untuk membangun negara. "Sebetulnya yang kita harapkan anak muda karena populasi kita ini mayoritas kan generasi milenial dan generasi z dan politik ini juga jangan sampai kalangan muda ini apatis terhadap politik. Justru mereka harus mengambil peran," ucap Sandiaga.

Namun Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengemukakan, akan lebih baik jika Kaesang masuk ke PDI

genal keluarga berpolitik pada jalur partai berbeda-beda. "Di PDI Perjuangan tak dikenal yang namanya satu keluarga inti berada dalam partai politik yang berbeda-beda," kata Hasto.

Kelanjutan niat Kaesang terjun ke politik ini agaknya akan menjadi tantangan baru bagi Presiden Jokowi dalam konteks menjaga stabilitas pemerintahan dan hubungannya dengan PDIP. Dalam konteks itu pula maka pertemuan dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menjadi lebih bermakna.

Hasto sendiri meyakini pertemuan itu membahas sebagai pemberitahuan

Surya Paloh ya bagaimana pertemuan dengan ketua umum parpol yang lain," sambungnya.

Hasto mengatakan Jokowi selalu membuka diri berdialog untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, bila dialog itu disalahgunakan, Jokowi dinilai punya kewenangan mengambil tindakan strategis. "Tapi ketika dialog itu kemudian ada yang menyalahgunakan, hanya untuk kepentingan politik sesaat, hanya untuk kepentingan partainya, maka ya Presiden Jokowi ya punya suatu kewenangan untuk mengambil suatu tindakan strategis sesuai dengan



Perjuangan di mana Jokowi dan Gibran merupakan kader partai banteng moncong putih itu. "Ya sekiranya mau masuk, ke PDI Perjuangan; karena kami ini punya aturan bahwa dalam satu keluarga tidak bisa masuk dalam pilihan partai-partai yang berbeda," ungkapny di Bandung, Sabtu 28 Januari 2023.

Hasto menekankan PDIP tidak men-

bahwa akan ada reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi seperti diusulkan partainya. "Ya, bagi Presiden Jokowi sebelum mengambil keputusan-keputusan penting, itu kan juga melakukan dialog, pemberitahuan, misalnya akan ada reshuffle, itu kan ada pemberitahuan," ujar Hasto di Bandung.

"Tetapi pertemuan dengan Bapak

kewenangan presiden," tuturnya.

Hasto menegaskan isu reshuffle hanya terjadi jika Jokowi menggunakan hak prerogatifnya. Dia meyakini reshuffle dilakukan dengan tujuan memaksimalkan kinerja kabinet. "PDI Perjuangan percaya bahwa ketika reshuffle itu dilakukan, betul-betul bertujuan meningkatkan efektivitas dan kinerja dari kabinet. Jadi kita tunggu saja

keputusan dari Bapak Presiden,” ujarnya

Pernyataan-pernyataan Hasto mengenai Kaesang dan pertemuan Jokowi-Paloh itu menegaskan kepercayaan diri PDIP sebagai partai politik pemenang Pemilu 2019 yang siap mempertahankankannya pada 2024. Boleh jadi juga ini akan berlanjut dalam penetapan Capres dan Cawapres yang tenggatnya pada September 2023.

Namun, aneka jajak pendapat boleh jadi akan ikut berpengaruh. Dalam konteks ini Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus pernah mengemukakan soal dampak jajak pendapat terhadap internal partai-partai politik. “Dampak dari serangan udara kita lihat kepada tetangga kita, PDIP. Saat seorang Ganjar surveiannya tinggi, dan seorang Puan surveiannya rendah, apa yang terjadi? Bentrok di dalam. Dan sampai sekarang masih kita rasakan,” ungkapnya dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD Golkar Sumatera Utara di Medan, 22 Desember 2022.

Namun, kata Lodewijk, hal serupa juga dirasakan Partai Golkar. Jika ada hasil survei yang menunjukkan elektabilitas Golkar rendah, kerap terjadi keributan di grup WhatsApp kader yang ada di DPR RI. “Golkar juga demikian, saat survei Golkar rendah, mungkin saya nggak tahu teman-teman di provinsi, tapi di pusat, di Jakarta, saat survei kita turun, ada yang menjadi pembela, ada yang komplain, tetapi ada juga yang bertahan. Akhirnya kita pecah, ribut di WA grup DPR RI,” kata dia.

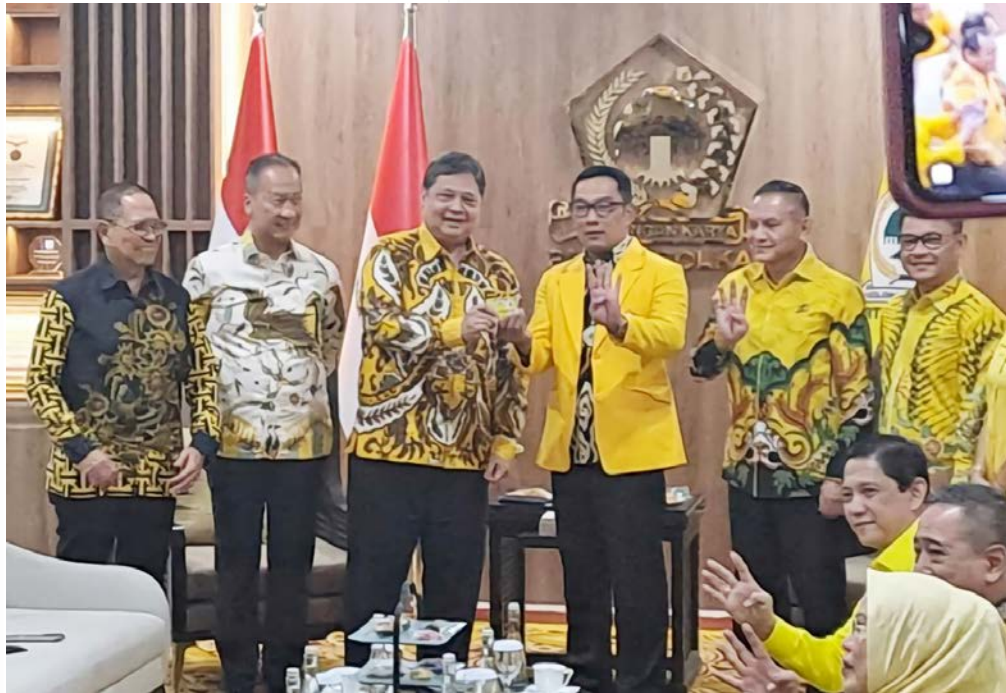
Ungkapan Sekjen Partai Golkar ini sempat memantik polemik. Namun reda setelah Lodewijk meminta maaf. “Apa yang saya paparkan kemarin di Rapimda Partai Golkar di Sumut. Saya ditanya di mana-mana dan saya sudah sampaikan dan WA ke Ibu Puan, pimpinan saya di DPR RI bahwa saya tidak pernah menyatakan terjadi keributan di PDIP,” ujar Lodewijk didampingi Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Musa Rajekshah di Medan, Jumat, 23 Desember 2022.

Sedangkan di internal Partai Golkar, pembukaan tahun politik ditandai dengan masuknya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai kader yang menjabat Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar. Bappilu tentu saja lembaga strategis yang lang-

sung terkait dengan Pileg dan Pilpres.

Muncul kesan Ridwan Kamil dapat saja menjadi kandidat yang diajukan Partai Golkar dalam Pilpres 2024. Namun sejauh ini, Kang Emil, panggilan ringkas Gubernur Jabar itu, lebih tampak sebagai vote getter (penduag suara) bagi partai berlogo beringin yang baru

dengan keluarnya Perpres Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan yang ditandatangani Presiden Jokowi. Jadi, mudah memahami masuknya Kang Emil masih merupakan bagian dari langkah Presiden untuk menjaga stabilitas pemerinta-



dimasukinya. Tak terlihat tanda-tanda resistensi internal Partai Golkar terhadap masuknya Ridwan Kamil.

Harap maklum saja, Jawa Barat yang dipimpinnya merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbesar pada Pemilu 2024. Bukan hanya itu, Jawa Barat juga sangat strategis secara ekonomi

han di tahun politik.

Alhasil, dari dinamika ranah politik di awal 2023 menjelang Pemilu 2024 ini tampak jelas upaya Presiden menjaga keseimbangan dan kesinambungan politik pemerintahan dan hubungan antarpol. Sejauh ini Jokowi masih memegang kendali. ●



MENANTI KOALISI PERUBAHAN MENEPAJI JANJI

Koalisi Perubahan merencanakan sekali lagi deklarasinya setelah rencana sebelumnya yang terjadwal di Hari Pahlawan 10 November 2022 gagal total. Kali ini jadwalnya sebelum Ramadan (akhir Maret 2023).

Sudah lebih dari 100 hari berlalu sejak Partai Nasional Demokrat mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan sebagai calon Presiden tanpa koalisi yang memenuhi syarat ambang batas 20 persen kursi parlemen untuk mengajukan pasangan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024. Nasdem yang beroleh 10 persen lebih kursi DPR masih memerlukan partai lain untuk memenuhi ambang batas itu.

Perkembangan terakhir, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai NasDem, Hermawi Taslim menargetkan nama bakal cawapres pendamping Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 bisa dideklarasikan sebelum bulan puasa. Menurut Taslim, deklarasi itu nantinya akan bersamaan dengan deklarasi koalisi NasDem bersama Partai Keadilan Sejahtera dan Demokrat.

"Kita berharap sebelum memasuki bulan Ramadan ini sudah kelar semua. Kita berharap begitu, itu harapan kami, dan kami optimistik untuk itu," ujar Taslim ditemui Markas Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Minggu, 29 Januari 2023.

Ia pun berharap PKS segera memutuskan pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres). Pasalnya, Nasdem dan Partai Demokrat telah resmi memberikan dukungan tersebut. "Kita harapkan dalam waktu yang segera PKS melakukan hal yang sama supaya kita segera deklarasi," tuturnya.

Taslim menambahkan, kemungkinan Nasdem, Demokrat, dan PKS bakal mendeklarasikan Koalisi Perubahan bersama. "Kalau dengar omongan mereka (tim kecil penjajakan Koalisi Perubahan) mereka di luar, kelihatan-



nya mau (deklarasi) sekaligus. Oke, kita tunggu,” imbuhnya.

Dua hari sebelumnya, tim kecil utusan partai NasDem, Demokrat, dan PKS berkumpul di kediaman Anies Baswedan. Utusan tim kecil Anies Baswedan, Sudirman Said, mengatakan perkumpulan partai ini telah sepakat untuk siap deklarasi bersama.

“Sedikit saya luruskan, jadi salah satu keputusan hari ini adalah teman-teman yang selama ini berkumpul dalam yang disebut tim kecil tadi bersepakat untuk bersiap-siap secara paralel menyiapkan deklarasi bersama,” kata Sudirman Said kepada wartawan di kediaman Anies Baswedan, kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat, 27 Januari 2023.

Sudirman mengemukakan hal itu berarti seluruh tahap yang dilakukan ketiga partai ini berjalan dengan baik. Jadi, sambungnya, tinggal menunggu dan menghormati mekanisme internal partai politik masing-masing.

Ia mengungkapkan, koalisi perkumpulan ketiga partai ini merupakan forum rutin yang dilaksanakan setiap pekan. Khusus Jumat kali ini, Sudirman

menjelaskan pertemuan itu menden-
gar berbagai progress atau update dari masing-masing partai politik. “Jadi kami yang berenam atau berdelapan ini akan menyiapkan diri untuk bersiap-siap melakukan deklarasi bersama pada waktunya,” lanjutnya.

Ini juga terkait dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang telah mengeluarkan pernyataan resmi mendukung pencalonan Capres Anies Baswedan pada Pemilu 2024. “Tentu yang paling baru adalah kita tahu kemarin Pak Agus Harimurti Yudhoyono Ketua Umum Partai Demokrat mengeluarkan rilis atau statement bahwa telah secara resmi mendukung pencalonan itu kita syukuri sebagai suatu progres,” ujar Sudirman.

Dengan begitu, menurut Sudirman, maka progres mengusung Capres Anies pada Pemilu 2024 sudah mendekati 20 persen. Sudirman mengatakan PKS juga akan menyusul Partai Demokrat untuk membuat pernyataan itu.

“Insya Allah kita doakan mudah-mudahan teman kita dari PKS juga akan

menyusul pernyataan semacam itu kita tunggu proses internal yang sedang berlangsung dan dalam proses finalisasi mudah-mudahan,” kata Sudirman.

Sedangkan utusan PKS di tim kecil, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibil Iman menegaskan dukungan partainya terhadap Anies Baswedan sebagai Capres pada Pemilu 2024. “Saya katakan, kalau PKS ini tidak dukung Pak Anies maka tidak mungkin saya ada terus-terusan di dalam tim kecil ini,” kata Sohibil.

Sohibil menyampaikan, dalam tim kecil itu, ia merupakan utusan resmi PKS. “Saya dalam tim kecil ini adalah merupakan utusan resmi partai. Jadi kalau saya terlibat di tim kecil ini menunjukkan bahwa memang PKS dukung Anies,” ujar Sohibil.

Ia juga mengapresiasi Partai Demokrat telah lebih dulu menyampaikan tentang sikap dari Partai Demokrat tersebut terkait dengan masalah dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai Capres 2024. “Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Partai Demokrat yang kemarin ketua umumnya saudara Agus Harimurti Yudhoyono

sudah menyampaikan tentang sikap dari partai Demokrat terkait dengan masalah dukungan terhadap capres bapak Anies Rasyid Baswedan,” tutur Sohibul.

Sedangkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyatakan Demokrat sudah resmi mendukung Anies sebagai capres. Meskipun tak dideklarasikan secara meriah, Riefky menyebut Ketua Umum

Dinamika ternyata berlangsung cepat. Tiga hari usai pertemuan tim kecil itu Sohibul mengumumkan secara resmi sikap partainya. Sikap itu juga sudah selaras dengan hasil diskusi internal Majelis Syuro dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri dan .

“Pertama, sebagaimana ditunjukkan dalam tim kecil koalisi partai pendukung Anies Rasyid Baswedan, PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi

PKS yang bersamaan dengan Rakeras DPP PKS pada 24 Februari 2023. Meskipun demikian, sambungnya, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi percepatan sesuai dinamika politik yang berkembang. “Terutama setelah Ketua Majelis Syuro PKS dan Presiden PKS kembali ke tanah air,” tandasnya.

Selanjutnya, formalisasi pembentukan Koalisi Perubahan itu akan berlanjut dengan penandatanganan tiga ketua umum partai politik. “Tinggal tentu semua itu nanti akan diformalkan oleh tiga ketua umum untuk menandatangani keputusan bersama meresmikan Bapak Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang diusung oleh tiga partai yang kalau dikumulatifkan untuk presidential threshold-nya sudah melebihi 20 persen atau kalau tidak salah sudah 28 persen,” ungkap Teuku Riefky.

Riefky juga tampak lega dengan pernyataan Sohibul. “Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada PKS, tentu kami ketiga partai ini intinya adalah memberikan sebuah poros alternatif harapan publik,” imbuhnya.

Mengenai siapa Cawapres dalam Koalisi Perubahan, Sohibul mengemukakan, PKS tidak mewajibkan sosok itu berasal dari kadernya. “Selama cawapres yang dipilih itu mendukung kemenangan, siapapun dia, tidak harus dari PKS, PKS akan tetap ada dalam koalisi ini,” ungkapnya

Ia menambahkan, PKS siap mengikuti proses penentuan cawapres untuk Anies. Namun demikian, hasilnya diserahkan ke Anies. “Pada akhirnya pemilihannya diserahkan kepada capres. Tentu saja melalui mekanisme yang objektif, misalnya melalui pertimbangan elektabilitas dan sebagainya,” kata Sohibul.

Meski begitu, dalam pertemuan tim kecil, utusan Partai Nasdem tampak absen. Hal ini mengundang spekulasi juga. Terkait dengan pertemuan Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo pada Kamis petang, 26 Januari 2023.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menilai, ada potensi Nasdem meninggalkan Anies Baswedan usai pertemuan Paloh dan Jokowi. Alasannya, pada hari yang sama, sejumlah elite Nasdem juga melakukan pertemuan dengan elite Ger-



Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menyampaikan keputusan tersebut.

Maka ia berharap bisa segera menandatangani kesepakatan koalisi bersama Nasdem, dan PKS. “Harapan kami adalah bahwa tiga partai segera menandatangani dukungan untuk Pak Anies sebagai capres,” ungkap Riefky.

partai pengusung Anies Baswedan di pilpres 2024, sehingga koalisi ini memenuhi presidential threshold 20 persen,” kata Sohibul dalam konferensi pers, Senin, 30 Januari 2023.

Menurut dia, PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada Anies sebagai kandidat Capres 2024-2029 pada rapat Majelis Syuro

indra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Sekretariat Bersama (Sekber).

"Ada yang khawatir Nasdem ini balik badan, balik arah suatu saat nanti akan tinggalkan Anies," kata Ujang, Sabtu, 28 Januari 2023. Terlebih selama ini terlihat ketidaksukaan Presiden Jokowi setelah Nasdem mendeklarasikan dukungan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai Capres.

"Di situlah titik pangkal masalahnya. Nah Nasdem tahu dan paham itu," ujarnya. Maka Ujang berpandangan, ketika Nasdem masih ngotot mendukung Anies, maka pertemuan dan komunikasi antara Surya Paloh dan Jokowi tak akan terjadi.

"Nah setelah komunikasi itu bisa dibangun kembali, maka manuver perubahan itu harus dilakukan oleh Nasdem," lanjutnya.

Namun Wakil Sekjen Nasdem Hermawi Taslim menepis spekulasi partainya akan meninggalkan Anies dengan indikasi absen di tim kecil maupun pertemuan Paloh-Jokowi. Taslim mengemukakan, absennya utusan Nasdem dalam pertemuan tim kecil itu murni karena masalah teknis.

Menurut dia, perwakilan Nasdem di hari yang sama tengah mendampingi Anies dalam safari politik di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam beberapa hari ke depan, sambungnya, mereka telah memiliki jadwal kunjungan ke sejumlah daerah, seperti ke Lombok, Bima, hingga Sumbawa.

"Willy (Ketua DPP NasDem Willy Aditya) sejak tadi pagi, subuh, dengan Anies di NTB. Itu Willy yang dampingi," kata Taslim, Senin, 30 Januari 2023.

Memang, konferensi pers tim kecil saat Sohibul mengemukakan sikap PKS terhadap pencalonan Anies berlangsung di Bandara Soekarno-Hatta. Tapi, bukan sekaligus melepas keberangkatan Anies ke NTB yang berangkat di subuh hari. Rupanya Sohibul Iman baru turun dari pesawat, pulang dari Turki usai menemui Ketua Majelis Syuro PKS.

Utusan Tim Kecil Anies Baswedan, Sudirman Said menyampaikan Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto yang sedianya datang berhalangan hadir lantaran harus memimpin rapat.

"Semula ingin hadir Pak Sugeng dari Nasdem tapi karena beliau memimpin

rapat sampai larut beliau tak bisa hadir," ujarnya membuka konferensi pers.

Sedangkan Taslim menegaskan, Sugeng Suparwoto yang semula dijadwalkan hadir, ternyata harus memimpin rapat di Komisi VII DPR. Menurut dia, rapat tersebut tak bisa ditinggal. Ia mengemukakan, absennya Willy dan Sugeng tak akan mengganggu hubungan koalisi dengan NasDem dan PKS. "Itu teknis saja. Nggak ada apa-apa. Jangan dipertanyakan," tandasnya.

Baiklah kalau begitu. Setelah rencana semula mendeklarasikan Koalisi Perubahan pada 10 November 2022 batal, ada janji yang terucap lagi dan tampak lebih pasti. Banyak yang menunggu deklarasi ini terwujud. Mungkin juga ada yang mengharapkannya batal lagi dan koalisi itu bubar jalan.

Bukan karena soal cawapres. Pengalaman dua Pilpres sebelumnya (2014 dan 2019), muncul kecenderungan memilih saat akhir (last minutes) untuk mendaftarkan pasangan capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum. Jadi apa soalnya? Mungkin politik alokasi atau sebutlah barter kekuasaan menuju Istana. ●





BARTER KEKUASAAN MENUJU ISTANA

Pengalaman Pilpres 2019, Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin menunjukkan kesediaan merangkul kubu pesaing dengan mengakomodasi pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di kabinet. Apakah ini akan berulang pasca Pilpres 2024?

Ya, jika merangkul pasangan pesaing yang kalah Pilpres menjadi anggota kabinet menjadi pola, maka itulah demokrasi gaya Indonesia. Namun, dengan begitu, maka kalah-menang dalam Pilpres seharusnya tidak terlalu menjadi masalah. Hanya menunjukkan seberapa besar pasangan Capres-Cawapres mendapat dukungan rakyat pemilihnya.

Persoalannya, siapa pasangan Capres-Cawapres yang maju dalam Pilpres 2024? Bisa dua, tiga, dan empat pasangan. Katakanlah empat pasangan, maka pemenang Pilpres 2024 hanya perlu menyediakan enam kursi

kabinet menteri untuk pasangan yang kalah. Pada pola seperti itulah maka yang menjadi soal adalah siapa Capres dan Cawapres yang diajukan sebuah koalisi.

Para pendukung pemenang Pilpres jelas akan mendapat alokasi akses politik (dan ekonomi) sebagai menteri paling banyak. Itu pun tetap terbatas. Sebagaimana pengalaman Presiden Jokowi pada pembentukan kabinet pada akhir Oktober 2019 silam.

Ia menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa mengakomodasi semua pihak dalam penyusunan kabinet. Jokowi menyebut susunan menteri-wakil menteri Kabinet Indone-



sia Maju sudah proporsional.

"Tidak mudah menyusun kabinet yang harus beragam karena memang Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu, saya sadar mungkin yang senang atau yang gembira karena terwakili dalam kabinet itu hanya 34 orang yang dilantik," kata Jokowi kala itu.

Ia mengatakan, dalam demokrasi, selalu ada yang terpilih dan tidak terpilih. Pun urusan kabinet yang dinamakan Jokowi sebagai Kabinet Indonesia Maju. Itulah meritokrasi, ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih karena memang melalui sistem seleksi," sambungnya.

Terlebih lagi, Jokowi mengaku menerima lebih dari 300 nama calon. Penyusunan kabinet, menurut Jokowi, dipertimbangkan dari segala lini. Mulai dari suku, agama, hingga parpol juga menentukan kalangan profesional. "Nama yang masuk lebih dari 300

orang, padahal jumlah menteri hanya 34," katanya.

Karena itu, Jokowi menyadari munculnya kekecewaan pasca pengumuman susunan kabinet. "Yang kecewa berarti berarti lebih dari 266 orang pasti kecewa. Artinya, yang kecewa pasti lebih banyak dari yang senang dan mungkin juga sebagian dari yang hadir ada yang kecewa," tutur Jokowi.

Toh selanjutnya Jokowi mengupayakan politik alokasi yang lebih luas setelah merangkul Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di kabinet dengan mengangkat sejumlah politisi menjadi wakil menteri atau kepala badan setingkat menteri. Katakan saja misalnya Wakil Menteri Pariwisata Angela Tanoesoedibjo atau Wakil Menteri Tenaga Kerja Ferry Afriansyah Noor (Partai Bulan Bintang), juga Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Partai Hanura). Belum lagi jabatan-jabatan komisaris Badan Usaha Milik

Negara. Semua berada dalam konteks politik alokasi.

Nah, di mata Max Lane, pengamat politik Indonesia asal Australia, juga pengajar (pernah menjadi dosen di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta), gaya Presiden Jokowi dalam menyusun kabinet ini menunjukkan kesinambungan dalam kebijakan ekonomi dari periode sebelumnya. Toh perkembangan selanjutnya, kata dia, menunjukkan implikasi politik.

Implikasinya, antara lain, konsensus antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo, dan penunjukan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan telah mengempiskan persepsi bahwa elite politik telah terpolarisasi secara ideologis. "Kontestasi ideologi lebih mungkin datang dari luar partai elektoral arus utama: dari Islam politik radikal di satu sisi dan di sisi lain, dari aktivis masyarakat sipil, seperti yang ditunjukkan dalam demonstrasi

• INFO UTAMA

mahasiswa...,” ungkap Lane dalam kajian yang diterbitkan ISEAS Yusof Ishak Institute Singapura (2019).

Lebih jauh lagi, ungkap Lane, terlepas dari konsensus umum tentang isu-isu kebijakan yang mendukung pemulihan hubungan baru-baru ini di dalam elite, persaingan dinasti dan faksi di antara mereka menandakan keretakan dalam koalisi pemerintahan. “Sudah ada tanda-tanda fraksi memposisikan diri untuk mengantisipasi Pemilu 2024,” tandasnya.

Lane menjelaskan, meskipun tidak ada oposisi di parlemen Indonesia mengenai isu-isu kebijakan yang substansial, elite Indonesia tetap menunjukkan loyalitas dinasti dan

dra-PDIP. Paloh telah bertemu dengan Anies Baswedan, yang mengalahkan calon Gubernur Jakarta yang didukung PDIP pada 2012 dan memujinya sebagai calon Presiden masa depan yang baik. Bahkan, Paloh bertemu dengan PKS meski semua masih dalam tataran manuver bertahun-tahun lalu.

Lane menyebutkan, keretakan dalam koalisi saat ini yang disebabkan oleh posisi faksi dalam kaitannya dengan pemilihan 2024 tidak dapat dikesampingkan meskipun ada konsensus umum tentang arah kebijakan strategis. “Juga tidak dapat dikesampingkan bahwa retakan seperti itu akan kembali mengarah pada putaran kontestasi retorik lainnya yang karakternya

al Studies (CSIS), misalnya, mencatat terjadinya perubahan perilaku digital generasi milenial dan Z yang sangat tinggi. Jika dibanding tahun 2018, televisi masih menjadi sumber primer informasi anak-anak muda, yaitu 41,3 persen. Sedangkan rujukan informasi dari media sosial di tahun yang sama hanya mencapai 39,5 persen.

Dalam kurun waktu empat tahun, terjadi perubahan yang drastis. Rujukan terhadap media sosial sebagai informasi Generasi Milenial dan Z naik cukup tinggi menjadi 59 persen. Sedangkan media televisi menurun ke angka 32,0 persen.

“Jadi anak-anak muda hari ini sumber informasi mereka bukan podcast, bukan radio, bukan surat kabar, bukan berita online, tapi sumber utama mereka adalah media sosial,” jelas Ketua Departemen Politik dan Perubahan Arya Fernandes di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Senin, 26 September 2022.

Ini yang menurut Arya akan mengubah peta politik kita ke depan. Alasannya, terjadi perubahan yang sangat signifikan terkait rujukan informasi utama.

Perubahan tersebut tidak lepas dari akses internet saat ini. Pada 2018 akses internet oleh anak muda mencapai angka 86,2 persen dan terus meningkat hingga 93,5 persen di tahun 2022.

Tidak heran, tambah Arya, follower atau pengikut akun media sosial politisi saat ini mencapai angka ribuan. Sehingga, hal ini juga membuat politisi menjadi peduli terhadap media sosial.

Survei yang sama juga menjangkau jajak pendapat mengenai elektabilitas (kemungkinan terpilih) sejumlah tokoh yang diprediksi akan menjadi calon presiden (Capres) 2024. Dalam simulasi tiga nama, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prabowo mengalahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.

Ganjar Mengantongi elektabilitas 33,3 persen, disusul Anies Baswedan 27,5 persen, dan Prabowo Subianto 25,7 persen. Menurut CSIS dalam peta politik saat ini, tiga nama tersebut yang paling mungkin secara politik dan elektoral untuk dicalonkan.

“Memang peta masih mungkin berubah, tapi ini kondisi peluang yang



faksional. Mereka bersatu dalam perspektif ekonomi dan politik secara umum, tetapi persaingan dinasti dan faksi masih memainkan peran yang serius. Ini akan tetap penting dalam hal setiap fraksi memposisikan diri untuk Pilpres 2024 ketika Widodo tidak lagi dapat mencalonkan diri. Kesesuaian PDIP Prabowo, ditambah dengan terpilihnya sebagai Presiden DPR putri Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, telah memicu spekulasi tentang semacam penentuan posisi presiden PDIP-Gerindra 2024.

Jadi, sejak 2019, sudah banyak yang menengarai manuver Nasdem dan Surya Paloh secara efektif mengambil jarak dari Jokowi dan PDIP, meskipun tidak berarti memutuskan hubungan, sebagai reaksi terhadap posisi Gerin-

da-PDIP. Paloh telah bertemu dengan Anies Baswedan, yang mengalahkan calon Gubernur Jakarta yang didukung PDIP pada 2012 dan memujinya sebagai calon Presiden masa depan yang baik.

Prediksi Lane pada 2019 itu sebagian besar tampak jelas di awal tahun politik 2023 menjelang pemilihan 2024. Namun, jauh lebih kompleks dari itu. Kontestasi retorik, juga karakter aliansi taktis dan politisasi agama kian dinamis dengan perkembangan penggunaan media sosial.

Terlebih lagi, para pengguna sosial umumnya berada dalam kelompok Generasi milenial (Gen Y) yang lahir antara 1980-1998 dan Generasi Z (Gen Z) kelahiran 1999-2010. Pada saat bersamaan, Generasi Y dan Z merupakan lebih dari separuh jumlah pemilih pada 2024.

Centre for Strategic and International

“mungkin, baik secara politik maupun hitung-hitungan antarpolisi dan juga secara elektoral,” ujar Arya Fernandes.

Sedangkan di awal tahun politik 2023, tampak bahwa peta koalisi juga menunjukkan dinamika yang belum memastikan pasangan Capres dan Cawapres masing-masing. Katakanlah Nasdem yang berupaya menyusun koalisi bersama Partai Demokrat dan PKS dengan nama Koalisi Perubahan sejak Juni 2022. Meski sudah sepakat mengukung Anies Baswedan, belum jelas siapa yang akan menjadi calon wapresnya. Secara normatif, sejauh ini, siapa pendamping Anies sebagai Cawapres diserahkan kepada Sang Capres.

Pada contoh lain, munculnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai kandidat kuat calon Presiden membuat dinamika tahun politik mel- eset dari gambaran Lane tentang konsensus Gerindra-PDIP pada 2019 untuk berkoalisi pada pemilihan 2024. Malah PDIP sebagai satu-satunya partai yang dapat mengajukan calonnya sendiri justru belum menentukan siapa calon presiden untuk 2024 hingga tujuh bulan menjelang penutupan pendaftaran Capres dan Cawapres 2024 ke Komisi Pemilihan Umum.

Sementara Gerindra tampak berusaha menyusun koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Baru ada calon Presiden Prabowo Subianto, siapa cawapresnya, masih tanda tanya. Sementara pasangan Prabowo dalam Pilpres 2019, Menparekraf Sandiaga Uno, beberapa kali terlihat dekat dengan sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan yang sebelumnya berada di Koalisi Indonesia Baru (KIB) bersama Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional yang terbentuk paling awal pada Mei 2022.

Bagaimana dengan kelangsungan KIB? Sama seperti PDIP, belum ada Capres definitif yang dideklarasikan. Perkembangan terakhir, Partai Golkar sebagai penghelat KIB merekrut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu). Sebagai catatan, Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah pemilih terbesar pada Pemilu 2024, seperti juga dalam Pemilu 2019.

Catatan lain, dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018, Ridwan Kamil diusung oleh Partai Nasdem, PPP, PKB, dan Hanura.

Masuknya Kang Emil, panggilan ringkas Gubernur Jawa Barat itu, terkesan merebutnya dari tangan Nasdem yang mengukungnya sebagai Cagub.

ligus antara Jokowi-Ganjar Pranowo-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di sisi lain.

Asumsi besar pertamanya adalah bahwa KIB salah satu infrastruktur politik Jokowi yang dipercayakan secara teknis kepada Airlangga Hartarto dan KIB. Jadi dengan memboyong Rid-



Pengamat politik dan kebijakan publik Jannus T Siahaan



Ketua Departemen Politik dan Perubahan Arya Fernandes

Implikasinya tentu bersifat elektoral, dukungan suara dalam Pilpres, Pileg, dan jangan lupa Pilkada yang sama-sama berlangsung pada 2024.

Di mata pengamat politik dan kebijakan publik Jannus T Siahaan, masuknya Ridwan Kamil ke Partai Golkar tak lepas dari diskursus politik antara Jokowi dan Surya Paloh Nasdem seka-

wan Kamil ke kubu Partai Golkar dan KIB adalah bagian dari aksi Jokowi untuk menghadapi Nasdem dan Surya Paloh. Pada saat bersamaan, Jokowi juga menyiapkan figur yang akan menjadi pasangan Ganjar Pranowo di pemilihan presiden tahun 2024 nanti, jika Ganjar Pranowo gagal menjadi capres dari PDIP. ●

POLEMIK SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP

Polemik terkait sistem pemilu representasi proporsional kembali mengemuka. Pasalnya adalah pernyataan Ketua KPU yang menyebut kemungkinan Pemilu 2024 kembali menggunakan sistem proporsional tertutup.

Pernyataan tersebut mengundang perdebatan hangat dalam beberapa hari terakhir. Baik yang pro maupun kontra mengatakan bahwa pilihan mereka adalah baik buat demokrasi Indonesia.

Mereka yang kontra dengan sistem proporsional tertutup berkata bahwa demokrasi akan “dibajak” oleh partai politik jika sistem ini diterapkan. Ini karena nama caleg tak lagi ada di surat suara dan pemilih hanya akan memilih logo partai. Kosekuensinya, kampanye-kampanye caleg dalam bentuk pemasangan baliho, spanduk, dan pembagian kaos mungkin tak lagi menjadi berguna.

Sementara yang pro dengan sistem proporsional tertutup beralasan bahwa sistem ini bisa mendorong pemilu berbiaya lebih rendah. Anggapan ini dinyatakan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, yang menganggap bahwa dari sisi penyelenggaraan, kebutuhan Pemilu 2024 paling tidak ada di angka Rp31 triliun.

Kondisi dan tujuan

Pilihan terkait sistem pemilu hampir selalu berangkat dari kondisi sosiologis dan politik suatu bangsa, desain sistem elektoral pendahulu, dan tujuan yang ingin dicapai. Yang penting dicatat, pilihan sistem pemilu tidak ada kaitannya dengan maju-tidaknya demokrasi suatu negara. Ini karena baik sistem proporsional terbuka atau tertutup, bahkan sistem distrik sekalipun, sama-sama harus dianggap demokratis, sejauh ketiganya dijalankan dengan basis dan logika kompetisi elektoral yang sehat.

Oleh karena itu, ini adalah soal pilihan. Ketika Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka sejak Pemilu 2009, alasan dasarnya adalah karena kita menginginkan masyarakat lebih mengenal caleg di dapil masing-masing.

Dengan sistem terbuka, kemungkinan kedekatan caleg dengan pemilih memang lebih tinggi, karena caleg memiliki insentif turun menyapa masyarakat agar namanya dipilih di bilik suara. Dengan cara ini, pemilih diharapkan betul-betul menjatuhkan pilihan kepada caleg yang kapabel dan paling layak mewakili aspirasi mereka di dapil masing-masing.

Meski demikian, sejak 2009 itu pula, politik uang kian



Oleh: Noory Okthariza
Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Jakarta

merajalela. Sistem kampanye dengan nomor urut terbuka di setiap pemilu legislatif menciptakan model “politik pasar”, yakni keterpilihan caleg amat bergantung dari negosiasi “harga” yang dilakukan antara caleg dan pemilih. Tiga kali penyelenggaraan pemilu dengan sistem ini menciptakan model interaksi yang semakin terpola; baik caleg dan pemilih tahu bahwa politik uang, dengan segala variasinya, adalah kunci keterpilihan. Ini membuat politik Indonesia kontemporer kian berbiaya tinggi.

Dari sisi akademik, kenyataan ini telah membuat Indonesia masuk dalam referensi klasik di Asia soal hubungan antara desain sistem elektoral dan kesulitan

memperkuat partai politik (party building).

Indonesia mengonfirmasi studi-studi pendahulu di Amerika Latin yang menyatakan bahwa model representasi proporsional terbuka yang dipadukan dengan sistem multipartai akan menciptakan politik yang lebih terfokus pada kandidat (candidate-centered) dan bukan partai (party-centered).

Kampanye bukan menjadi ajang promosi partai politik, melainkan personalisasi keunikan caleg. Akibatnya, aspek personal dan primordial, seperti nama keluarga, agama, dan suku menjadi lebih penting dalam politik ketimbang nilai-nilai dan orientasi partai.

Selain itu, model proporsional terbuka juga menciptakan perang terbuka antarcaleg yang berasal dari partai yang sama. Alih-alih bekerja sama memperkuat basis sosial dan organisasi partai, caleg cenderung menutup diri dari kolega sesama partai. Ini karena caleg sadar bahwa pesaing utama mereka bukan berasal dari partai politik lain, melainkan dari internal partainya sendiri. Kenyataan ini menciptakan hubungan yang rumit antarcaleg sesama partai di masa kampanye, yang pada ujungnya kembali mempersulit penguatan partai politik.

Rekomendasi

Apakah sistem proporsional tertutup adalah solusi dari persoalan-persoalan tersebut? Jawabannya mungkin tidak terlalu gamblang.

Terkait dengan persoalan politik uang, sistem tertutup sangat mungkin hanya memindahkan politik uang dari area publik di masa kampanye menjadi transaksi internal antar-elite partai. Caleg akan berebut dukungan internal untuk didudukkan sebagai calon prioritas jika partai mendapat suara yang cukup untuk konversi kursi. Hal ini bisa

terjadi manakala tidak ada mekanisme yang fair dan jelas di internal partai terkait bagaimana dan apa saja indikator menempatkan caleg sebagai calon prioritas.

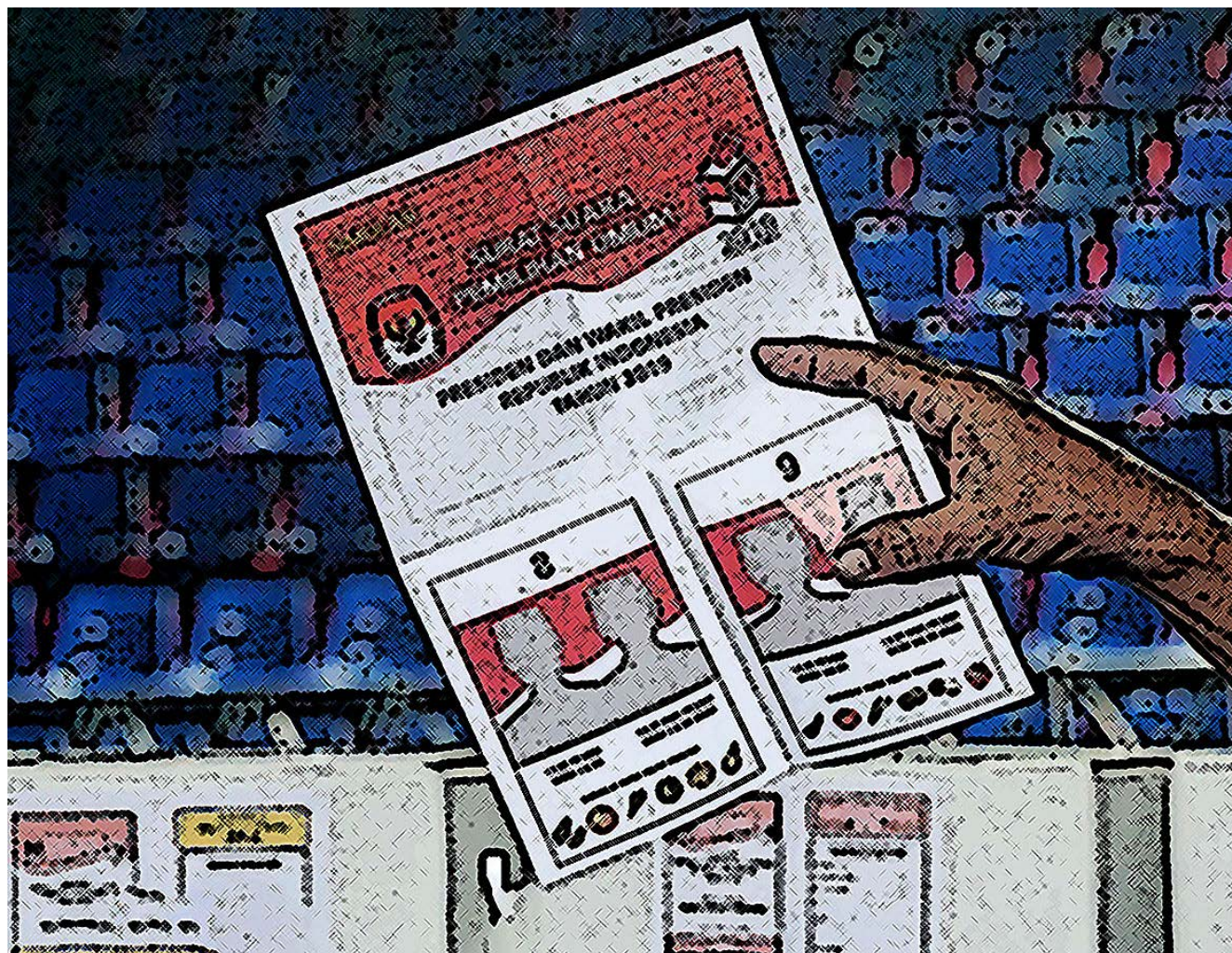
Oleh karena itu, perlu ada aturan main terkait ini. Sayangnya, Undang-Undang Pemilu kita hampir dipastikan sulit mengatur persoalan mekanisme ini. Alasannya, aturan main ini merupakan ranah internal dari partai politik.

Pelajaran dari banyak negara terkait mekanisme seleksi kandidat memang amat bergantung dari kesediaan partai politik membuat aturan main yang fair yang bisa diterima semua caleg. Hanya di negara, antara lain, Jerman, Finlandia, dan Norwegia, undang-undang secara jelas mengatur rekrutmen dan seleksi kandidat (Hazan & Rahan, 2006:

mekanisme yang dipilih, seyogianya harus dianggap fair dan bisa diterima para caleg agar meminimalkan potensi prevalensi politik uang.

Jika ke depan kita tetap memilih sistem proporsional terbuka, perlu ada intervensi lebih terkait penggunaan uang dalam kampanye. Menaikkan sumbangan negara bagi partai politik adalah rekomendasi yang sudah banyak dikaji, termasuk oleh KPK dan Kemendagri.

Meski demikian, diskursus ini tampaknya sudah tenggelam dan tak terlalu berhasil menarik minat politisi untuk ditindaklanjuti secara serius. Untuk itu, diperlukan penguatan sanksi dan pencegahan jangka pendek yang realistis bisa dikerjakan untuk Pemilu 2024 nanti. Di sini, Bawaslu, terutama yang ada



109). Sementara di kebanyakan negara demokrasi tidak ada aturan baku yang disepakati bersama.

Akan tetapi, setiap negara dapat dibedakan dari segi seberapa inklusif mekanisme partai menyeleksi caleg mereka. Semakin sedikit kader atau organisasi partai yang dilibatkan, proses seleksi caleg menjadi kian eksklusif. Begitu pula sebaliknya.

Rahat dan Hazan (2001; 2006) membuat spektrum soal ini; apakah seleksi caleg ditentukan oleh suara seluruh konstituen, perwakilan partai di daerah (semacam DPD partai di Indonesia), agensi independen yang ditunjuk partai, elite-elite partai terpilih, atau prerogatif ketua umum saja. Ini adalah pilihan-pilihan yang tersedia. Dan apa pun

di daerah, memainkan peranan penting.

Terkait kecenderungan kampanye bernuansa primordial, mungkin ada baiknya KPU mempertimbangkan menghilangkan segala atribusi di luar nama sah caleg di surat suara dan alat peraga kampanye. Hal ini berarti menghilangkan gelar akademik, gelar agama, dan gelar adat dari nama asli para kandidat. Dengan demikian, begitu surat suara dibuka, semua caleg akan terlihat sama di mata pemilih.

Tentu sulit membayangkan perubahan besar terjadi dalam masa ketika tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan seperti sekarang ini. Tetapi, setiap perubahan kecil dalam desain sistem elektoral perlu didorong agar kualitas pemilu kita menjadi semakin baik. ●



AKSI BERGIZI MELAWAN STUNTING

Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menurunkan angka stunting mendapat apresiasi dari Kementerian Kesehatan. Apresiasi yang diberikan dalam bentuk penghargaan karena Sumsel terpilih sebagai provinsi dengan persentase jumlah sekolah terbanyak mengikuti gerakan nasional Aksi Bergizi dalam Upaya Pencegahan Stunting.

Berdasarkan hasil sementara Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), tercatat ada empat kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang berhasil melakukan penurunan prevalensi balita stunting yang sangat signifikan lebih dari 10 persen. Keempat daerah itu adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), dan Kota Prabumulih.

Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Trisnawarman, menjelaskan, data rutin dalam laporan elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGM) per November 2022, sebanyak 596.612 balita (86,7 persen) di Sumatera Selatan telah dilakukan pengukuran di Posyandu.

Dari data tersebut sebanyak 8.499 balita (2,3 persen) teridentifikasi berisiko stunting. Saat ini, balita-balita tersebut telah dilakukan pendampingan diberikan layanan berupa pemberian makanan

tambahan dan pengobatan baik di tingkat Puskesmas atau dirujuk ke rumah sakit.

Dia juga menjelaskan berdasarkan SSGI Kementerian Kesehatan 2021, tercatat bahwa prevalensi balita stunting di Sumatera Selatan sebesar 24,8 persen dan rata-rata nasional 24,4 persen.

Sebelumnya Gubernur Sumsel, Herman Deru, bersama Ketua TP PKK Sumsel, Febrita Lustia HD, saat me-launching kegiatan Kampanye Aksi Bergizi Sumsel menegaskan, kampanye tersebut diharapkan dapat menekan angka stunting di Bumi Sriwijaya.

Menurut Herman Deru, kampanye Aksi Bergizi itu juga menjadi upaya preventif mencegah para remaja putri mengalami anemia yang dapat menjadi pemicu berbagai persoalan di kemudian hari, salah satunya stunting.

"Anemia berkepanjangan ini sangat mungkin diidap remaja putri. Ini penting diperhatikan karena pelajar putri sebagai

calon ibu akan melahirkan generasi berikutnya. Makanya kita adakan kampanye bergizi ini," jelas Herman Deru.

Herman Deru menghimbau jajaran dinas di Sumsel, pemkab/pemkot, bahkan Puskesmas agar gencar memberikan edukasi pada para remaja putri. Edukasi yang dapat diberikan misalnya mengenai gejala-gejala apa saja yang mereka alami jika anemia dan sekaligus memberikan solusinya.

"Edukasi ini penting, sebab secara kasat mata ini tidak terlihat," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya, mengatakan, Pemprov Sumsel telah melakukan langkah-langkah percepatan penurunan stunting. Beberapa di antaranya melalui SK Gubernur Nomor 212/kpts/bap-peda/2022 tentang pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sumatera Selatan guna memastikan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lain, merumuskan kebijakan dan lainnya.

Selanjutnya, Surat Gubernur Sumsel kepada Bupati/Wali Kota se-Sumatera Selatan Nomor. 140/3807/DPMD/2022 pada 31 Oktober 2022 perihal prioritas penggunaan dana desa 2023 untuk penurunan angka stunting.

"Ketiga dengan pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak 6.130 tim atau 18.390 orang yang berada di seluruh desa/kelurahan. Kemudian, keempat pembentukan satuan tugas dan technical assistance (TA) stunting tingkat provinsi dan kabupaten/kota," jelasnya.

Berikutnya, menyelesaikan pelaporan TPPS semester 1 yang telah diunggah di Website Bangda Kemendagri. Juga memfasilitasi penyelesaian laporan TPPS dimaksud untuk TPPS di tingkat kota dan kabupaten. Untuk pelaporan semester dua sedang diselesaikan Januari ini.

Pelaksanaan percepatan penurunan stunting itu dapat dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemkab, hingga ke desa.

"Melalui kesempatan ini juga saya mengajak seluruh Ketua TPPS dari 17



kabupaten/kota, Sekretaris Percepatan Penurunan Stunting, Tim Pendamping Keluarga, Kader KB, Penyuluh KB, Satuan Tugas dan TA Stunting, mitra kerja lain seperti kader PKK yang terlibat langsung maupun tidak langsung

untuk segera merapat bersama-sama menyusun strategi untuk Percepatan Penurunan Stunting di Sumatera Selatan. Sehingga Sumsel siap menurunkan angka stunting Sumsel di bawah angka nasional," jelasnya. •

FOKUS PEMBANGUNAN DAN EKONOMI DAERAH

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya (HDMY) terus melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur ekonomi bagi masyarakat yang bermukim di kawasan perairan. Salah satunya yakni Jembatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Jembatan rangka baja yang membentang di atas Sungai Ogan tersebut memiliki bentang 260 meter yang pengerjaannya sudah 70 persen. Peninjauan pembangunan jembatan ini dilakukan Wakil Gubernur Mawardi Yahya saat berkunjung ke Desa Negeri Sakti, Kecamatan Air Sugihan, OKI.

Maka jembatan ini nantinya akan membuka akses keterisolan masyarakat yang bermukim di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten OKI, dan Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah perairan.

"Saya bersama dengan pak Gubernur Herman Deru ingin kawasan ini

maju, masyarakat disini dapat beraktivitas dengan lancar dan masyarakat di kedua kabupaten, yakni OKI dan Banyuasin, setelah jembatan ini difungsikan akan lebih sejahtera," harap Mawardi Yahya.

Wagub menegaskan, dibangunnya jembatan rangka baja Air Sugihan tersebut merupakan wujud perhatian HDMY pada masyarakat setempat yang sejak 40 tahun menginginkan adanya jembatan sebagai akses lalu lintas jalur darat setelah sebelumnya hanya bergantung pada angkutan jalur air.

"Selama ini masyarakat di sini hanya mengandalkan angkutan air yang kerap terjadi kendala saat air pasang.



Karena itu, kami sama-sama berdoa agar jembatan ini dapat diresmikan oleh Pak Gubernur Herman Deru pada Agustus 2023 mendatang," imbuhnya.

Mawardi berharap pada warga setempat untuk menjaga dan memelihara keberadaan jembatan yang telah dibangun menggunakan uang rakyat tersebut.

"Mari kita sama-sama pelihara jangan sampai ada yang hilang. Agar fungsi dari jembatan ini nantinya betul-betul bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Sumsel, Muhammad Affandi, menerangkan, hingga saat ini terealisasi pembangunan jembatan sampai tahap tiga dengan panjang 160 meter yang menghubungkan Desa Pangkalan Damai Kecamatan Air Sugihan di Kabupaten OKI dan Desa Indrapura Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin.

"Di bulan Februari ini kita sudah mulai kerjakan lagi, kami mengharapkan semua masyarakat mendukung pembangunan agar masyarakat OKI yang hendak ke Banyuasin atau sebaliknya akan merasakan manfaatnya," tuturnya.

Sementara Kepala Desa Pangkalan Damai, Kecamatan Air Sugihan, Sujatmiko, atas nama masyarakat setempat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumsel yang telah membangunkan jembatan penghubung ke dua kabupaten bertetangga tersebut.

"Jembatan ini sudah dinantikan masyarakat sejak 40 tahun lamanya, dan baru terealisasi di masa kepemimpinan Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya. Untuk itu kami masyarakat Air Sugihan mengucapkan terimakasih banyak," tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Dwi Widodo selaku Kepala Desa Indrapura Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin, yang menyebut keberadaan jembatan ini nantinya akan menjadi urat nadi penting bagi keberlangsungan ekonomi warga sekitar.

"Keberadaan jembatan ini akan



sangat berarti bagi roda ekonomi masyarakat karena itu mohon kiranya penyelesaiannya dipercepat," tuturnya.

Selain fokus pada pembangunan daerah, HDMY juga memberikan perhatian lebih pada peningkatan ekonomi kecil. Ratusan Wirausaha Muda, Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumsel menerima bantuan peralatan usaha dari Gubernur Sumsel, Herman Deru.

Dia menegaskan, bantuan yang diberikan sebagai bentuk perhatian atas kegigihan para pelaku usaha yang tetap bertahan pada saat pandemi sekaligus sebagai apresiasi atas perannya dalam pengendalian inflasi di Sumsel.

"Sumsel masuk dalam 10 provinsi terbaik di Indonesia dalam pengendalian inflasi. Hal ini bukan hebatnya pemerintah ataupun para pejabat tapi ini hebatnya para pelaku usaha yang dapat tumbuh dan bangkit di tengah ketatnya persaingan," tegasnya.

Selain itu, para pelaku usaha yang mendapatkan bantuan stimulan dari Pemprov Sumsel ini adalah pelaku usaha yang tetap bertahan di tengah badai pandemi Covid-19.

"Terima kasih pada para pelaku usaha yang telah bekerja luar biasa dalam membangun ekonomi yang tangguh menekan terjadinya gejolak inflasi daerah. Membaiknya ekonomi juga dikarenakan masyarakat telah aktif menggalakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) sehingga inflasi dapat dikendalikan," tandasnya. •

TOL INDRALAYA-PRABUMULIH PERCEPAT PERTUMBUHAN EKONOMI

Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan terus bergerak maju, salah satunya dengan adanya jalan tol Indralaya menuju Kota Prabumulih yang mampu mempersingkat perjalanan. Pesatnya pembangunan yang dilakukan di Sumatera Selatan ini mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah hingga pelosok.

Untuk melihat progres pembangunan tersebut Gubernur Sumsel, Herman Deru, melakukan peninjauan ruas jalan tol Indralaya-Prabumulih. Dimana, hal itu sebagai langkah untuk memastikan sejauh mana progres pembangunan ruas jalan berbayar tersebut.

"Saya lihat progres pembangunan jalan tol ini tepat waktu. Bahkan, beberapa jembatan penghubung jalan tol ini juga telah dibangun," kata Herman Deru disela peninjauan tersebut.

Menurutnya, percepatan pembangunan jalan tol Indralaya-Prabumulih penting dilakukan. Hal itu mengingat kebutuhan akan jalan tol di Sumsel sudah cukup tinggi.

"Kita mengutamakan pengerjaan long segmen. Karena dengan adanya jalan tol ini, diharapkan dapat memenuhi target investasi. Ini tentu akan menjadi lirikan para investor," terangnya.

Dia mengatakan, masyarakat khususnya pengguna jalan tentu tidak sabar dioperasikannya ruas jalan tol Indralaya-Prabumulih ini. Untuk itu, targetnya jalan tol ini bisa rampung pada Maret 2023.

"Kita tentu tidak sabar jalan tol ini segera beroperasi. Termasuk ruas tol Palembang-Betung dan ruas tol Prabumulih-Muara Enim. Untuk jalan tol ini, targetnya selesai pada Maret 2023. Jadi pada arus mudik Hari Raya Idul Fitri," tuturnya.

Sebab jalan tol tersebut akan membawa dampak baik bagi pertumbuhan ekonomi di Sumsel.

"Ini tentu akan membuat pertumbuhan ekonomi makin cepat. Akses distribusi hasil produksi mulai dari pangan dan lainnya semakin cepat. Artinya, jalan tol ini akan memperpendek rentang waktu tempuh. Jadi, keberadaan tol ini dapat mengefisienkan biaya perjalanan," jelasnya.

Di sisi lain, Herman Deru mengingatkan, Hutama Karya (HK) sebagai penanggung jawab pembangunan jalan tol tersebut terus memperhatikan hal-hal yang mengakibatkan traumatik masyarakat pengguna jalan.

"Keamanan pengguna jalan harus menjadi perhatian. Jangan sampai banyak menyebabkan traumatik masyarakat akibat kecelakaan di ruas tol ini. Artinya, kenyamanan harus diprioritaskan karena ini jalan berbayar," paparnya.

Peninjauan tersebut dilakukan Herman Deru di sepanjang ruas tol Indralaya-Prabumulih. Herman Deru juga berkesempatan meninjau pembangunan rest area atau tempat istirahat di jalan tol tersebut.

"Saya juga meminta agar di rest area ini dibuat bangunan yang bercirikan Sumsel. Berdayakan juga produk UMKM lokal seperti oleh-oleh kuliner hingga kerajinan khas, namun tetap dikelola se-



cara modern," imbuhnya

Tak sampai disitu, peninjauan tersebut dilakukan Herman Deru sampai ke exit tol Prabumulih.

"Sejauh ini, jalan tol ini sangat nyaman dan ini harus terus dipertahankan," bebarnya.

Sementara itu, Project Director Jalan Tol Indralaya-Prabumulih Sarjono mengatakan, progres pembebasan lahan pembangunan jalan tol Indralaya-Prabumulih sudah rampung 96 persen.

"Progres lahan sudah 96,04 persen. Namun konstruksi tetap bisa dilakukan. Saat ini sudah berjalan baik," katanya.

Statistik (BPS) Sumatera Selatan mengungkapkan, dalam satu tahun terakhir dalam rentang waktu September 2021-September 2022, angka kemiskinan Sumsel turun sebesar 0,84 persen dari sebelumnya 12,79 persen menjadi 11,95 persen.

Kepala BPS Sumsel, Zulkipli, menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Sumsel turun sebanyak 61,62 ribu orang dari yang sebelumnya berjumlah 1.116,61 ribu orang menjadi 1.054,99 ribu orang. Jika dibandingkan pada periode Maret 2022.

"Persentase penduduk miskin di dae-

kanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) September 2022 tercatat sebesar 73,98 turun jika dibandingkan kondisi Maret 2022 sebesar 74,34 persen, dan turun jika dibandingkan kondisi September 2021 yang sebesar 74,16 persen," tambahnya.

Dia menuturkan, komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, gula pasir, mie instan, cabe merah, bawang merah, dan kopi bubuk dan kopi instan (sachet).



Dia memastikan, jika pada Maret 2023 ini, jalan tol Indralaya-Prabumulih sudah bisa dioperasikan.

"Lebaran nanti sudah bisa dilalui, meski pada tahap penyelesaian," pungkasnya.

Angka Kemiskinan Turun

Maraknya pembangunan yang dilakukan berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan. Badan Pusat

Statistik (BPS) Sumatera Selatan mengungkapkan, dalam satu tahun terakhir dalam rentang waktu September 2021-September 2022, angka kemiskinan Sumsel turun sebesar 0,84 persen dari sebelumnya 12,79 persen menjadi 11,95 persen.

Kepala BPS Sumsel, Zulkipli, menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Sumsel turun sebanyak 61,62 ribu orang dari yang sebelumnya berjumlah 1.116,61 ribu orang menjadi 1.054,99 ribu orang. Jika dibandingkan pada periode Maret 2022.

"Persentase penduduk miskin di dae-

Sedangkan komoditas bukan makanan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, kesehatan, dan perawatan kulit, muka, kuku, rambut.

"Pada periode September 2021 hingga September 2022, maupun periode Maret 2022-September 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sama-sama mengalami penurunan kemiskinan," terang-nya. •***/rhd

BUKAN BERARTI SUDAH AMAN

Rakyat Indonesia telah berjuang menghadapi pandemi Covid-19 lebih dari dua tahun sejak pertama ditemukannya pasien yang terjangkit virus SARS CoV-2 pada Maret 2020. Beragam upaya telah dilakukan untuk mengatasi penyebaran dan juga pengobatan bagi pasien yang terjangkit penyakit ini.

Kini Indonesia telah berhasil keluar dari krisis pandemi yang sempat memporak-porandakan ekonomi nasional dan global. Kehidupan ekonomi rakyat yang sempat sulit dalam dua tahun terakhir mulai tumbuh kembali di awal Januari 2023 ini. Atas pencapaian itu Presiden Joko Widodo resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia pada Desember lalu.

"Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi

persen, tingkat perawatan rumah sakit berada di angka 4,79 persen, dan angka kematian di angka 2,39 persen. Ini semua berada di bawah standar dari WHO, seluruh kabupaten/kota di Indonesia saat ini berstatus PPKM level 1 di mana pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah.

"Setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut kurang lebih selama 10 bulan, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 Tahun 2022," ucap presiden.

masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada. Ia mengatakan masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi risiko Covid-19. Memakai masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan.

Kesadaran vaksinasi terus digalakan karena akan membantu meningkatkan imunitas dan masyarakat harus semakin mandiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala, dan mencari pengobatan.

Aparat dan lembaga pemerintah tetap harus siaga. Fasilitas kesehatan di wilayah harus siaga beserta tenaga kesehatan. Pastikan mekanisme penanganan tetap berjalan utamanya vaksinasi.

"Jadi Satgas daerah tetap ada selama masa transisi," ungkap Jokowi.

Dikatakan Presiden, meski PPKM dicabut, jangan sampai ada kekhawatiran, Bansos akan terus dilanjutkan di 2023, bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di fasilitas kesehatan yang ditunjuk.

Jokowi menjelaskan, Indonesia termasuk negara G20 yang dalam 11 bulan berturut-turut tidak mengalami gelombang pandemi.

"Kita ingat saat puncak Delta, kita berada di angka 56 ribu kasus di 2021, dan di 2022 mengalami lagi puncak pandemi karena omicron berada di angka 64 ribu kasus harian. Perlu kita sampaikan kemudian kondisi pandemi juga semakin terkendali kalau kita lihat kasus harian per 29 Desember 2022 hanya 685, kemudian angka kematian di 2,39 persen. Pencabutan PPKM ini juga dilandasi tingginya cukupan imunitas penduduk. Dari Sero Survey pada Desember 2021 itu berada di 87,8 persen, di Juli 2022 ini berada di angka 98,5 persen. Artinya kekebalan kita ini secara komunitas ada di angka yang sangat tinggi," ungkap presiden.



COVID-19 dengan baik dan sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonomi nya," ujar Presiden Jokowi.

Dalam beberapa bulan terakhir Pandemi Covid-19 semakin terkendali di Indonesia. Pada 27 Desember 2022, kasus Covid-19 harian mencapai 1,7 kasus per 1000.000 penduduk, positive rate mingguan mencapai 3,35

Namun, pandemi ini belum berakhir sepenuhnya dan untukantisipasi gelombang baru, maka Status Kedaruratan Kesehatan (Keppres 11/12 Tahun 2020) tetap dipertahankan, mengikuti status PHEIC (Public Health Emergency of International Concern) dari WHO.

Presiden meminta kepada seluruh

Sementara, Kementerian Kesehatan mengungkapkan, untuk vaksinasi Indonesia sudah masuk peringkat lima besar dunia yakni berada di bawah China, India, Amerika Serikat, dan Brazil. Pada tahun 2022 Indonesia telah memberikan sekitar 450 juta dosis vaksin yang disuntikan ke 204 juta orang dari target populasi sekitar 234 juta orang.

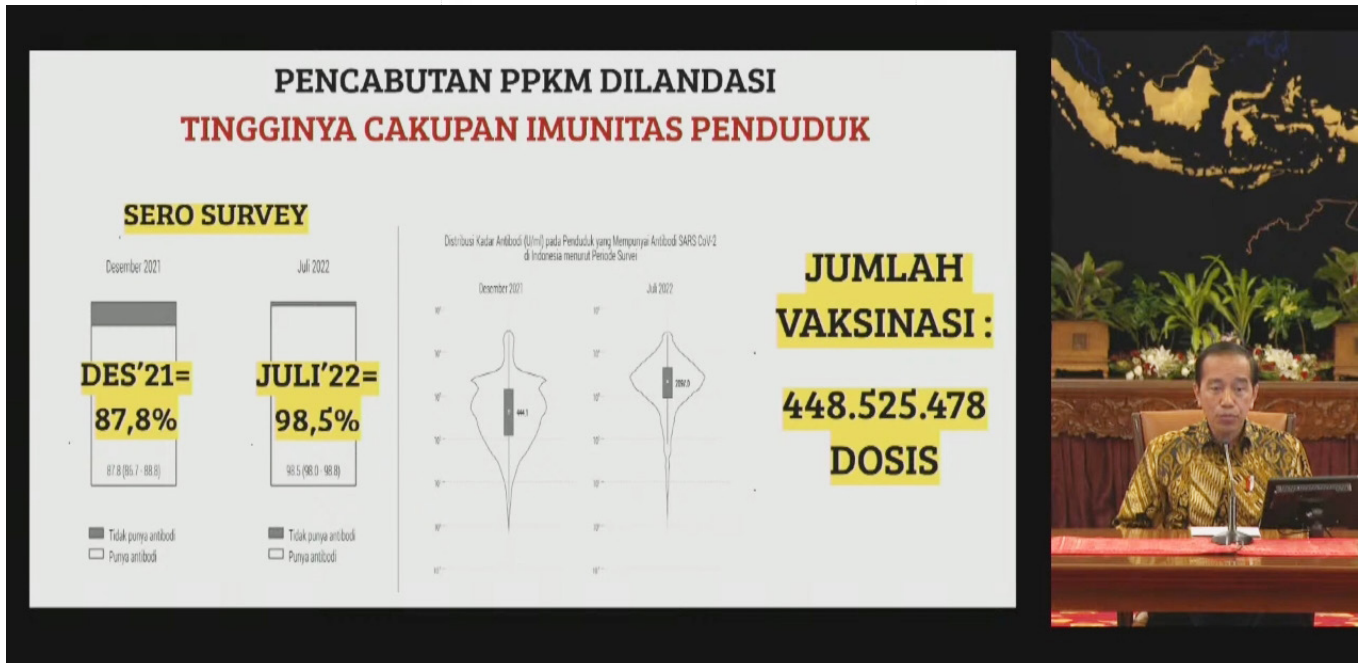
nan untuk menularkan ke orang lain tidak mencapai satu orang.

Selain vaksinasi Covid-19, Kemenkes juga melakukan sejumlah inisiatif untuk meredam kenaikan kasus di Indonesia. Langkah yang dilakukan berupa pemanfaatan dari sisi sains dan teknologi untuk memproses identifikasi jenis atau varian virus.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi

dilakukan selama 9 bulan di 16 laboratorium. Kini jumlah laboratorium dan kemampuan identifikasi varian baru di Indonesia telah berkembang pesat.

Inisiatif lain yang dilakukan oleh Kemenkes adalah menyiapkan kebutuhan oksigen di rumah sakit dan juga bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena ketika terjadi lonjakan kasus varian Delta, sempat terjadi kelang-



Indonesia sendiri sempat mengalami dua gelombang Covid-19 yang besar, yaitu gelombang Delta pada Juni-Juli 2021 dan Gelombang Omicron awal 2022. Namun, dengan tingkat cakupan vaksinasi yang tinggi setelah gelombang varian Omicron, di Indonesia tidak ditemukan lonjakan kasus baru.

Beberapa negara besar sempat mengalami lonjakan, namun Indonesia tidak mengalami lonjakan yang berarti, baik dari sisi kasus, hospitalisasi maupun yang meninggal.

Kementerian Kesehatan menyebutkan indikator penularan Covid-19 atau dikenal dengan angka reproduksi Indonesia sudah dibawah satu. Dimana angka satu artinya penularan masih terjadi satu orang menularkan satu orang lain, namun jika di bawah satu maka artinya satu orang menularkan ke kurang dari satu orang.

Saat ini, angka reproduksi Covid-19 Indonesia ada di 0,78. Artinya, jika ada satu orang tertular, maka kemungki-

Sadikin, menyebutkan, langkah ini penting karena semua lonjakan kasus yang terjadi di seluruh dunia disebabkan bukan oleh pergerakan atau



Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dengan baik

mobilitas, tapi disebabkan terutama karena adanya varian baru. Sehingga varian-varian baru ini perlu diidentifikasi secara rutin dan diketahui pola penyebarannya seperti apa.

Tercatat pada akhir Desember 2020, Indonesia baru berhasil mengidentifikasi sekitar 140 varian baru yang

kaan oksigen di masyarakat.

Kemenkes menggandeng berbagai pihak untuk segera mengatasi kekurangan oksigen tersebut dengan mendatangkan oksigen dari luar negeri. Kemenkes juga membuat terobosan dengan meluncurkan layanan telemedisin bagi pasien yang positif COVID-19.

"Dalam jangka waktu satu tahun ada 500 ribuan orang yang membutuhkan obat-obatan bisa kita layani dengan telemedisin, langsung dikasih tele-resep dan dikirim obatnya," sebut Menkes.

Inovasi lainnya yang dilakukan Kemenkes selama pandemi adalah dengan menghadirkan aplikasi PeduliLindungi ketika pandemi Covid-19 yang antara lain dimanfaatkan untuk tracing dan surveilans masyarakat ketika diketahui ada warga yang positif. Saat ini, PeduliLindungi tercatat menjadi salah satu aplikasi kesehatan terbesar di dunia dan telah di download oleh sekitar 104 juta masyarakat Indonesia.***

DAERAH DIMINTA TETAP WASPADA

Pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berlaku di seluruh wilayah Indonesia pada Desember 2022. Meski dicabut, semua daerah juga diminta untuk tetap waspada karena kapanpun pandemi akan bisa kembali.

Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya, mengimbau masyarakat Sumatera Selatan untuk tidak lengah dan tetap waspada meski pemerintah sudah mencabut atau menghentikan PPKM.

"Aktivitas masyarakat silakan berjalan. Tapi ada ketentuan prokes yang tetap dijaga agar ekonomi kita bisa pulih. Dan sesuai arahan Menkes tadi masyarakat dituntut kesadarannya tetap menjaga prokes. Dan RS agar tetap bersinergi dengan mitra karena ini belum sepenuhnya hilang," tegas Mawardi usai mengikuti rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Secara terpisah, Penjabat Sekretaris Daerah Musi Banyuasin, Musni Wijaya, yang mengikuti Rakor juga menyambut keputusan ini. Mereka juga sepakat dengan keputusan pemerintah tersebut.

"Tidak bisa dipungkiri bahwasanya penyesuaian PPKM mampu menjaga pemulihan ekonomi namun kita harus tetap waspada dengan terus mendorong vaksinasi serta mengedepankan protokol kesehatan," kata Musni Wijaya.

Sementara, Luhut mengatakan setelah hampir tiga tahun sejak pandemi Covid-19, pemerintah memutuskan untuk menghentikan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Penghentian kebijakan



ini menurutnya dilakukan dengan berbagai pertimbangan diantaranya situasi pandemi Covid-19 yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat, kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik dan pemulihan ekonomi yang berjalan cepat.

Dia juga mengatakan meski kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat telah dihentikan, menurutnya masyarakat tetap harus waspada karena pandemi belum sepenuhnya berakhir. Monitoring terhadap kasus harus tetap dilaksanakan dan vaksinasi booster harus tetap didorong. Begitupun peran masyarakat terus didorong untuk tetap menjaga pen-
 erapan protokol kesehatan.

"Pemberian obat-obatan dan vitamin harus tetap tersedia di berbagai faskes selama masa transisi. Selain itu, pemberian bansos harus tetap diberikan untuk menjaga proses pemulihan ekonomi yang telah berjalan cepat," jelasnya.

Luhut mengatakan keberhasilan pengendalian Pandemi Covid-19 adalah buah dari kebijakan yang ter-

integrasi antara berbagai elemen. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, Tenaga Kesehatan, Akademisi, masyarakat dan pihak-pihak lain.

"Keberhasilan juga berasal dari kerja yang berbasiskan data, ilmu pengetahuan dan menggunakan teknologi. Keberhasilan ini sedianya harus ditiru dan diterapkan dalam kebijakan pembangunan yang lain," ujarnya.

Luhut juga mengatakan keberhasilan pengendalian Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan mampu mengatasi permasalahan paling kompleks sekalipun. Untuk itu, dia mengajak masyarakat Indonesia untuk bekerja keras mewujudkan Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera pasca pandemi Covid-19.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan agar pencabutan PPKM dapat dikomunikasikan kepada masyarakat secara seragam. Menurut Budi, pencabutan atau penghentian PPKM itu hanya program

dari keseluruhan strategi pemerintah dalam menghadapi transisi dari pandemi menjadi endemi.

"Hal yang penting kita sampaikan ke masyarakat dalam proses transisi ini adalah ini dipastikan dilakukan bertahap. Akan ada penurunan intervensi pemerintah dan juga kita harap ada peningkatan partisipasi masyarakat," jelasnya.

Ia mencontohkan di masa transisi ini peran masyarakat dalam menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga akan menjadi sangat penting. Seperti influenza, DBD meski sempat jadi pandemi besar ini akan menjadi ke level normal. Sehingga, masyarakat jangan terlalu euforia dan tetap menjaga proses.

"Jangan euforia dan tetap prokes. Rajin cuci tangan dan menggunakan masker. Kalau tidak enak badan tes dan jika positif bisa isolasi di rumah dan vaksin. Kita harap bertahap agar intervensi kepada masyarakat diturunkan sehingga transisi pandemi menuju endemi di Indonesia berjalan lancar," jelasnya. ●



KAWASAN KUMUH TERUS BERKURANG

Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, terus berupaya mengurangi berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyediaan air bersih dan mengurangi kawasan kumuh.

Masa kepemimpinan Wali Kota Palembang, Harnojoyo, yang berakhir 2023, masih ada beberapa pekerjaan rumah, yakni menuntaskan persoalan kekumuhan. Harnojoyo memiliki target yakni 100 persen air bersih,

Hal ini tentu menjadi tanggung Pemkot Palembang untuk menuntaskan rumah tidak layak agar tidak menjadi kawasan kumuh dengan kerja sama pihak Balai Perumahan, CSR, lembaga dan swasta, di mana pada 2022 masih tersisa 4.000-an unit rumah tidak layak

Palembang, Affan Prapanca Mahalli, mengatakan, program Bansos RTLH yang berjalan 2022 dari balai penyedia perumahan yang ditangani di Palembang ada 250 unit.

Bansos RTLH merupakan bantuan stimulan berupa uang untuk pembel-



0 persen zona kumuh, dan 100 persen sanitasi. Namun, hingga kini masih ada rumah-rumah yang tidak layak huni berpotensi terhadap permukiman kumuh.

huni (RTLH) yang masuk kawasan kumuh, namun jumlahnya terus berkurang.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota

ian bahan bangunan guna pemugaran rumah tidak layak huni dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat.

Pengentasan rumah tidak layak

huni ini sesuai dengan deliniasi Surat Keputusan (SK) kumuh yang sudah ditetapkan sebelumnya. Di Palembang, kawasan kumuh paling banyak di Seberang Ulu.

"Untuk luasan permukiman kumuh, data terakhir ada 1.092 hektare, namun itu sudah ada pengurangan," ujar Affan.

Kendati persentasenya besar, hal tersebut tidak dikategorikan dalam kumuh berat. "Namun, kami masih harus validasi lagi dengan stakeholder terkait untuk merumuskan nilainya karena tidak bisa dari perkiraan sendiri," kata Affan.

Dia menyebutkan, beberapa wilayah di Palembang yang dikategorikan kawasan kumuh, antara lain Kecamatan Kertapati, Kecamatan Seberang Ulu Satu, Kecamatan Seberang Ulu Dua, Kecamatan Kalidoni, Kecamatan Sematang Borang.

Affan menuturkan, suatu kawasan bisa disebut kawasan kumuh jika terlalu padat penduduk, serta infrastruktur bangunan ataupun jalan memang sama sekali tidak terawat.

"Bisa dibilang kawasan kumuh berat itu seperti padatnya penduduk, saluran drainasenya terlalu banyak sampah, sistem toiletnya, jalan yang rusak. Kemudian, tidak ada lampu penerangan, serta konstruksi bangunannya yang terlihat kumuh seperti tidak terawat," kata Affan.

Affan juga membeberkan, jika sekarang sudah ada dua kawasan yang tidak dikategorikan ke dalam kawasan kumuh berat lagi.

Seperti di kawasan 5 Ilir dan 29 Ilir, yang nantinya akan diserahkan dari Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sum-sel kepada Pemerintahan Kota Palembang. Kawasan lainnya yakni kawasan Lebak Cindo 26 Ilir, telah ada sekitar 50 titik rumah yang diperbaiki yang terdampak dari kawasan kumuh dan pembangunan Sungai Sekanak Lam-bidaro.

Affan menambahkan, pihaknya tahun ini terus berupaya mengurangi kawasan kumuh, berkolaborasi dengan semua pihak terkait lainnya.

Sebelumnya, Wali Kota kota Palembang, Harnojoyo, mengatakan, di akhir

masa jabatannya 2023, dia berupaya mengentaskan kawasan kumuh di ibu kota Sumatera Selatan.

Selain dari APBD, pihaknya akan berkolaborasi dengan CSR dari BUMN dan BUMD untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Hal ini untuk mewu-

sampah dari penjurur Palembang.

"Kami harap dengan penambahan ini dapat mengoptimalkan pengangkutan sampah di Kota Palembang," kata Mustain.

Terlebih, dengan adanya keputu-



judkan misi memenuhi target 100 persen air minum, 0 persen zona kumuh dan 100 persen sanitasi.

Sementara guna mengatasi keku-muhan sekaligus menjaga kebersihan Kota Palembang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) menambah armada pengangkut sampah sebanyak enam dump truck. Saat ini, DLHK memiliki sebanyak 121 unit dump truck yang untuk mengangkut

san pencabutan aturan PPKM, tentu event maupun kegiatan semakin banyak di Palembang. Dan itu berpotensi menambah volume sampah. Selama PPKM, produksi sampah di Palembang hanya sekitar 800 ton per hari yang diangkut ke TPA. Setelah PPKM dicabut, maka produksi sampah diprediksi meningkat hingga 900 ton per hari yang diangkut ke TPA Sukawinatan. • ***/rhd



OPTIMISTIK TARGET TERCAPAI LAGI

Pemerintah Kota Palembang menaikkan target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 2023 sebesar Rp1,2 triliun.

Kenaikan ini setelah melihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2022 yang dinilai memuaskan yang melebihi target sebesar Rp1,080 triliun. Bahkan, Wali Kota Palembang, Harnojojo, memproyeksikan target PAD secara keseluruhan di 2023 bisa mencapai Rp1,4 triliun.

"Untuk 11 jenis pajak ditentukan Rp1,2 triliun," ujar Harnojojo.

Sementara itu, target pajak 2022 naik dari sebelumnya Rp1,070 triliun menjadi Rp1,080 triliun setelah ada perubahan pada APBD-P.

"Capaian ini menjadi salah satu ac-

uan kita menaikkan target di 2023, selain ada faktor potensi pajak lainnya," kata Harnojojo.

Menurutnya, target Rp1,2 triliun untuk target 11 jenis pajak daerah ini akan berubah naik atau turun melihat situasi ekonomi secara umum di masyarakat pada APBD-P nantinya.

"Melihat situasi nantinya pada APBD-P, jika membaik maka target bisa naik seperti tahun ini."

Kenaikan pajak ini optimistik tercapai karena didukung beberapa potensi objek pajak yang besar seperti dari pajak hiburan dari target Rp180 miliar tercapai 101,42 persen atau Rp182 miliar

Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain (PLN) ditarget Rp235,5 miliar. Kemudian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dari target Rp264 miliar.

Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Herly Kurniawan mengatakan, target PAD dari 11 pajak daerah mencapai target lebih dari Rp1 triliun. Target itu naik untuk setiap item pajak yang dikelola BPPD. Mulai dari pajak hotel, hiburan, PBB hingga BPHTB. Target pajak hotel tahun ini sebesar Rp75 miliar naik Rp15 miliar dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp60 miliar.

Untuk pajak restoran Rp195 miliar

naik dari tahun lalu yang Rp180 miliar. Pajak hiburan Rp37,5 miliar naik dari sebelumnya yang Rp28,750 miliar. Selanjutnya pajak reklame Rp32 miliar naik tipis dari sebelumnya Rp30 miliar, pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri (Non) PLN masih kosong sedangkan tahun sebelumnya Rp6,950 miliar.

Pajak penerangan jalan sumber lain Rp250 miliar (2023) naik dari (2023) yang sebesar Rp235,5 miliar. Pajak parkir Rp30 miliar naik dari sebelumnya Rp24,5 miliar, pajak air tanah Rp57 juta tetap sama seperti tahun lalu. Begitupun dengan pajak sarang burung walet yang masih tetap di Rp180 juta. Pajak mineral bukan logam dan batuan juga tidak naik di Rp2 miliar.

Sedangkan, item pajak bumi dan bangunan dan BPHTB yang menjadi item pajak yang memiliki kontribusi tinggi mengalami kenaikan cukup signifikan.

"Target pajak PBB kita tahun ini sebesar Rp304 miliar naik dari tahun lalu yang sebesar Rp264 miliar, dan juga BPHTB yang Rp314 miliar dari sebelumnya Rp248, 4 miliar," jelas Herly.

Sementara salah satu upaya untuk meningkatkan PAD ini, Pemerintah Kota Palembang melalui Perumda Tirta Musi akan menaikkan tarif air minum. Kenaikan sempat tertunda selama satu tahun karena faktor ekonomi masyarakat dan dampak pandemi Covid-19. Rencananya, kenaikan tarif akan mulai dilakukan pada Maret 2023.

"Ya, dalam rancangan anggaran kami tarif sudah harus disesuaikan pada Maret 2023," jelas Dirut Perumda Tirta Musi Palembang, Andi Wijaya Adani.

Menurut Andi, kenaikan tarif ini sudah tidak bisa ditawarkan lagi karena, saat ini untuk biaya operasional sudah cukup tinggi.

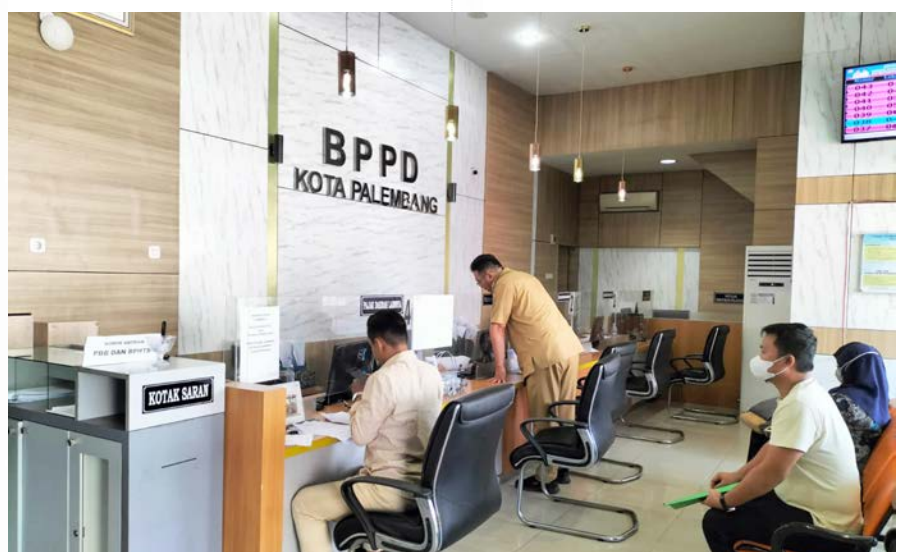
"Kami sudah 11 tahun tidak pernah melakukan penyesuaian tarif. Nah, tahun ini memang sudah harus dilakukan kenaikan," ujarnya.

Andi mengatakan, seharusnya penyesuaian tarif ini sudah dilakukan tahun lalu. Namun, karena dengan berbagai pertimbangan, akhirnya ditunda.

"Tahun lalu belum disetujui wali kota. Pertimbangannya, perekonomian masyarakat baru pemulihan pasca pandemi Covid-19. Setelah itu ada kenaikan BBM juga. Tapi tahun ini penyesuaian tarif harus dilakukan," ung-

kapnya.

Untuk besaran kenaikannya, belum ada perubahan. Untuk rumah tangga kenaikannya 15 persen dari tarif lama. Sementara untuk niaga seperti hotel, pabrik dan rumah makan kenaikannya 17,5 persen dari tarif lama. •***/rhd





Hari Ulang Tahun Ke-66 Kalimantan Timur WUJUDKAN VISI BERDAULAT MENUJU INDONESIA SEJAHTERA

Provinsi Kalimantan Timur genap berusia 66 tahun pada 9 Januari 2023. Dengan semakin matang usia, banyak kemajuan yang sudah dicapai Benua Etam. Namun, itu semua bukan alasan untuk berhenti membangun.

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-66 ini kemungkinan bakal menjadi yang terakhir bagi Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor. Sebab, tahun ini juga merupakan tahun terakhirnya menjabat sebagai orang nomor satu di provinsi paling timur di Pulau Kalimantan sejak dilantik pada 1 Oktober 2018.

"Ini perayaan ulang tahun provinsi yang terakhir yang saya hadiri sebagai gubernur. Saya hanya berusaha memperlambat, karena tidak mungkin memperpanjang jabatan. Selama masih ada

siswa waktu, masih ada kesempatan bagi saya untuk terus berbuat bagi Kalimantan Timur. Kalau bisa, berbuat juga untuk bangsa dan negara," ungkap Isran saat memberi sambutan pada puncak peringatan Hari Jadi ke-66 Provinsi Kaltim di Plenary Hall Gelora Kadrie Oening, Senin, 9 Januari 2023.

Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu mengatakan, di usianya yang ke-66, Kalimantan Timur telah diberi penghargaan luar biasa oleh pemerintah pusat, yakni menjadi lokasi Ibu Kota Negara (IKN)

Nusantara berdasarkan UU 3/2022 tentang IKN. Oleh karena itu, IKN Nusantara harus terus diperjuangkan agar benar-benar berhasil.

"Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita bersama mendukung dan menyukseskan pembangunannya. Saya bangga dan bahagia karena seluruh rakyat Kalimantan Timur menerima dan mendukung penuh rencana pemindahan IKN," ujarnya.

Mantan Bupati Kutai Timur itu berharap kepada semua pihak untuk tetap bersemangat dalam melaksanakan

program-program di berbagai bidang pembangunan dan pemerintahan. Selain itu, yang terpenting semua juga selalu menjaga kondusivitas daerah dengan menjaga persatuan dan kesatuan sebagai sebuah wilayah yang telah ditetapkan sebagai IKN.

Apalagi, IKN di Kaltim sudah memasuki beberapa tahapan pembangunan, maka menjadi kewajiban bersama untuk mendukung dan menyukseskannya dengan turut berpartisipasi, baik secara langsung maupun dengan moril. Jangan menjadi penonton dan setiap daerah harus aktif dan kreatif mengambil manfaat positif dari keberadaan IKN.

Isran berharap agar rakyat Kaltim terus bersemangat mewujudkan tema peringatan tahun ini, yakni Kaltim Berdaulat Menuju Indonesia Sejahtera. Oleh karena itu, semua harus bekerja maksimal dalam membangun Kaltim agar lebih maju dan sejahtera.

"Di usianya yang ke-66, Kaltim sudah mencapai banyak kemajuan dan prestasi, akan tetapi sesungguhnya di dalam dunia yang terus berputar dan zaman yang senantiasa berubah, maka tidak ada kata berhenti, tidak ada kata untuk tidak berbuat. Karena itu teruslah bergerak dan membuat perubahan. Menjadikan Kaltim semakin maju dan berdaulat, menuju Indonesia sejahtera," kata Isran.

Sepanjang 2022, Kaltim mampu bertahan di masa pandemi COVID-19 dan berhasil meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) 77,44 atau naik 0,56 poin dibanding IPM 2021 sebesar 76,88 atau berada di peringkat ketiga nasional.

Kaltim juga mampu menekan inflasi dan menaikkan pertumbuhan ekonomi hingga 3,11 persen. Meningkatkan ekspor dan investasi, serta menaikkan penghasilan pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor dan lain-lainnya, sehingga APBD 2023 mencapai angka fantastis Rp17 triliun. Dengan total APBD-P 2023 diprediksi bisa mencapai Rp20 triliun.

Isran menuturkan, APBD Kaltim pada prinsipnya untuk kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, utamanya dalam upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan derajat kesehatan dan masalah sosial,

sekaligus untuk mendukung terwujudnya visi RPJMD 2018-2023, yakni Berani Untuk Kaltim Berdaulat.

"Salah satu misinya berdaulat dalam peningkatan SDM, antara lain melalui pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) yang rata-rata lebih Rp150 miliar per tahun, dan pada 2022 ditambah

dua kali lipat atau lebih Rp300 miliar untuk kurang lebih seribu penerima," terang Isran.

Selain itu, APBD untuk mendukung visi Kaltim Berdaulat guna pembangunan infrastruktur kewilayahan, peningkatan perekonomian masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, dan



berdaulat dalam mewujudkan aparatur dan layanan pemerintahan yang baik dan bersih.

"Berbagai penghargaan yang diterima pastinya bukan untuk gubernur dan wakil gubernur, dan bukan pula merupakan tujuan utama, akan tetapi untuk seluruh rakyat Kaltim, dan kita jadikan sebagai pemicu semangat agar kita terus bekerja keras dan berkarya untuk kesejahteraan rakyat Kaltim," pesan Isran Noor.

Banyak Capaian Tapi Belum Puas

Isran Noor menegaskan, dalam kurun waktu empat tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, tentu sudah banyak keberhasilan dan

Kaltim, pria kelahiran Sangkulirang, Kutai Timur, 65 tahun silam itu, meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltim maupun seluruh bupati dan wali kota untuk terus melanjutkan program-program pembangunan yang belum maksimal.

Dia berharap, bersama seluruh pihak bisa bekerja sama untuk terus melanjutkan program-program pembangunan daerah agar terwujud masyarakat sejahtera serta mencapai visi dan misi Berani Untuk Kaltim Berdaulat.

"Kami berharap pemerintah maupun rakyat Kaltim dapat terus maju dalam berbagai bidang pembangunan, dan yang terpenting selalu menjaga ke-

Tidak pernah terjadi dalam sejarah, di mana pencapaian kontribusi selisih ekspor dan impor (surplus) Kaltim adalah yang terbaik di Indonesia," kata Isran pada Rapat Paripurna ke-2 DPRD Kaltim dalam rangka Peringatan HUT ke-66 Kaltim di Gedung B DPRD Kaltim, Kamis, 5 Januari 2023.

Isran mencontohkan, pada Oktober 2022, total ekspor Kaltim mencapai USD3,25 miliar atau setara Rp45,5 triliun. Sementara, total impor Kaltim hanya USD585 juta. Sehingga, terjadi surplus USD2,67 miliar atau sebesar Rp37,3 triliun. Sejarah pencapaian surplus tertinggi neraca perdagangan nasional ini menjadi bukti kuat kiprah Kaltim Berdaulat dalam kontribusi besarnya untuk NKRI.

"Jadi, Kaltim Berdaulat itu bukan Kaltim mau merdeka. Tetapi mandiri dalam kedaulatan daerah sebagai bagian dari NKRI, dan sebagai sesama anak bangsa," tegasnya.

Ekspor Kaltim pada 2022 tercatat sebesar USD27,7 miliar. Sementara, Jawa Barat sebesar USD32,2 miliar. Posisi ketiga tertinggi ekspor nonmigas adalah Jawa Timur dengan USD 19,8 miliar dan Riau dengan USD17,6 miliar.

Panji Keberhasilan Daerah

Dalam HUT ke-66 Kaltim tahun ini, Pemprov Kaltim memberikan panji keberhasilan pembangunan kepada pemerintah kabupaten/kota di Benua Etam. Penerima panji keberhasilan pembangunan itu terdiri dari Balikpapan 16 panji, Samarinda 10 panji, Kutai Kartanegara 8 panji, Bontang 8 panji, Paser 7 panji, Berau 5 panji, Kutai Timur 5 panji, Penajam Paser Utara 1 panji, Kutai Barat 1 panji, dan Mahakam Ulu 1 panji.

Secara khusus, Isran Noor, menyampaikan selamat dan apresiasinya kepada seluruh kabupaten dan kota yang telah memperoleh penghargaan panji-panji keberhasilan pembangunan tahun ini.

"Saya ucapkan selamat kepada Balikpapan peraih pertama, Samarinda kedua dan ketiga Kabupaten Kutai Kartanegara," ucapnya.

Bagi orang nomor satu Benua Etam ini, penghargaan panji-panji keberhasilan pembangunan yang rutin setiap ta-



prestasi yang dicapai di berbagai program pembangunan. Namun, hal itu tidak lantas harus berpuas diri, tetapi menjadi pemicu motivasi untuk terus bekerja dan berkarya dalam peningkatan kesejahteraan rakyat Benua Etam.

"Kami bersyukur di usianya yang ke-66 tahun, Provinsi Kaltim sudah mencapai banyak kemajuan dalam berbagai bidang pembangunan, namun belum maksimal. Termasuk visi dan misi Kaltim berdaulat, karena kalau kita sudah puas dengan capaian itu, berarti kita setop di situ. Jadi, kelima program visi Kaltim berani berdaulat saya merasa belum puas, walaupun sudah dicapai, tapi belum puas," tegas Isran Noor.

Terkait upaya dalam memaksimalkan kinerja menyukseskan berbagai program-program pembangunan di

damaian daerah dengan menjaga keharmonisan dan kedamaian, sehingga Kaltim tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.

Isran memaparkan kontribusi Kaltim terhadap neraca perdagangan nasional ternyata sangat besar. Bersama Jawa Barat, Kaltim menjadi penyangga defisit perdagangan nasional karena menjadi dua provinsi tertinggi dalam ekspor nonmigas Indonesia.

Memang, bila dilihat dari sisi jumlah ekspor, Kaltim masih berada sedikit di bawah Jawa Barat. Namun, dari sisi surplus, Kaltim jauh lebih baik dari Jawa Barat. Menurutnya, peran Kaltim dalam pengumpulan devisa bagi negara sungguh luar biasa.

"Tahun 2022, Kaltim mencapai puncak dalam cadangan devisa negara.

hun diberikan Pemprov Kaltim kepada kabupaten dan kota yang dinilai memiliki kinerja dan kemajuan dalam bidang pelayanan dan kinerja pemerintahan.

"Semoga penghargaan ini mampu memacu kita semua untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat," haranya.

Selain panji keberhasilan pembangunan, juga diserahkan penghargaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia kategori kabupaten/kota, di mana terbaik pertama diraih Kutai Timur, terbaik kedua diraih Berau, dan terbaik ketiga diraih Balikpapan.

Kemudian, penghargaan kepada Camat Berprestasi dari kabupaten dan kota yang diraih Camat Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Edi Gunawan; Camat Samarinda Kota, Samarinda, Anis Siswantini; dan Camat Anggana, Kutai Kartanegara, Rendra Abadi.

Penghargaan ASN dan Tokoh Daerah

Peringatan HUT ke-66 Kaltim juga dirangkai dengan penyerahan tanda penghargaan Satyalancana Karya Satya (SLKS) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Masa Pengabdian 10, 20 dan 30 Tahun yang diberikan di Pendopo Odah Etam, Jumat, 6 Januari 2023.

SLKS diberikan kepada sekitar 398 PNS, terdiri dari SLKS 30 tahun sebanyak 74 orang, SLKS 20 tahun sebanyak 64 orang, dan SLKS 10 tahun sebanyak 260 orang di lingkungan Pemprov Kaltim.

"Semoga penghargaan tertinggi dari Presiden bagi PNS yang sangat bernilai ini akan memacu dan membuat kita semua dapat melaksanakan tugas-tugas dan berkarya," kata Isran Noor.

Isran menyebut, SLKS merupakan sebuah penghargaan yang diberikan sesuai dengan karya bakti selama menjadi PNS, baik itu 30 tahun, 20 tahun maupun 10 tahun.

"Penerima 30 tahun maupun yang sudah pensiun. Teruslah berkarya sebelum pensiun. Bagi saudara-saudara penerima SLKS 20 dan 10 tahun harus tetap bekerja dengan baik, ikhlas, tidak usah memikirkan rezeki, karena rezeki itu pasti ada, karena itu semua sudah takdir. Takdir itu pasti, yang berbeda itu

hanya nasib. Besar kecilnya rezeki itu berbeda di nasibnya saja," ujar Isran.

SLKS tidak sekadar penghargaan, tetapi sebagai bukti bahwa aparatur siap bekerja dalam semangat kebersamaan dan bersinergi, khususnya di lingkungan Pemprov Kaltim. Di harapkan PNS mampu bekerja keras dan mengabdikan tanpa pamrih, penuh dedikasi, kreatif, inovatif, profesional, mampu bergerak cepat, serta tanggap dalam mengatasi setiap permasalahan.

"Sehingga setiap PNS dan ASN Kaltim pada umumnya akan semakin dipercaya masyarakat, dan dapat kita andalkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,"



tegasnya.

Selain ASN, sebanyak 23 orang yang terdiri dari tokoh berjasa hingga masyarakat berprestasi juga menerima penghargaan dari Pemprov Kalimantan Timur pada Rapat Paripurna DPRD Kaltim dengan agenda peringatan HUT ke-66 Kaltim di Gedung B DPRD Kaltim, Kamis, 5 Januari 2023.

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Isran Noor didampingi Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud, Wakil Ketua I Muhammad Samsun, Wakil Ketua II Seno Aji dan Wakil Ketua III Sigit Wibowo.

Ke-23 tokoh berjasa dan masyarakat berprestasi penerima penghargaan yaitu, KH Buchori Noor sebagai tokoh kerukunan umat beragama, KH Siswanto sebagai tokoh agama Islam,

Pdt Musa Lakay sebagai tokoh agama Kristen, Gaudentius Simon Devung sebagai tokoh agama Katolik, Tjan Hariyanto Chandra sebagai tokoh agama Budha, AA Gede Raka Ardita sebagai tokoh agama Hindu, dan Asan Rengeh sebagai tokoh agama Konghucu.

Selanjutnya, Abdussamad sebagai tokoh bidang sumber daya manusia, Prof Abdul Rachim sebagai tokoh pendidikan Kaltim, Rizal Effendi sebagai tokoh pers, Liu Jiu Tot sebagai tokoh seni budaya, Andi Burhanuddin Solong sebagai tokoh pemuda, Soekiranto sebagai tokoh Pramuka, Syawal Riyanto sebagai tokoh disabilitas, dan Padilah Mante Runa sebagai tokoh kesehatan.

Kemudian, Nor Baiti Isran Noor se-

bagai tokoh kesehatan masyarakat, Muhammad Jamil dan Sayidah Salma Alqiya sebagai tokoh pemuda berprestasi bidang seni baca Alquran, HM Jos Soetomo sebagai tokoh bidang pendidikan, Awang Dharma Bakti sebagai tokoh bidang keolahragaan, Rahmad Azazi Rhomantoro sebagai tokoh pemuda berprestasi bidang seni budaya, Misman sebagai pelopor bidang lingkungan hidup, dan Riswah Yuni sebagai pelopor pelaku usaha olahan hortikultura.

"Selamat atas penghargaan yang diterima, semoga semakin meningkatkan semangat dalam membangun Kalimantan Timur, sekaligus menginspirasi dan memotivasi masyarakat untuk bisa berkreasi dan berinovasi lebih baik lagi," ucap Isran Noor. ●

OPTIMALKAN PENDAPATAN DARI GILI TRAMENA

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk memfasilitasi dan memaksimalkan potensi di Gili Tramena, yakni Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air.

UPTD di bawah naungan Dinas Pariwisata NTB tersebut juga dibentuk sebagai respons terhadap status Gili Tramena yang masuk kawasan destinasi pariwisata strategis nasional sekaligus kawasan konservasi laut dan perairan nasional.

"Alhamdulillah kini kita punya UPT baru di bawah Dinas Pariwisata untuk memfasilitasi dan memaksimalkan potensi Gili yang selama ini kurang optimal penggelolaannya di bawah PT GTI," kata Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, di Mataram, Sabtu, 14 Januari

bertahun-tahun tanpa kejelasan, seperti ada negara di dalam negara," ujar Bang Zul, sapaan Zulkieflimansyah.

Bang Zul berpesan kepada Pimpinan UPTD yang baru agar menjaga keamanan dan ketenangan Gili Tramena, serta dapat mengayomi masyarakat setempat dan selalu menegakkan kebenaran.

"Nah, mumpung UPT dan Pengu-
rusnya masih segar, ayo terus kita jaga Gili kita ini dengan baik. Menteri Pertanian sudah langsung datang ke Gili menyerahkan HGB kepada masyarakat dan meminta kami dari

PT GTI untuk menghormati investor yakni PT GTI.

"Kedua, adendum nampaknya tidak populer dan masyarakat sudah putus asa dan merasa PT GTI sebaiknya diputus kontraknya dan tanah yang dikuasai GTI dikembalikan ke pemda," kata Bang Zul.

Ketiga, setelah mendengar masukan masyarakat, berdiskusi dengan berbagai pihak seperti Polri, Kejaksaan, TNI, BPN, Pemda KLU dan lain-lain sepakat memutuskan kontraktor. Serta meminta Satgas investasi untuk memberikan penilaian dan memutuskan apakah putus kontrak dengan PT GTI atau bagaimana?

Dengan proses yang sangat panjang dan hati-hati pemerintah pusat, kata Bang Zul, akhirnya memutuskan kontrak PT GTI dan 65 hektare lahan di Gili Trawangan sekarang berada dalam pengelolaan Pemprov NTB.

Dia mengakui, masih banyak permasalahan gili yang belum selesai, terutama aksi protes soal tanah. Pihak yang bersikeras menegaskan tanah itu bukan tanah pemerintah, tapi tanah milik masyarakat yang diambil paksa oleh negara di zaman orde baru.

"Kami juga sadar zaman dahulu karena kekuasaan negara sangat kuat dan cenderung represif bisa saja ada masyarakat yang tak terlindungi haknya," ungkapnya.

Orang nomor satu di NTB ini berpesan kepada tim untuk selalu ingat sebagai pelayan masyarakat dan terus berpihak pada masyarakat. Sebab jika ditelisik lebih dalam lagi, yang melakukan aksi ribut-ribut tidak semuanya tulus membela masyarakat.

"Ini yang ribut-ribut karena kepentingannya terusik dan terganggu, selama



2023.

Menurut Zulkieflimansyah, UPTD baru tersebut dipimpin oleh Mawardi, seorang doktor hukum yang pernah menjabat sebagai Ketua BEM Universitas Mataram pada masanya.

"Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan figur baru, persoalan sengkaret di Gili, terutama Gili Trawangan, bisa diurai sedikit demi sedikit setelah

pemda untuk bekerja sama dengan masyarakat untuk memaksimalkan pemanfaatan Gili ini," tuturnya.

Bang Zul menambahkan, atas masukan KPK dan DPRD, Pemprov NTB segera membentuk tim untuk mengurai berbagai permasalahan. Adapun beberapa langkah yang akan dilakukan, antara lain, pertama melakukan adendum terhadap perjanjian dengan

berpuluh-puluh tahun menikmati hasil di Gili sangat besar. Kami sudah serahkan penyelesaiannya ke aparat penegak hukum dan KPK sudah memerintahkan APH untuk menindak tegas," ujarnya.

Asisten III Sekretariat Daerah NTB, Wirawan Ahmad, menyebut, Pemprov NTB kembali menargetkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan aset di Gili Trawangan lebih dari Rp300 miliar pada 2023. Target tersebut diyakini dapat tercapai karena sudah dibentuk UPTD Pengelolaan Destinasi Wisata Gili Trawangan, Meno dan Air (Tramena).

"Sekarang sudah ada UPTD di Gili Trawangan yang khusus menangani Gili Tramena. Diharapkan mereka bisa memberikan pelayanan yang cepat, baik dalam hal kerja sama, pengawasan pemanfaatan sampai proses pembayaran," kata Wirawan di Mataram, Selasa, 24 Januari 2023.

Wirawan tak menyebutkan angka pasti target penerimaan PAD dari pengelolaan aset daerah seluas 75 hektare di Gili Trawangan. Tetapi, dia mengatakan targetnya lebih dari Rp300 miliar. Tahun lalu, Pemprov NTB menargetkan PAD dari pengelolaan aset Gili Trawangan sebesar Rp366 miliar. Namun sampai akhir 2022, hanya terealisasi sebesar Rp357 juta.

"Faktor yang membedakan antara tahun ini dan kemarin, sekarang sudah ada UPTD yang khusus menangani Gili Tramena. Sehingga proses koordinasi dengan masyarakat Gili Trawangan itu bisa berjalan secara intensif. Kita optimis mencapai target itu. Makanya ada strateginya," jelas Wirawan.

Mantan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) NTB ini menjelaskan, PAD dari pengelolaan aset Gili Trawangan masuk dalam komponen retribusi pemanfaatan kekayaan daerah. Selain aset Gili Trawangan, Pemprov NTB juga mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset lainnya untuk menambah PAD.

"Jadi, semua aset-aset yang masuk dalam kekayaan daerah, kami harus bisa optimal pemanfaatannya dan bisa memberikan kemanfaatan bagi pendapatan daerah," tegasnya.

Persoalan penyelesaian sengkarut

pengelolaan aset di Gili Trawangan mendapatkan atensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada awal September 2022, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, turun langsung ke Gili Trawangan.



Dia mengingatkan Pemprov NTB agar nilai sewa aset daerah seluas 75 hektare di Gili Trawangan harus sesuai harga pasar. Aset yang sebelumnya dikuasai PT Gili Trawangan Indah (GTI) itu akan dikerjasamakan dengan masyarakat dan pengusaha.

Sebelumnya, perjanjian kontrak produksi antara Pemprov NTB dengan

PT GTI Nomor 1 Tahun 1995 pada 12 April 1995 telah diakhiri pada 2021. Dengan dikerjasamakan dengan masyarakat dan pengusaha yang ada di sana, KPK berharap dapat meningkatkan pendapatan Pemprov NTB.

Gufon mengatakan, pihaknya membantu Pemprov NTB terkait dengan penyelesaian sengkarut aset daerah di Gili Trawangan dengan PT GTI. Setelah kontrak kerja sama dengan PT GTI diputus, selanjutnya aset itu akan dikerjasamakan dengan masyarakat dan pengusaha yang selama ini menempatnya secara ilegal. •



HUT Ke-355 Kota Samarinda & Ke-63 Pemkot Samarinda MENGENANG SEJARAH MEMBANGUN KOTA TEPIAN

Januari menjadi bulan suka cita bagi Kalimantan Timur yang kini berusia 66 tahun. Selain Kaltim, Kota Samarinda dan Pemerintah Kota Samarinda juga memperingati hari jadinya bulan ini pada 21 Januari 2023. Kota Samarinda tahun ini memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-355, sedangkan Pemerintah Kota Samarinda merayakan hari jadi ke-63.

Rangkaian tradisi peringatan HUT tersebut diawali dengan melakukan ziarah ke makam para pejuang yang telah berjasa dalam mempertahankan ibu kota Kaltim itu dari penjajah, Jumat, 20 Januari 2023. Rombongan yang dipimpin Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dan Wakil Wali Kota, Rusmadi Wongso, be-

serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menuju ke Taman Makam Pahlawan (TMP) untuk menziarahi makam wali kota sebelumnya.

Kemudian, pada pukul 10.30 WITA, rombongan melanjutkan ziarah ke makam Lamohang Daeng Mangkona di Jalan Abdul Rasyid, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Sebrang. Rom-

bongan yang berhenti sejauh 50 meter dari pintu masuk makam tokoh penting dalam cikal bakal pendirian Kota Samarinda itu disambut Pasukan Bugis Bessi Bangrangan atau Jokkaje dengan pakaian serba kuning. Setelah ritual penyambutan dengan diiringi musik adat Bugis, Wali Kota dan Wakil Wali Kota melakukan napak tilas dengan berjalan

menuju makan.

Rombongan kemudian menggelar doa bersama yang dilanjutkan dengan tabur bunga sebelum menyudahi prosesi ziarah dan melanjutkan rangkaian hari jadi Pemkot dan Kota Samarinda di Masjid Shiratal Mustaqiem.

"Kegiatan ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh pendahulu yakni wali kota-wali kota sebelumnya. Ini merupakan rangkaian dari acara HUT Kota Samarinda yakni ziarah, setelah di taman makan pahlawan menziarahi para mantan wali kota dan dilanjutkan menziarahi makam Lamohang Daeng Mangkona," kata Andi Harun.

Menurutnya, menziarahi makam orang-orang yang telah berjasa sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan generasi penerus yang mewarisi tradisi, semangat, inspirasi, tekad dan perjuangannya dalam membangun Kota Samarinda.

"Kemudian, kita yang hidup di zaman saat ini, baik sebagai pimpinan ataupun masyarakat untuk terus berkhidmat bagi kemajuan masyarakat, berkhidmat memajukan kesejahteraan, untuk terus berkhidmat bagi lestari, harmoni berkelanjutan perjuangan menuju era pembangunan Kota Samarinda," ujarnya.

Upacara peringatan HUT ke-355 Kota Samarinda dan HUT ke-63 Pemkot Samarinda digelar di Halaman GOR Segiri Samarinda, Sabtu, 21 Januari 2023. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, bertindak sebagai pembina upacara.

Upacara tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi; Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Hero Mardanus; pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Samarinda; serta Ketua DPRD Samarinda, Sugiyono, beserta unsur pimpinan dan anggota DPRD Samarinda.

Selain itu, upacara kali ini juga dihadiri Wali Kota Samarinda terdahulu, Syahrie Jaang beserta istri mantan wali kota terdahulu.

Upacara dirangkai dengan penyerahan piagam-piagam penghargaan dan panji-panji keberhasilan pembangunan dari Andi Harun kepada OPD.

Pada kesempatan itu, Andi Harun mengemukakan perjalanan 355 tahun Kota Samarinda bukanlah perjalanan

yang sebentar. Sehingga, penting bagi pemimpin dan rakyatnya mengenang sejarah, mengikuti napak tilas perjalanan sejarah sejak berdirinya, hingga pembangunan Kota Tepian.

"Hal yang patut kita syukuri bersama adalah bahwa pengembangan dan pembangunan di Kota Samarinda dari masa ke masa terus mengalami kemajuan. Berbagai capaian dalam penghargaan yang diraih kiranya cukup untuk menggambarkan seberapa besar



potensi dan kondisi daerah," ujar Andi Harun.

Andi Harun juga membacakan beberapa capaian Pemerintah Kota Samarinda di masa kepemimpinannya yang akan memasuki tahun kedua.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, capaian tersebut akibat dari kerja keras seluruh ASN dibantu oleh TNI/Polri yang bahu membahu membangun Samarinda. Capaian-capaian yang disebutkan oleh orang nomor satu di Kota Tepian itu yakni:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk laporan keuangan Pemerintah Kota Samarinda.

2. Penghargaan Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Penghargaan Unit Kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Penilaian Monitoring Capaian Kinerja Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Perizinan dan Penilaian Kinerja Kementerian Investasi/BKPM yang diraih oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.

3. Anugerah Parahita Ekapraya dan Kota Layak Anak Tingkat Nasional yang diraih oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

4. Pemecahan Rekor MURI Senam Prolanis oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

5. Penghargaan dari Citi Asia pada 5th Indonesia Smart Nation Award 2022 for Thematic City yang diraih oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sama-

rinda.

6. Penghargaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang diraih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.

7. Camat Samarinda Kota Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka peringatan HUT Kalimantan Timur ke-66.

8. Penghargaan Juara 1 pada Penyelenggaraan Pameran Terpadu INVESDA EXPO, Penghargaan Pembina UMKM dalam Gebyar Lelang UMKM Oleh Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, dan Penghargaan sebagai Mitra Kerja dalam Pencegahan dan Pelanggaran Kekayaan Intelektual oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diraih oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda.

9. Penghargaan Kepada TP PKK Kecamatan Loa Janan Ilir atas Juara III Lomba Vlog Pencatatan Pernikahan Tingkat Nasional.

10. Daerah Berkomitmen Kategori

Penetapan LP2B dengan Dana APBD oleh Menteri Pertanian yang diberikan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda.

11. Serta banyaknya penghargaan di Tingkat Nasional yang juga ditorehkan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda.

Andi Harun menyebut pencapaian kerja Pemkot Samarinda merupakan hadiah nyata untuk masyarakat. "Pemerintah hari ini menjadikan pengendalian banjir sebagai super prioritas. Kemudian, penataan kota jadi kota bersih dan nyaman, serta melakukan peningkatan

iatan susur Sungai Karang Asam Besar (SKAB) bersama Kepala Bidang SDA Dinas PUPR PERA Kaltim, Runandar, serta Kepala Dinas PUPR Kota Samarinda, Desy Damayanti, serta lurah dan camat setempat, Kamis, 19 Januari 2023.

Susur sungai dimulai dari titik Jalan Taqwa Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang hingga berakhir di Pos Polisi jalan Slamet Riyadi Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang.

Andi Harun menyampaikan, pihaknya kini bersama Pemprov Kaltim yang diwakili Dinas PUPR PERA Kaltim,

di sana ada beberapa jembatan yang masih kayu," ucapnya.

Selain itu, Andi Harun menyampaikan, upaya normalisasi SKAB merupakan proyek yang akan dilakukan sepanjang 1,6 kilometer.

"Dari sungai sudah lancar, sampah juga sudah bersih. Kalau tahun ini lancar, sepanjang jalur ini tadi yaitu sepanjang 1,6 km akan dilakukan normalisasi. Tapi masih ada temuan sampah plastik ini berplastik-plastik di sungai," terangnya.

Dia pun menyampaikan bahwa ada jalur yang berdasarkan pantauan menjadi jalur normalisasi yang akan memiliki perhatian ekstra.

Namun, orang nomor satu di Kota Samarinda itu mengingatkan bahwa perlu peran seluruh lapisan masyarakat untuk dapat terlibat, serta mendukung program pengendalian banjir yang di dorong oleh pemerintah agar hasil dari program ini dapat dirasakan seluruhnya.

"Pengendalian banjir ini memiliki dampak yang sangat terlihat, titik yang kita intervensi ini sangat efektif. Mari kita lihat ini sebagai kebutuhan bersama agar hasilnya bisa kita rasakan bersama juga," ujarnya.

Selain pengendalian banjir, beberapa program penataan kota juga dilakukan, mulai dari menata beberapa titik parkir yang selama ini mengganggu kepentingan lalu lintas. Seperti di Pasar Pagi, Pasar Segiri, Pasar Sungai Dama. Pemkot juga telah menghapus TPS di jalan protokol Kota Samarinda, bahkan bak TPS akan diganti dengan bak kontainer tertutup.

"Kemudian kami juga melakukan gotong royong, mulai dari tingkat kota, kecamatan dan kelurahan sampai tingkat RT. Dua jenis gotong royong yang kami gerakan bersama, gerakan gotong royong sedimen, begitu pula gotong royong di bidang kebersihan," ungkapnya.

Andi Harun juga mengaku bahwa kini Pemkot Samarinda telah berhasil mengendalikan inflasi sesuai mandatori yang diberikan pemerintah pusat. Seperti pengendalian inflasi melalui stabilisasi harga, memastikan ketersediaan stok cukup, melakukan penanganan dan menjaga inflasi dari segala efek.

Andi Harun juga memprediksi jika pada 2023, keadaan ekonomi Kota Samarinda akan mengalami tahun ujian yang cukup seru. Sebab, perang Rusia-



infrastruktur, baik jalan jembatan dan lainnya, serta terus berkomitmen untuk melakukan peningkatan dan pembangunan ekonomi," ucap Andi Harun.

Andi Harun juga mengungkapkan beberapa capaian Pemkot untuk masyarakat Samarinda. Seperti program pengendalian banjir di kawasan simpang tiga Alaya, Jalan DI Pandjaitan, Jalan PM Noor, simpang empat Lembuswana, Bengkuring dan beberapa titik lainnya. Intervensi tersebut membuahkan hasil yang efektif.

Andi Harun sempat melakukan keg-

melakukan susur sungai untuk melihat situasi lapangan untuk melakukan normalisasi SKAB dalam program pengendalian banjir Kota Samarinda di 2023.

Andi Harun mengatakan, normalisasi jalur SKAB segmen Jalan M Said sebelumnya telah dilakukan. Kini, hasilnya sangat terlihat baik bahwa jalur sungai sudah luwes dibandingkan situasi sebelumnya.

"Dari Jalan M Said sudah dilaksanakan kegiatan sebelumnya, sudah lancar dan lebar. Sampai jembatan rapak indah, itu sudah bagus tidak ada hambatan. Tapi

Ukraina masih berlangsung dan masih adanya efek dari pandemi COVID-19.

Walaupun ada ujian ekonomi yang akan dihadapi oleh masyarakat, Andi Harun tetap mengimbau kepada masyarakat untuk terus mementingkan kebersamaan dan kesatuan.

"Kita terus memastikan bahwa keberagaman kita, kemajemukan kita, toleransi, kemudian antar umat beragama, bersaudara antar suku bangsa semua bentuk identitas. Kita harus kalahkan mendahulukan kepentingan kebersamaan kesatuan dan masyarakat bisa hidup damai dan nyaman," ujarnya.

Penghargaan Untuk Kopka Azmiadi

Pada momen HUT ke-355 Kota Samarinda dan HUT ke-63 Pemkot Samarinda, Andi Harun memberikan hadiah kepada Babinsa Koramil 02/Sungai Pinang, Kodim 0901/Samarinda, Koprak Kepala (Kopka) Azmiadi berupa satu unit sepeda motor dan uang tunai Rp10 juta.

Pemberian hadiah tersebut sebagai bentuk apresiasi Pemkot Samarinda atas kerelaan hati dari Kopka Azmiadi yang bersedia menggadaikan motornya untuk membayar alat berat saat terjadi kemacetan panjang di kawasan Gunung Mangga, Jalan Otto Iskandar, Rabu, 18 Januari 2023.

Saat itu, prajurit TNI tersebut rela menggadaikan motornya Rp10 juta untuk menyewa alat berat yang digunakan untuk mengevakuasi trailer yang melintang di tengah jalan.

Sebelum trailer tersebut dievaluasi, di kawasan tersebut saat itu terjadi kemacetan panjang kendaraan selama 16 jam. Situasi tersebut yang membuat Kopka Azmiadi spontan menggadaikan sepeda motornya untuk mengevakuasi trailer yang sedang mogok di tengah jalan.

Terkait hal tersebut, Andi Harun merasa terharu dan memberikannya hadiah sebagai wujud apresiasi atas kerelaan hati dari Kopka Azmiadi tersebut.

"Karena beliau sudah sangat ikhlas menjaminkan motor satu-satunya yang dia miliki agar masyarakat bisa kembali normal menggunakan jalan yang terhalang selama 16 jam tersebut," ucap Andi Harun.

Selain mendapat penghargaan dari Pemkot Samarinda, Kopka Azmiadi juga telah menerima penghargaan dari insti-

tusinya yang diserahkan langsung oleh Dandim 0901/Samarinda, Kolonel Arm Novi Herdian, yang dilaksanakan pada Kamis, 19 Januari 2023.

Terowongan Sungai Dama

Sehari jelang HUT ke-355 Kota Samarinda dan HUT ke-63 Pemkot Samarinda, Wali Kota Samarinda Andi Harun

Otto Iskandardinata. Dirinya meminta doa dan dukungan warga agar pembangunan selesai tepat waktu.

"Targetnya sekitar 18-22 bulan selesai dan difungsikan," ucapnya.

Dia melanjutkan, pembangunan terowongan sudah digagas sejak dirinya menjabat wali kota pada Februari 2021.

"Tidak baik suatu daerah yang hanya



dan Wakil Wali Kota Rusmadi melakukan peletakan batu pertama (ground-breaking) pembangunan terowongan di Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Jumat, 20 Januari 2023. Keduanya memasang patok serta mengecor sebagai tanda dimulainya megaprojek senilai Rp395 miliar yang ditarget rampung pada 2024.

Andi Harun mengatakan, peletakan batu pertama menjadi bukti pembangunan terowongan sebagai upaya mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di Jalan

punya satu akses jalan. Apalagi di Gunung Mangga (Otista) kerap terjadi kecelakaan kendaraan yang menyebabkan akses lumpuh," ucapnya.

Dia menerangkan, sebelum memutuskan pembangunan terowongan, beberapa opsi juga pernah dikaji. Di antaranya pelebaran Jalan Otto Iskandardinata hingga pembangunan jalan layang atau flyover. Namun, biayanya membengkak hingga Rp700 miliar. Belum lagi potensi masalah sosial yang tinggi terkait harga tanah yang akan dibebaskan. •



MENDAG PASTIKAN BULOG SERAP HASIL PANEN PETANI

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mendapat julukan tukang impor karena seringnya mendatangkan komoditas pangan dari negara lain, seperti beras, gula hingga kedelai. Bagaimana tanggapannya?

Zulhas menjelaskan, kebijakan impor komoditas pangan karena di dalam negeri tidak mencukupi. Pihaknya hanya menjadi pelaksana realisasi impor beberapa komoditas, kebijakan impor tersebut berasal dari usulan kementerian/lembaga terkait bukan Kemendag.

Dia memberikan contoh, gula yang saat ini produksinya kurang dibandingkan kebutuhan konsumsi dan khususnya industri.

"Kata siapa surplus, yang ngomong mana? Kalau surplus ngapain kita impor. Gula itu produksinya kira-kira sekian kurangnya 1 juta ton, itu untuk dimakan, gula yang diproduksi untuk industri kita enggak punya. Berapa perlunya? 5 ton," jelas Zulhas.

Pengajuan impor saat ini diimplementasikan lewat neraca komoditas. Sementara neraca komoditas disusun dan ditetapkan dalam siklus satu tahun. Pengajuan permohonan usulan kebutuhan pelaku usaha dimulai sejak awal tahun hingga September.

Pada akhir Oktober, pemerintah melalui kementerian terkait melakukan penetapan rencana kebutuhan komoditas. Neraca komoditas bertujuan untuk menyederhanakan perizinan ekspor-impor serta menjadi dasar penerbitan persetujuan ekspor dan persetujuan impor.

Sebelumnya, Kemendag mulai mengizinkan impor beras pada Desember 2022 sebanyak 500.000 ton. Pelaksanaan impor tersebut dilakukan oleh Bulog sampai Februari 2023. Sedangkan un-

tuk gula, pemerintah memutuskan akan mengimpor 4.641.000 ton tahun ini.

Volume impor ini terdiri atas 991.000 ton gula kristal putih (GKP) untuk konsumsi, gula kristal rafinasi (GKR) untuk industri makanan dan minuman sebanyak 3,6 juta ton serta 50.000 ton lagi gula untuk kebutuhan khusus.

Impor Beras Berakhir 16 Februari 2023

Zulhas telah memastikan impor beras dalam rangka pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) akan berakhir pada pertengahan Februari 2023.

"Bulog mengatakan 16 Februari terakhir," tambahnya.

Setelah 16 Februari, beras-beras hasil impor itu segera dikirim ke daerah-daerah untuk dilakukan operasi

pasar. Memasuki pertengahan Februari hingga Maret 2023, dia meminta Bulog mengambil beras dari petani-petani Indonesia. Februari akhir sampai Maret panen raya, jadi Bulog nanti akan membeli dari petani dengan harga yang bagus.

"Kami menghimbau masyarakat tidak perlu khawatir karena Bulog menjamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau walau di pasaran ada kenaikan harga," tegasnya.

Zulhas beralasan, periode masuknya beras impor ke Indonesia harus dibatasi sebelum musim panen raya tiba. Apabila beras impor tetap dibiarkan masuk saat panen raya, maka akan merusak harga beras lokal di pasaran.

Dia juga menyebut harga beras jenis medium masih cukup stabil. Menurut pantauan, harga beras jenis medium tertinggi ada di Papua yakni Rp10.200 per kilogram, sedangkan daerah lain masih sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp9.450 per kg.

Zulhas memastikan tingginya harga beras yang dikeluhkan masyarakat hanyalah beras premium. Hal itu dikarenakan beras tersebut dikelola oleh swasta yang telah memiliki brand, sementara beras medium masih normal.

"Sama seperti minyak goreng yang brand. Ya namanya brand kan itu ada yang mahal, ada yang mahal sekali," jelasnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan untuk beras premium memang memiliki harga yang variatif mulai dari Rp11-13 ribu per kg.

Sebelumnya, Perum Bulog sempat disentil oleh Presiden Joko Widodo terkait kenaikan harga beras yang terjadi di 79 wilayah.

"Hati-hati dengan kenaikan beras, dua hari lalu saya memperingatkan Bulog untuk masalah ini," kata Presiden Jokowi.

Cadangan Beras Cukup Hingga Lebaran

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, mengatakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ada lebih dari 600 ribu ton. Jumlah ini cukup hingga puasa dan lebaran.

"Stok sekarang lebih dari 600 ribu ton, cukup untuk puasa dan lebaran," katanya di Gedung Bulog, Jakarta, Jumat, 20 Januari 2023.

Buwas menyatakan pihaknya siap menyerap hasil panen petani hingga 2,3 juta ton sesuai dengan target yang diusulkan Badan Pangan Nasional (Bapanas), yang nantinya akan dimasukkan dalam CBP. Bahkan, anggaran yang disediakan pun telah mencukupi.

fisit beras yang tak bisa dipastikan oleh Bulog. Buwas mengatakan hanya akan menunggu penugasan berdasarkan neraca komoditas yang ditetapkan pemerintah melalui Bapanas.

Meskipun demikian, Buwas menyatakan siap apabila pemerintah telah



"Anggaran cukup, kita berapapun cukup, karena kita kan didukung oleh dana pinjaman dari Bank (Himbara). Bank itu disiapkan berapapun, dia siap," ucapnya.

Namun, Bulog masih menunggu surat keputusan dari Bapanas. Terlebih beras yang diserap harus sesuai dengan pedoman Bulog, antara lain kadar air sebesar 14 persen.

Indonesia berpotensi mengalami de-

resmi menargetkan penyerapan beras sebesar 2,4 juta ton. Terlebih kapasitas gudang Bulog mencapai semua sentra produksi nanti 3,6 ton.

"Jadi, kalau hanya 2,4 juta ton, itu belum apa-apa," tambahnya.

Bulog berencana menyerap beras dari sentra produksi di Makassar, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Lampung dan beberapa wilayah produksi di Pulau Jawa. ●

TARGET PEMERATAAN PEMBANGUNAN 4 PROVINSI BARU PAPUA

Indonesia kini resmi memiliki 38 provinsi setelah meresmikan empat provinsi baru di tanah Papua. Pengesahan RUU menjadi UU empat provinsi itu dilakukan DPR yang ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, langsung menunjuk Penjabat Gubernur untuk memimpin masing-masing wilayah. Mereka yakni Penjabat Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo; Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk; Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo; serta Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa'ad.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemekaran Papua dapat menjadi 'game change' percepatan kesejahteraan di Bumi Cenderawasih. Dengan bertambahnya jumlah

provinsi di Papua, maka pelayanan ke masyarakat akan lebih masif. Hal itu menjadi kunci dalam percepatan pembangunan Papua.

Pulau Papua yang luasnya lebih dari 400.000 kilometer persegi terlalu besar jika hanya memiliki dua provinsi, yakni Papua dan Papua Barat, sehingga perlu dilakukan pemekaran wilayah agar masyarakat lebih sejahtera, karena pengaturannya lebih mudah.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan pemerataan pembangunan menjadi faktor utama dibentuknya daerah pemekaran di ujung timur Indonesia. Wilayah Papua memiliki luas hampir 3-4 kali Pulau Jawa dengan jumlah

penduduk sekitar 5 juta jiwa.

Agar lebih merata, pembangunan di Papua memang perlu ditingkatkan. Tidak hanya kota besar seperti Jayapura atau Merauke yang mendapatkan infrastruktur bagus. Namun juga wilayah lain seperti Nabire, Yahukimo, dan sebagainya.

Pembentukan provinsi baru di Papua ini juga dilakukan atas aspirasi yang sudah cukup lama yang telah mencapai lebih kurang 324 aspirasi disampaikan oleh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat Papua. Sehingga pemetaan ini harus dipandang positif untuk pembangunan Papua menjadi lebih baik.



Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo



Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo



Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad



Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk

Harus Saling Merangkul

Dari empat Penjabat Gubernur di Papua, tiga di antaranya berasal dari kalangan sipil yang merupakan putra-putri asli Papua. Ketiganya dilantik setelah lolos seleksi oleh Tim Penilai Akhir (TPA). Pelantikan dilakukan berdasarkan Keppres 115/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur.

Penjabat Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, sebelumnya merupakan Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan yang lahir di Agats, 24 April 1975.

Kemudian, Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, merupakan Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama Internasional Kejaksaan, yang lahir di Merauke, 13 Maret 1964.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, merupakan Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik yang lahir di Piramid, 10 Januari 1971. Selanjutnya, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa'ad, sebelumnya menjabat Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekprov Papua.

Setelah dilantik keempat Penjabat Gubernur tersebut, Tito meminta mereka agar bisa merangkul semua pihak. Menurutnya, hal ini dibutuhkan untuk membangun stabilitas politik dan keamanan di daerah tersebut.

"Percuma jika semua sumber daya alam, anggaran yang cukup besar tanpa disertai dengan situasi yang tidak aman. Jadi, harus dirangkul semua pihak agar tercipta stabilitas politik keamanan yang baik di Papua. Semua akan bisa berjalan kalau situasinya aman, politiknya stabil, semua pihak dirangkul, baru bekerja bersama-sama," pesan Tito.

Tito menerangkan para Penjabat Gubernur terpilih merupakan orang yang memiliki pengalaman, pendidikan, dan kapabilitas yang mumpuni untuk membawa perubahan di Papua. Untuk itu, ia berharap para pemimpin tersebut dapat bekerja maksimal menjalankan pemerintahan di DOB Papua.

"Kita dukung langkah-langkah yang akan dikerjakan oleh para penjabat sambil kita awasi, dan kita betul-betul

berharap kita dengan kebersamaan pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten termasuk Papua induk tetap bekerja dengan kabupaten/kota yang ada. Tentunya lebih ringan kerjanya," ungkap Tito.

Siap Gelar Pemilu

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perppu 1/2022 tentang Perubahan atas UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Perppu itu diatur pembentukan KPU Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat daya. Aturan itu termaklud dalam Pasal 10A. Selain itu, juga dibentuk Bawaslu di keempat provinsi pemekaran tersebut.

Tito menerangkan pemerintah lebih memilih untuk menerbitkan Perppu

dibandingkan harus merevisi UU Pemilu. Sebab, revisi UU Pemilu membutuhkan proses panjang.

"Kalau revisi panjang sekali prosesnya. Kalau perppu cukup terhadap pasal itu saja. Dari 575 menjadi misalnya, berapa ya. Misalnya, angkanya 1 poin, itu UU harus dirombak melalui perppu," terang Tito.

Ia menjabarkan dalam UU Pemilu disebutkan total anggota DPR jumlahnya 575. Dengan ditambahnya tiga DOB Papua, berarti otomatis jumlah anggota dewan akan bertambah, termasuk anggota DPD.

"Bertambahnya anggota DPD juga akibat adanya provinsi baru ini, harus direvisi UU itu, diubah UU Pemilu. Hanya dua cara, melalui revisi atau perppu," ujar Tito. ●



Mendagri Tito Karnavian

Wilayah 4 provinsi baru Papua, yakni

- | | |
|---|---|
| 1. Papua Selatan <ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Merauke - Kabupaten Boven Digoel - Kabupaten Mappi - Kabupaten Asmat | <ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Jayawijaya - Kabupaten Pegunungan Bintang - Kabupaten Yahukimo - Kabupaten Tolikara - Kabupaten Mamberamo Tengah |
| 2. Papua Tengah <ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Nabire - Kabupaten Puncak Jaya - Kabupaten Paniai - Kabupaten Mimika - Kabupaten Puncak - Kabupaten Dogiyai - Kabupaten Intan Jaya - Kabupaten Deiyai | <ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Yalimo - Kabupaten Lanny Jaya - Kabupaten Nduga |
| 3. Papua Pegunungan | 4. Papua Barat Daya <ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Sorong - Kabupaten Sorong Selatan - Kabupaten Raja Ampat - Kabupaten Tambrauw - Kabupaten Maybrat - Kota Sorong |



KASUS RUDAPAKSA LIBATKAN 4 LEMBAGA NEGARA

Kasus rudapaksa atau pelecehan seksual yang dilakukan empat pegawai di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM menyeret empat lembaga negara. Kasus ini kemudian ditangani langsung Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Peristiwa rudapaksa yang terjadi pada 6 Desember 2019 itu sebenarnya kasus kriminal murni yang dilakukan oknum empat pegawai Kemenkop UKM terhadap pegawai honorer. Korban lalu melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Bogor.

Namun, kasus ini kemudian menjadi rumit dan berbelit-belit karena banyak pihak yang ikut campur dan intervensi, hingga membuat korban bukannya mendapat keadilan hukum tapi malah semakin menderita. Sementara para pelakunya bebas berkeliaran.

Setidaknya ada empat lembaga negara yang dibuat repot kasus ini, yakni Kemenko Polhukam, Polri, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kejaksaan Agung.

Para pelaku yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai honorer bisa menghirup udara bebas setelah kasus mereka dinyatakan sele-

sai dengan dikeluarkannya surat penghentian penyidikan perkara (SP3) dari Polresta Bogor.

Para terduga pelaku pemerkosaan yaitu berinisial ZPA, WH, MF, serta NN ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan pada 20 Januari 2020, atau sebulan setelah korban melaporkan kasusnya ke Polres Bogor Kota.

Namun proses penyelesaiannya terasa janggal karena pada 13 Maret 2020, korban dan pelaku ZPA malah dinikahkan. Namun, korban digugat cerai pelaku setelah kasusnya dianggap selesai.

Polisi menyetop kasus itu lewat penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor S.PPP/813.b/III/RES.1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020 dengan beberapa penyelesaian yang dianggap merugikan korban.

Kasus ini dianggap selesai lewat Restorative Justice yang selama ini dikampanyekan Kejaksaan. Namun



anehnya, alasan yang disampaikan Polresta Bogor itu berbeda statusnya untuk keluarga korban.

Kasus rudapaksa ini dihentikan Polri karena tidak cukup bukti. Kasus ini kemudian naik ke permukaan setelah ramai dibicarakan di media sosial. Selain itu, perhatian terhadap korban ND terabaikan hingga akhirnya mengusik Menko Polhukam, Mahfud MD.

Pemerintah kemudian mengadakan rapat yang terdiri atas Bareskrim Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Kemenko Polhukam pada 21 November 2022 dan hasilnya menolak SP3 kasus tersebut. Selain itu, juga meminta Polresta Bogor untuk membuka kembali kasus ini sesuai dengan laporan korban sebelumnya.

Sementara dari Kementerian Koperasi dan UKM juga memberikan sanksi tegas terhadap para pelakunya. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, memecat dua PNS yang dinyatakan sebagai pelaku. Keputusan ini merupakan hasil penelusuran tim independen.

"Setelah melalui suatu proses koordinasi dengan BKN, Kemen PPPA, KASN, dan juga hasil penelusuran Tim

Independen, kami putuskan memberikan sanksi disiplin berupa pemecatan kepada pelaku kekerasan seksual kepada dua PNS atas nama ZPA dan WH," ujar Teten dalam konferensi pers di kantor Kemenkop UKM.



Setidaknya ada empat lembaga negara yang dibuat repot kasus ini, yakni Kemenko Polhukam, Polri, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kejaksaan Agung.

Untuk MF yang berstatus pegawai honorer juga dipecat. NN yang merupakan pegawai lepas juga mendapat sanksi yang sama. Namun mereka tidak ditahan karena kasusnya dihentikan.

Ternyata para pelaku rudapaksa ini mengajukan gugatan praperadilan dan berhasil membuat status tersangka yang semula melekat di tiga orang di kasus pemerkosaan di Kemenkop UKM menjadi gugur. Para pemohon adalah Zaka Pringga Arbi, Wahid Hasyim, dan Muhammad Fiqar.

Para pemohon ini menggugat Kapres Bogor Kota. Berdasarkan putusan terhadap perkara bernomor 5/Pid.Pra.2022/PN Bgr itu dibacakan hakim tunggal Arie Hazairin di PN Bogor pada Kamis 12 Januari 2023. Hakim menyatakan SP3 pada Maret 2020 sah, sementara surat penyidikan pada 1 Januari 2020 dinyatakan tidak sah. Dengan demikian, para pemohon yang mengajukan praperadilan ini perkaranya tidak bisa dilanjutkan.

Kejanggalan Kasus Terungkap

Menko Polhukam, Mahfud MD, menghormati putusan hakim atas gugatan praperadilan empat tersangka bahwa SP3 yang pernah dicabut untuk mereka dinyatakan sah oleh hakim. Sehingga pencabutan SP3 yang dilakukan Polres Bogor tidak sah dan yang sah adalah pengeluaran SP3.

Namun, berdasarkan hasil rapat

koordinasi yang mereka lakukan memutuskan akan terus mendorong kasus ini diproses kembali sesuai laporan korban.

"Kami paham bahwa praperadilan belum memutuskan pokok perkara, belum memutuskan substansi perkara. Sehingga jika proses ini dilanjutkan kembali, maka tidak dapat dikatakan Ne Bis In

resta Bogor yang menangani perkara ini. Sebab, sejak awal tidak profesional dan ada kejanggalan.

Kejanggalan yang diungkap Menko Polhukam Mahfud MD itu, yakni Polresta Bogor telah mengeluarkan SP3 dengan surat yang berbeda ke alamat berbeda dengan alasan yang berbeda pula. Surat pemberitahuan kepada



Idem karena memang pokok perkara-nya belum pernah disidangkan," ungkap Mahfud.

Selain akan terus melanjutkan kasus ini, tim di rakor juga meminta Divisi Pro-pam Polri untuk melakukan pemeriksaan kepada petugas penyidik Pol-

jaksa bahwa pengeluaran SP3 dengan alasan restorative justice. Sementara kepada korban, SP3 dikeluarkan karena tidak cukup bukti.

"Harus diketahui bahwa menurut Peraturan Kapolri 6/2019 di Pasal 12 yang berlaku ketika proses ini diproses

bahwa kasus-kasus yang bisa di restorative justice harus tidak menimbulkan kehebohan, tidak meresahkan di tengah masyarakat dan tidak mendapat penolakan dari masyarakat. Semua syarat ini tidak dipenuhi," tegas Mahfud.

Lalu, petugas penyidik dalam perkara perlu diperiksa karena telah memberi penjelasan yang oleh hakim praperadilan dijadikan dasar bahwa pencabutan SP3 hanya berdasar hasil Rakor di Kemenko Polhukam.

Padaahal, faktanya Rakor di Kemenko Polhukam itu hanya menyamakan persepsi bahwa penanganannya salah. Sementara pro justicia yaitu agar dibicarakan melalui gelar perkara di internal Polresta Bogor harus dilakukan.

"Namun berdasarkan hasil informasi bahwa proses internal Polresta Bogor untuk melaksanakan keputusan hasil Rakor di Kemenko Polhukam sudah dilakukan. Sehingga pencabutan SP3 itu tidak langsung ternada di keputusan Rakor di Kemenko Polhukam melainkan hasil rakor itu sudah dituangkan di dalam proses-proses yang formal di Polresta Bogor," ungkapnya.

Sementara terkait dugaan praktik jual beli keadilan restoratif pada kasus pemerkosaan di Kemenkom UKM, Kapuspenkum Kejagung, I Ketut Sumedana, menegaskan, dalam penerapannya, hal yang paling utama adalah adanya upaya perdamaian dari kedua pihak dan memberikan maaf pada pelaku.

Kemudian, penerapan RJ ini bisa diberlakukan karena pelakunya baru pertama kali melakukan tindak pidana atau bukan residivis. Ancaman hukumannya tidak lebih dari lima tahun. Kerugian yang diderita korban tidak lebih dari Rp2,5 juta serta yang paling penting tindak pidana yang dilakukan tidak berdampak luas ke masyarakat.

"Dari persyaratan tersebut, kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual, termasuk eksploitasi seksual, tidak termasuk dalam kategori kasus yang bisa dihentikan berdasarkan keadilan restoratif. Di samping itu, kasus pemerkosaan menimbulkan traumatis berkepanjangan terhadap korban dan juga berdampak luas kepada masyarakat," tegasnya. •***/rhd

KEMBALI DIBUKA SETELAH SP3

Kekalahan pemerintah terhadap pelaku rudapaksa lewat gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Bogor tidak menyurutkan semangat membuka kembali kasus yang cukup memalukan ini.

Menko Polhukam, Mahfud MD, yang turun langsung dalam kasus ini meminta Polri kembali memproses kasus pemerkosaan yang terjadi pada pegawai honorer Kemenkop UKM dengan inisial MD (27).

Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, mengatakan, keputusan dibukanya kembali kasus itu berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin Menko Polhukam, Mahfud MD. Rapat itu juga melibatkan kementerian/lembaga hingga lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK).

"Rapat koordinasi dipimpin Menko Polhukam yang melibatkan Kemente-



Polresta Bogor Kota yang bertanggung jawab atas kasus memalukan tersebut akan terus mengusut kasus pemerkosaan pegawai Kemenkop UKM meskipun tiga tersangka sudah menang gugatan praperadilan.

rian Lembaga sampai dengan LPSK sudah memutuskan untuk perkara dibuka kembali (pelaku mengingkari kesepakatan)," kata Agus

Agus mengatakan, kasus tersebut akan kembali diekspos di Gedung Bareskrim Polri. Nantinya gelar bertujuan untuk penetapan sidik lanjutan oleh Biro Pengawas Penyidikan Polda Jawa Barat.

"Karo Wassidik akan cek dan ambil langkah. Kalau nggak jalan juga ya kita

tarik ke Bareskrim untuk memberi rasa keadilan kepada masyarakat," ungkap Jenderal bintang tiga itu.

Sementara Polresta Bogor Kota yang bertanggung jawab atas kasus memalukan tersebut akan terus mengusut kasus pemerkosaan pegawai Kemenkop UKM meskipun tiga tersangka sudah menang gugatan praperadilan. Agar tidak terjadi kesalahan lagi kali ini, Polresta Bogor akan menggandeng ahli pidana untuk mengusut kasus tersebut.

"Kami akan melaksanakan gelar perkara khusus dengan mengundang ahli pidana," kata Kapolresta, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso.

Bismo menjelaskan, langkah itu diambil sebagai komitmen Polresta Bogor untuk tetap melanjutkan penyidikan kasus ini. Di sisi lain, mereka juga menghormati putusan PN Bogor.

Kronologi dan Jejak Peristiwa Rudapaksa di Kementerian Koperasi dan UKM:

- ▶ 5 Desember 2019: Korban ND bersama para pelaku dan lainnya mengikuti rapat Kementerian Koperasi dan UKM di Hotel Permata Kota Bogor.
- ▶ 6 Desember 2019: Korban diajak para pelaku untuk minum-minuman beralkohol. Dalam kondisi tidak sadar, korban akhirnya dirudapaksa secara bergilir oleh empat pelaku di hotel.
- ▶ 20 Desember 2019: Peristiwa itu membuat korban trauma dan kemudian melapor ke Polresta Bogor. Sejumlah barang bukti sempat diamankan petugas antara lain pakaian korban, rekaman CCTV di hotel serta visum et repertum.
- ▶ 20 Januari 2020: Tersangka MF, WH, ZPA, dan NN jadi tersangka rudapaksa dengan Pasal 286 KUHP.
- ▶ 13 Februari 2020: Para tersangka ditangkap dan kemudian ditahan
- ▶ 14 Februari 2020: Tersangka MF selaku pegawai honorer dipecat
- ▶ 16 Februari 2020: Tersangka NN juga dipecat sebagai tenaga lepas.
- ▶ 20 Februari 2020: Tersangka ZPA dinyatakan diangkat menjadi PNS
- ▶ 3 Maret 2020: Terbit surat kesepakatan bersama yang berisi soal penyelesaian kasus secara kekeluargaan. Terbit surat pencabutan laporan polisi.
- ▶ 5 Maret 2022: Polresta Bogor melepaskan para tersangka dari tahanan.
- ▶ 13 Maret 2020: Korban ND dinikahkan dengan ZPA sebagai bentuk perjanjian penyelesaian.
- ▶ 18 Maret 2020: Polresta Bogor menghentikan penanganan perkara dengan mengeluarkan SP3.
- ▶ 2 April 2020: Majelis Kode Etik Kemenkop UKM dibentuk.
- ▶ 1 Februari 2021: Pelaku ZPA menerima beasiswa S2 di Malang
- ▶ Februari 2021: Pelaku WH mendapat kenaikan pangkat
- ▶ 20 Desember 2022: Korban ND melayangkan surat somasi ke ZPA karena dinilai telah menelantarkannya sebagai istri.
- ▶ 21 November 2022: Pemerintah mengadakan rapat yang terdiri atas Bareskrim Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Kemenko Polhukam dan hasilnya menolak SP3 kasus tersebut.
- ▶ 28 November 2022: Pelaku ZPA dan WH akhirnya dipecat sebagai PNS.
- ▶ 7 Desember 2022: Polresta Bogor Kota melanjutkan penyidikan
- ▶ 23 Desember 2022: Tiga pelaku ZPA, WH, dan MF mengajukan gugatan pra peradilan ke PN Bogor dengan nomor perkara 5/Pid. Pra/2022/PN Bgr.
- ▶ 12 Januari 2023: Putusan terhadap perkara bernomor 5/Pid. Pra.2022/PN Bgr itu diputuskan oleh hakim tunggal di PN Bogor pada Kamis 12 Januari 2023 yang memenangkan gugatan para pelaku. ●



Ketua DPR RI, Puan Maharani

PEREMPUAN PERTAMA DAN SATU-SATUNYA WARGA KEHORMATAN KORPS MARINIR

Ketua DPR, Puan Maharani, diangkat menjadi Warga Kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut (AL) dalam upacara pembaretan di Pulau Damar Besar, Kepulauan Seribu, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023.

Puan diangkat sebagai Warga Kehormatan Marinir bersama Ketua MPR, Bambang Soesatyo; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung Abdurachman; Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali; dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Fadjr Prasetyo.

Puan menjadi Ketua DPR dan perempuan pertama yang mendapat anugerah sebagai Warga Kehormatan Marinir yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono.

Prosesi pengangkatan Puan sebagai Warga Kehormatan Marinir dilakukan dengan rangkaian simulasi perang. Dari KRI Parang, rombongan pindah menaiki KRI Banda Aceh-593.

Untuk sampai di Pulau Damar, Puan bersama pasukan Marinir melakukan pendaratan amfibi dengan menggunakan kendaraan tempur jenis Landing Vehicle Tracked (LVT). Pendaratan dengan tank amfibi itu merupakan simulasi pendaratan pasukan di pantai untuk menyerang musuh.

Tiba di Pantai Pulau Damar, kemudian dilakukan simulasi operasi serangan udara langsung (SUL) dan pertempuran jarak dekat oleh pasukan Marinir. Terdengar dentuman meriam dan juga ada simulasi pemboman dari pesawat udara.

Setelah berada di Pulau Damar, Puan mendapat briefing dari Komandan Detasemen Jalamengkara (Denjaka), Kolonel Mar Samson Sitohang, yang memimpin simulasi penyerbuan musuh. Denjaka merupakan pasukan elite khusus TNI AL.

Pada simulasi ini, diskenariokan pasukan Marinir menyerbu kelompok separatistis yang ada di Pulau Damar. Sebelum memulai penyerbuan, Dandjenjaka menjelaskan soal kondisi pulau, kekuatan musuh, dan posisi musuh.

Usai briefing, Puan bersama pasukan Marinir masuk ke kawasan hutan di Pulau Damar yang masih rimbun. Lokasi ini menjadi salah satu area latihan tempur TNI AL.

Di dalam kawasan hutan ini, Puan kemudian menembak dengan peluru tajam sebagai simulasi menjatuhkan musuh. Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu juga melaku-



Ternyata kita perempuan bisa dan mampu. Walau pun singkat, ternyata tidak mudah.



kan simulasi peledakan posisi musuh dengan memencet detonator bom.

Upacara pembaretan untuk Puan sebagai Warga Kehormatan Marinir pun dilakukan usai simulasi penyerbuan musuh, di mana Panglima TNI Laksamana Yudo bertindak sebagai Inspektur Upac-

Puan pun menegaskan lembaganya terus mendukung penguatan institusi TNI, khususnya Korps Marinir.

"Saya sebagai Ketua DPR menegaskan bahwa DPR mendukung penguatan Marinir Indonesia. Karena dengan begitu, kita sejatinya sedang mendukung penega-

Marinir. Ia mengapresiasi keluarga besar Marinir yang memberinya kesempatan untuk mengikuti simulasi perang amfibi.

"Ternyata kita perempuan bisa dan mampu. Walau pun singkat, ternyata tidak mudah. Harus punya fisik kuat dan sehat. Ini merupakan kehormatan



ara, dan Dankormar Mayjen Widodo menjadi Komandan Upacara.

Prosesi pemberian penghargaan sebagai Warga Kehormatan Marinir dilakukan di bibir pantai Pulau Damar. Puan menerima brevet Warga Kehormatan Marinir di atas tank amfibi.

"Saya mengucapkan terima kasih atas penganugerahan saya sebagai warga kehormatan Korps Marinir," kata Puan.

Dia mengatakan, pembaretan ini tidak sekadar simbol, tapi tanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai Prajurit Korps Marinir yang menjadi garda depan melindungi NKRI dan seluruh tumpah darah Indonesia.

kan kedaulatan Indonesia," katanya.

Puan mengajak keluarga besar Marinir untuk tetap menegakkan nilai-nilai kedaulatan NKRI dan persatuan Indonesia di manapun bertugas. Dia juga berpesan untuk menjadikan perayaan keberagaman sebagai sumber kekuatan bersama, bukannya sebagai alasan perpecahan.

"Terus ingatkan kepada semua bahwa Pancasila yang intisariannya adalah gotong royong, merupakan bintang pemandu kita semua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," pesan Puan.

Puan merasa bangga karena hingga saat ini dia menjadi perempuan satu-satunya yang menjadi Warga Kehormatan

dan kebanggaan bagi saya mendapat kesempatan merasakan penyerbuan Marinir ke pulau yang dikuasai musuh," ujar Puan.

Mantan Menko PMK ini menilai, prajurit Marinir dituntut senantiasa mengembangkan kemampuan seiring dengan tantangan tugas yang semakin tidak ringan. Apalagi, perkembangan zaman semakin pesat yang turut berdampak terhadap konsep maupun operasi perang.

Sementara itu, Panglima TNI, Laksamana TNI Yudho Margono, mengatakan, pengangkatan Warga Kehormatan Marinir merupakan penghargaan terha-

dap tokoh yang dianggap berjasa untuk bangsa dan negara. Tokoh yang menjadi Warga Kehormatan Marinir dianggap patut diteladani karena juga memberi andil besar dalam mendukung perkembangan dan perjuangan prajurit Marinir.

Puan sendiri merupakan Warga Ke-

hormatan Marinir ke-42. Korps Marinir punya alasan khusus memberi anugerah Warga Kehormatan untuk Puan.

"Beliau merupakan sosok yang memiliki integritas dan dedikasi tinggi dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara Indonesia dan

telah bersumbangsing terhadap kemajuan TNI, termasuk TNI AL, khususnya Korps Marinir," jelas Yudo.

Menurut Yudo, prosesi pembaretan senjata dilakukan sekaligus dengan simulasi operasi perang. Sebab, Korps Marinir ingin menunjukkan tugas-tugasnya dalam menjaga kedaulatan Indonesia.

"Kegiatan ini kami praktikkan seperti latihan pendaratan amfibi. Memang dilaksanakan secara betulan, mulai dari naik KRI, kemudian naik tank amfibi, kemudian mendarat dan melakukan serbuan di darat," tuturnya.

Usai upacara pembaretan Warga Kehormatan Korps Marinir selesai, Puan kemudian diangkat oleh sejumlah prajurit Marinir dengan digendong di atas pundak. Hal ini sebagai tanda bahwa Puan telah menjadi bagian dari keluarga



Marinir.

Puan bersama tokoh lainnya lalu melihat demonstrasi rubber duck operation (RDO). Dari pantai, mereka menonton demo infiltrasi udara dan demo terjun bebas prajurit Marinir dari atas pesawat sambil membawa banner, di mana salah satunya bergambar foto Puan berbarek Marinir. Selain itu, ada juga fly pass atraksi pesawat tempur F-16 dari TNI AU.

Setelah acara selesai, Puan dan rombongan kembali menuju Kolinlamil dengan menaiki combat boat. Di Kolinlamil, Puan sebagai Warga Kehormatan pun menulis pesan untuk Korps Marinir.

"Kepada Prajurit Korps Marinir yang saya banggakan, terima kasih atas penganugerahan kepada saya sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir. Saya turut bangga menyaksikan profesionalitas Prajurit Korps Marinir sebagai unsur strategis dari SSAT (Sistem Senjata Armada Terpadu). Kibarkan terus semangat perjuangan dan pengabdian dalam menjaga kedaulatan NKRI. Jalesu bhumyama Jayamahe," demikian testimoni yang dituliskan Puan. •



HILIRISASI LOMPATAN BESAR PERADABAN INDONESIA

Presiden Joko Widodo mendorong terus jajarannya untuk melakukan hilirisasi terhadap bahan-bahan tambang yang dimiliki Indonesia untuk mendapatkan nilai tambah yang berkali-kali lipat. Presiden meminta agar penghentian ekspor dalam bentuk bahan mentah tidak hanya berhenti pada komoditas nikel saja.

Presiden meyakini bahwa hilirisasi akan menjadi lompatan besar peradaban negara. Meski digugat di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Presiden mendorong agar pemerintah Indonesia tetap berani maju dalam menghadapi gugatan tersebut.

"Kita harus berani seperti itu, kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh takut, karena kekayaan alam itu ada di Indonesia. Ini kedaulatan kita dan kita ingin dinikmati oleh rakyat kita, dinikmati oleh masyarakat kita," ujar Presiden pada Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDI Perjuangan yang digelar di JIExpo

Kemayoran, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2023.

Kepala Negara mengatakan, seperti yang dikatakan Presiden Soekarno pada 1965, Indonesia harus mampu berdikari dan tidak menggantungkan diri kepada negara mana pun. Selain itu, Presiden Soekarno juga mendorong pemerintah untuk memperluas kerja sama yang sederhana dan saling menguntungkan dengan negara lain.

"Bung Karno tahun 1965 sudah menyampaikan itu, supaya kita tidak bisa didikte dan tidak menggantungkan diri kepada negara mana pun. Inilah yang

ingin kita lakukan, berdikari, berdikari, berdikari," lanjutnya.

Untuk itu, dalam kesempatan saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Uni Eropa lalu, Presiden menuturkan bahwa dia mendorong adanya kesetaraan dalam kemitraan antarnegara, sehingga tidak ada satu negara yang merasa lebih unggul daripada negara lain.

"Saya menyampaikan (di KTT ASEAN-Uni Eropa) kemitraan itu harus setara dan tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh negara mana pun mendikte, dan tidak boleh negara-negara maju itu merasa bahwa standar mereka lebih bagus

dari negara kita," ujarnya.

Sebelumnya, pada 21 Desember 2022, Presiden Jokowi menyatakan, pemerintah Indonesia akan memberlakukan larangan ekspor bijih bauksit serta mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada Juni 2023 mendatang.

Presiden menyebut, kebijakan tersebut diambil pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, utamanya dalam rangka pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan peningkatan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Melalui industrialisasi bauksit di dalam negeri tersebut, Presiden memperkirakan bahwa pendapatan negara juga akan mengalami peningkatan dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp62 triliun.

Saat memberlakukan larangan ekspor bijih nikel pada 1 Januari 2020, Indonesia berhasil meningkatkan nilai ekspor nikel hingga 19 kali lipat, dari yang semula hanya USD1,1 miliar atau Rp17 triliun di akhir 2014, meningkat menjadi USD20,9 miliar atau Rp326 triliun pada 2021. Di akhir 2022, ditargetkan akan menjadi Rp440 triliun.

Hilirisasi Pacu Investasi

Hilirisasi kini menjadi tema yang terus diangkat pemerintah Indonesia dalam forum-forum internasional. Salah satunya Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengangkat tema Transformasi Ekonomi Berkelanjutan melalui Hilirisasi Industri dan Kemitraan Inklusif dalam perhelatan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, yang berlangsung 16-20 Januari 2023.

Menurut Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, hal ini merupakan ajang pemerintah Indonesia di tingkat global untuk menyampaikan agenda investasi berkelanjutan yang selalu disampaikan Presiden Jokowi.

"Kami ingin menegaskan pada dunia bahwa Indonesia mendorong pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan merata bagi semua pihak," ujar Bahlil dalam keterangan resminya, Senin, 16 Januari 2023.

Bahlil mengatakan pihaknya mendorong hilirisasi industri agar nilai tambah dari sebuah investasi dirasakan masyarakat di sekitar lokasi investasi. Ini juga menjadi bagian dari kolaborasi investor dengan UMKM lokal agar terjadi pemerataan investasi hingga ke daerah.

Bahlil pun mengundang investor global untuk ikut membangun hilirisasi di Indonesia. Dia menegaskan fokus pemerintah Indonesia pada penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi yang berorientasi pada energi dan industri hijau.

"Indonesia akan menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang fokus menjalankan proses nilai tambah di negaranya sendiri. Ini semua sudah ber-

nan, perikanan, kelautan, dan kehutanan sebesar USD50,6 miliar.

"Hal ini perlu kami sampaikan bahwa selama ini hilirisasi kita cuma berbicara tentang nikel. Saya pikir kita tidak lagi hanya fokus pada satu komoditas," katanya.

Hilirisasi di nikel mencatatkan peningkatan kinerja ekspor yang signifikan karena sepanjang 2017-2018, ekspor nikel hanya sekitar USD3,3 miliar. Namun, angkanya meroket menjadi USD20,9 miliar pada 2021.

"Itu baru satu komoditas, maka kemudian itu berdampak pada peningkatan pajak, pada peningkatan competitiveness (daya saing) kita dan neraca perda-



jalan, ini sudah dimulai. Kami mengundang investor untuk datang membawa teknologi, modal, dan sebagian pasar. Kami ditugaskan Presiden (Jokowi) untuk memberikan jaminan percepatan perizinan kepada investor," tuturnya.

Bahlil memaparkan arah kebijakan hilirisasi investasi strategi Indonesia yang tidak hanya untuk sumber daya nikel. Sebab, ada delapan sektor prioritas untuk didorong hilirisasinya, yaitu mineral, batu bara, minyak bumi, gas alam, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan dengan 21 komoditas turunannya. Kebijakan ini sudah berjalan dan direncanakan nilai investasinya hingga 2035 akan mencapai USD545,3 miliar.

Secara rinci, potensi investasi hilirisasi di sektor mineral dan batu bara sebesar USD427,1 miliar; minyak dan gas bumi sebesar USD67,6 miliar; serta perkebu-

ngan," ungkapnya.

Bahlil pun menegaskan hilirisasi yang tengah gencar dilakukan pemerintah Indonesia tidak hanya berhenti di komoditas nikel saja.

"Kami tidak ingin berakhir di nikel, karena apa? Sumber daya alam kita banyak. Maka, kita breakdown dengan peluang-peluang peta investasi yang ada, kita breakdown ke dalam 21 komoditas," sambungnya.

Bahlil menuturkan investasi di bidang hilirisasi merupakan jalan Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi agar bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah.

Ia meyakini potensi investasi dari hilirisasi di sektor strategis itu akan menciptakan lapangan kerja yang masif dan meningkatkan upah yang berkualitas.

"Pendapatan per kapita kita kan seka-

rang cuma USD4.500. Untuk jadi negara maju minimal harus USD10.000. Kita enggak bisa lagi dengan cara tenaga kerja upahnya cuma Rp5-6 juta. Di sisi lain, skill kita, anak muda kita, harus ditingkatkan,” katanya.

Bahlil mengakui, perjuangan Indo-

untuk mendukung langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi untuk hilirisasi industri di dalam negeri.

Ketua HIMBARA yang juga Direktur Utama BRI, Sunarso, mengatakan, Presiden Jokowi memberikan arahan agar

dinikmati oleh masyarakat Indonesia,” ujar Sunarso se usai pertemuan pelaku industri perbankan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin, 16 Januari 2023.

Dalam pertemuan tersebut, sektor perbankan dan OJK juga memberikan masukan sekaligus laporan hal-hal yang sudah dilakukan oleh industri di 2022.

Meskipun laporan keuangan belum diterbitkan, Himbara optimistis pada 2022 bank-bank milik negara bisa melampauinya dengan sangat baik dan kinerja solid, terutama masih tumbuh agresif dan tetap mengedepankan kehati-hatian.

“Terbukti bahwa kualitas aset yang kita kelola jauh membaik dan itu semua tidak lepas dari kebijakan dari OJK, termasuk memperpanjang masa berlakunya relaksasi untuk penentuan kualitas aktiva produktif dan itu memang diperlukan,” ungkapnya.

Sunarso mengatakan, Himbara dan BRI secara khususnya, memiliki strategi untuk pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan, di mana perseroan tumbuh secara selektif dengan melakukan pencadangan yang memadai untuk mengantisipasi apabila terjadi pemburuan-pemburuan akibat kondisi ekonomi yang diproyeksikan menghadapi ketidakpastian.

“Kami siap untuk tumbuh dan kami siap untuk menghadapi berbagai tantangan dengan pencadangan dan kita sudah buktikan di tahun 2022 perbankan kita sangat solid,” ujarnya.

Ketua Dewan Komisiner OJK, Mahendra Siregar, menambahkan, tujuan dari pertemuan dengan Presiden Jokowi tersebut adalah untuk menyampaikan persiapan dalam rangka pertemuan tahunan industri jasa keuangan yang akan dilaksanakan pada awal Februari 2023. Namun, sekaligus menyampaikan secara langsung bagaimana perkembangan terakhir maupun kinerja industri-industri yang ada di jasa keuangan.

“Kami menyampaikan bagaimana rencana prospek dan tantangan ke depan yang perlu diantisipasi, dimitigasi, dan ditangani dengan sebaik-baiknya, sehingga sekalipun kondisi perekonomian global penuh tantangan dan tidak mudah, sekalipun tentu kita harus



Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia



Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid

nesia menginisiasi hilirisasi mendapatkan pertentangan luar biasa dari dunia. Namun, hilirisasi ini adalah jalan tengah untuk Indonesia berubah dari negara berkembang menuju negara maju.

Dukungan Himbara

Himpunan Bank-Bank Milik Negara (HIMBARA) menyatakan komitmennya

semua pihak mendukung hilirisasi industri. Untuk itu, sektor perbankan senantiasa mendukung kebijakan pemerintah mengenai hilirisasi, terutama hilirisasi industri yang berbasis ekstraksi sumber daya alam.

“Industri perbankan berkomitmen untuk mendukung proses hilirisasi agar seluruh rangkaian nilai tambahnya

memitigasi dampak dari kondisi tadi itu, dan juga tentu kita menyambut masa persiapan masuk ke dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden,” terang Mahendra.

Dorong Industri Pengolahan

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, meyakini, larangan ekspor tembaga akan dapat mendorong pengusaha tambang untuk segera membangun industri pengolahan di dalam negeri. Ketika larangan ekspor diterapkan, pengusaha dipastikan tidak ingin merugi, sehingga mereka mau tidak mau akan mengusahakan untuk membangun smelter atau fasilitas pemurnian.

“Begitu (ekspor) dilarang, maka akan bermunculan lah pengusaha atau investor yang bergerak di bidang hilirisasi, terutama yang akan diusahakan para perusahaan tambang tadi, karena kalau larangan diterapkan, mereka pasti tidak mau rugi, mau tidak mau dipaksa untuk mengusahakan smelter,” kata Fahmy dikutip dari Antara, 16 Januari 2023.

Keyakinan tersebut didasarkan pada kasus larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan sejak awal 2020. Bahkan, melalui kebijakan hilirisasi tersebut, nilai ekspor nikel tumbuh berkali lipat dari hanya sekitar USD3 miliar pada 2017-2018 menjadi USD20,9 miliar pada 2021.

“Saya kira pengalaman di nikel sudah terbukti,” ujarnya.

Fahmy juga menilai keputusan Jokowi untuk melarang ekspor mineral mentah, mulai dari nikel, dan akan berlanjut pada bauksit dan komoditas lainnya, termasuk tembaga, merupakan langkah berani, tepat dan strategis dilakukan.

Meski Presiden Jokowi tahu betul akan kalah jika nantinya kembali digugat ke WTO soal larangan ekspor, namun langkah tersebut justru tetap dilakukan untuk bisa segera mendorong penciptaan nilai tambah atas kekayaan mineral Indonesia. Pasalnya, proses gugatan akan memakan waktu sekitar dua tahun. Jika kalah, proses banding akan memakan waktu hingga sekitar tiga tahun.

“Jokowi tahu pasti akan kalah kalau digugat di WTO. Dia pasti tahu. Tetapi Jokowi memperhitungkan proses pengaduan sampai dengan inkrah putusan itu butuh waktu sekitar 4-5 tahun. Taruh

lah 5 tahun. Nah, dalam waktu lima tahun ini bisa digunakan untuk mendorong smelter tadi bermunculan,” katanya.

Keputusan melarang ekspor mineral mentah juga dinilai sebagai bentuk nasionalisme yang kembali dibangkitkan setelah terkubur di era Soekarno.

Larangan ekspor mineral untuk hilirisasi setidaknya punya dua tujuan, yaitu meningkatkan nilai tambah di dalam negeri serta mendorong pengembangan ekosistem berbasis dari hulu ke hilir, salah satunya ekosistem kendaraan listrik.

“Dalam konstitusi disebutkan bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,

produk asing. Di antaranya kurangnya pendanaan serta keterbatasan SDM dalam melakukan riset dan penggunaan teknologi.

Menurutnya, salah satu indikator keberhasilan hilirisasi industri di Tanah Air adalah pelibatan sektor swasta, termasuk investor global. Investasi dalam negeri maupun global perlu bergerak sejalan dengan prioritas pemerintah saat ini, di antaranya pengembangan industri hilirisasi di Indonesia.

Arsjad menambahkan, apabila investasi diarahkan sesuai dengan sektor yang menjadi prioritas pemerintah, maka nilai tambah untuk kepentingan nasional pun diharapkan semakin besar.



bukan kemakmuran pengusaha dan negara barat. Caranya ya dengan melarang ekspor untuk menaikkan nilai tambah tadi dan meningkatkan kemakmuran rakyat,” kata Fahmy.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut, hilirisasi industri bisa menjadi salah satu strategi untuk mengeksplorasi potensi perekonomian Tanah Air.

“Dengan melaksanakan hilirisasi, Indonesia berpotensi untuk memberikan nilai tambah yang luar biasa, terutama karena Indonesia memiliki berbagai mineral dan potensi energi terbarukan yang besar,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, melalui keterangan di Jakarta, Rabu, 18 Januari 2023.

Arsjad mengatakan, terdapat beberapa tantangan yang menyebabkan program hilirisasi industri di Indonesia belum efisien dan kalah saing dengan

Sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia, pengembangan ekosistem kendaraan listrik menjadi strategi utama hilirisasi guna mendapatkan nilai tambah maksimal dari mineral mentah kekayaan Indonesia. Untuk menggenjot hilirisasi nikel, pemerintah juga telah menetapkan target ambisius dengan menghadirkan 25 persen kendaraan listrik dari total penjualan kendaraan pada 2030.

Sementara, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Azis Armand, mengatakan, momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik, terutama dalam menunjang pencapaian target emisi nol bersih melalui strategi elektrifikasi.

“Dengan bertransisi ke kendaraan listrik, para pengguna moda transportasi dapat membantu mengurangi emisi karbon, mengurangi ketergantungan BBM, serta membuat Indonesia lebih bersih,” kata Azis. ●

FOKUS PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Upaya Penjabat Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi Mahmud, dalam meningkatkan pembangunan di Bumi Serasan Sekate patut diapresiasi. Berbagai gebrakan luar biasa dilakukannya dalam mendorong efektivitas pembangunan infrastruktur.

Guna meningkatkan pembangunan di Kabupaten Muba yang selama ini telah ada dan berjalan butuh upaya yang luar biasa dalam mewujudkan hal tersebut, termasuk melakukan pembenahan tata kelola yang dilakukan Apriyadi.

Keseriusan Apriyadi ini mendapat apresiasi luar biasa dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) setelah melihat program yang dihasilkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, efektivitas pembangunan jalan di Muba sudah sangat baik, terutama kemandirian pembangunan infrastruktur jalan.

Apriyadi menyebutkan, pemeriksaan ini menjadi momentum untuk awal pe-

rubahan sektor kemandirian jalan yang akan dijalankan sesuai aturan.

"Ini effort kami dalam melakukan pembenahan khusus di sektor PUPR. Kami ingin peningkatan kualitas tata kelola jalan benar-benar sesuai perencanaan," tegasnya.

Dia mengungkapkan, saat ini, Pemkab Muba juga telah melaksanakan uji mutu dengan memfungsikan laboratorium Dinas PUPR dengan menggandeng Politeknik Sriwijaya.

"Prinsipnya mulai 2023 kami ingin infrastruktur jalan di Muba, mulai dari perencanaan hingga monitoring serta evaluasi, benar-benar berjalan baik dan berkualitas," ujarnya.

Sementara dalam peningkatan ad-

ministrasi dan disiplin aparat pemerintah, Apriyadi menerapkan pemasangan stiker/logo Pemerintah Kabupaten Muba pada mobil dinas sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Peningkatan disiplin ini dipantau langsung Penjabat Sekda Muba, Musni Wijaya, sekaligus menegaskan jika pemasangan logo ini harus berlaku ke seluruh kendaraan dinas di Muba.

"Kalau masih belum pasang stiker/logo Pemkab Muba akan ditarik kendaraan dinas. Satpol PP akan melakukan razia dalam waktu dekat ini menyisir kendaraan dinas di kantor-kantor dinas setempat," tegas Musni.



Batas waktu kendaraan dinas untuk memasang stiker tersebut adalah hingga 10 Januari 2023.

"Kalau masih ada yang membandel terpaksa kami harus tarik mobil dinas-nya," tegasnya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Muba, Apriyadi, mengatakan stiker dan logo Pemkab Muba pada kendaraan dinas ini dapat membuat dinas lebih dapat bertanggung jawab.

"Semakin besar tanggung jawab para pengguna untuk menjaga dan memelihara barang milik daerah dan pejabat lebih bertanggung jawab, mari kita taati bersama aturan ini," tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Apriyadi juga mengajak agar ASN di lingkungan Pemkab Muba lebih bekerja maksimal demi kemajuan daerah Kabupaten Muba.

"Kita harus semangat dalam menyongsong TA 2023 dan bekerja lebih baik dari tahun sebelumnya," ujarnya.

Selain fokus pada peningkatan infrastruktur dan penegakan disiplin, Pemkab Muba juga terus melakukan perbaikan di bidang pelayanan kesehatan. Tidak ingin hanya terpusat di perkotaan Sekayu, Apriyadi menyisir layanan kesehatan hingga ke pelosok.

Salah satu bentuk peningkatan itu adalah pemberian 10 unit mobil ambulance dan mobil jenazah untuk desa yang ada di pelosok kabupaten.

"Mobil ambulance dan jenazah yang dibagikan ini memanfaatkan dana

bisa digunakan dengan maksimal," terangnya.

Dia berharap, mobil ambulance dan jenazah yang diberikan bisa bermanfaat dan menjangkau pelayanan kesehatan di pelosok-pelosok Muba.



APBD Kabupaten Muba, ada 10 unit untuk 10 desa di Muba. Kita prioritaskan dahulu untuk desa di pelosok," ujar Apriyadi.

Dia menjelaskan, mobil ambulance dan jenazah yang dibagikan spesifikasinya menyesuaikan medan kawasan desa.

"Ya, jadi untuk desa yang medannya terjal dan berlumpur diberikan mobil ambulance yang double gardan agar

"Semoga bermanfaat dan pelayanan bidang kesehatan di Muba dapat meng-cover kebutuhan warga hingga di pedesaan," harapnya.

Desa yang mendapat bantuan mobil ambulance dan jenazah itu adalah Desa Mekar Jaya, Desa Keluang, Desa Ngulak, Desa Babat Toman, Desa Jirak Jaya, Desa Bero Jaya Timur, Desa Rimba Ukur, Desa Sungai Medak, dan Desa Sukarami. •rhd/**





MENIKMATI LAYANAN KESEHATAN DI MUBA

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, terus meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, terutama pada peningkatan kualitas fasilitas rumah sakit. Peningkatan kualitas kesehatan ini dilakukan secara merata ke seluruh warga di Kabupaten Muba.

Salah satu yang dilakukan adalah peningkatan kualitas pelayanan di ruang kelas III RSUD Sekayu yang kini hampir selevel kamar kelas I. Suasana kamar rawat inap Kelas III RSUD Sekayu yang baru ini untuk mengubah image kalau ruangan kamar Kelas III buruk dan sesak.

Meski tetap dihuni sebanyak enam pasien, namun Kelas III ruang rawat inap yang baru di RSUD Sekayu terasa rawat inap di Kelas I atau VIP. AC yang dingin hingga ruang yang bersih tampak terlihat di ruangan tersebut.

"Jadi kita ingin mengubah anggapan kalau ruang Kelas III itu sesak dan tidak nyaman," ujar Penjabat Bupati Muba,

Apriyadi Mahmud, saat meninjau beberapa ruang rawat inap dan pelayanan medis di RSUD Sekayu.

Menurutnya, pekerjaan rumah ke depan pelayanan kesehatan dan rawat inap di RSUD Sekayu harus menyetarakan semua pelayanan khususnya dari sisi fasilitas.

"Tidak ada orang yang mau sakit, jadi pelayanan dan fasilitas kesehatan itu harus bagus dan buat orang sembuh, bukan malah bertambah sakit saat masuk rumah sakit," cetusnya.

Sementara itu, Plt Direktur RSUD Sekayu, Azmi Dariusmansyah, menerangkan, ada lima ruang rawat inap Kelas III yang baru. "Untuk jumlah pasien tiap ruangan diisi enam pasien," ujarnya.

Dia mengatakan, ada pula ruang CT Scan untuk melayani check-up pasien dan warga Muba yang membutuhkan.

"Sesuai arahan pak Bupati Apriyadi, tiap ruangan dan fasilitas harus nyaman bagi pasien," ungkapnya.

Peningkatan layanan juga dilakukan di RSUD Sungai Lilin. Hal ini dibuktikan dengan telah tercapainya Akreditasi Paripurna oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS-DHP).

"Alhamdulillah RSUD Sungai Lilin telah mendapatkan Akreditasi Paripurna oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS-DHP), yang awalnya RSUD Sungai Lilin bintang dua sekarang kita sudah

standar bintang 5 dari dasar langsung ke paripurna. Ini menandakan bahwa kami serius untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang berobat di RSUD Sungai Lilin,” kata Direktur RSUD Sungai Lilin, Tri Sinarum.

Arum menjelaskan, pelaksanaan akreditasi merupakan salah satu pengakuan dari lembaga akreditasi rumah sakit yang ditunjuk Kementerian Kesehatan untuk menilai standar rumah sakit dalam menerapkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang tertuang pada 796 elemen penilaian standar akreditasi rumah sakit. Penilaian berupa kelengkapan dokumen dan telusur lapangan yang dilaksanakan untuk melihat sarana dan prasarana serta fasilitas rumah sakit.

Serasan Sekate ini.

Apriyadi menambahkan, lokasi RSUD Sungai Lilin ini sangat strategis di jalan lintas Palembang Jambi. Banyak kasus kasus trauma yang bisa segera ditangani, sehingga RSUD Sungai Lilin ke depannya harus menjadi rumah sakit unggulan rujukan pusat trauma atau trauma center di Kabupaten Muba.

“Trauma Center sangat sesuai mengingat Sungai Lilin merupakan daerah Exit Tol yang sedang dalam proses

rujukan trauma center karena ini merupakan bentuk pelayanan dan pertolongan pertama saat pasien mengalami kecelakaan atau trauma. Karena pelayanan yang lengkap serta bermutu akan meningkatkan keselamatan pasien.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muba, Azmi Dariusmansyah, menambahkan, dirinya akan terus menjalankan arahan dari Penjabat Bupati Muba untuk tetap menjaga pengakuan akreditasi paripurna dan program ung-



Dalam pelaksanaan akreditasi RSUD Sungai Lilin mendapatkan dukungan langsung oleh Apriyadi yang hadir pada exit conference melalui zoom meeting didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muba saat akreditasi berlangsung.

“Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan mendukung sepenuhnya perbaikan pelayanan rumah sakit di RSUD Sungai Lilin, baik melalui dana DAK Pusat, APBD Provinsi, APBD Kabupaten maupun dana CSR. Terbukti akan segera dibangun gedung ICU di RSUD Sungai Lilin melalui dana CSR dari PT Hindoli Cargill. Saya sangat serius dalam bidang kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat Kabupaten Muba,” ujar orang nomor satu di Bumi

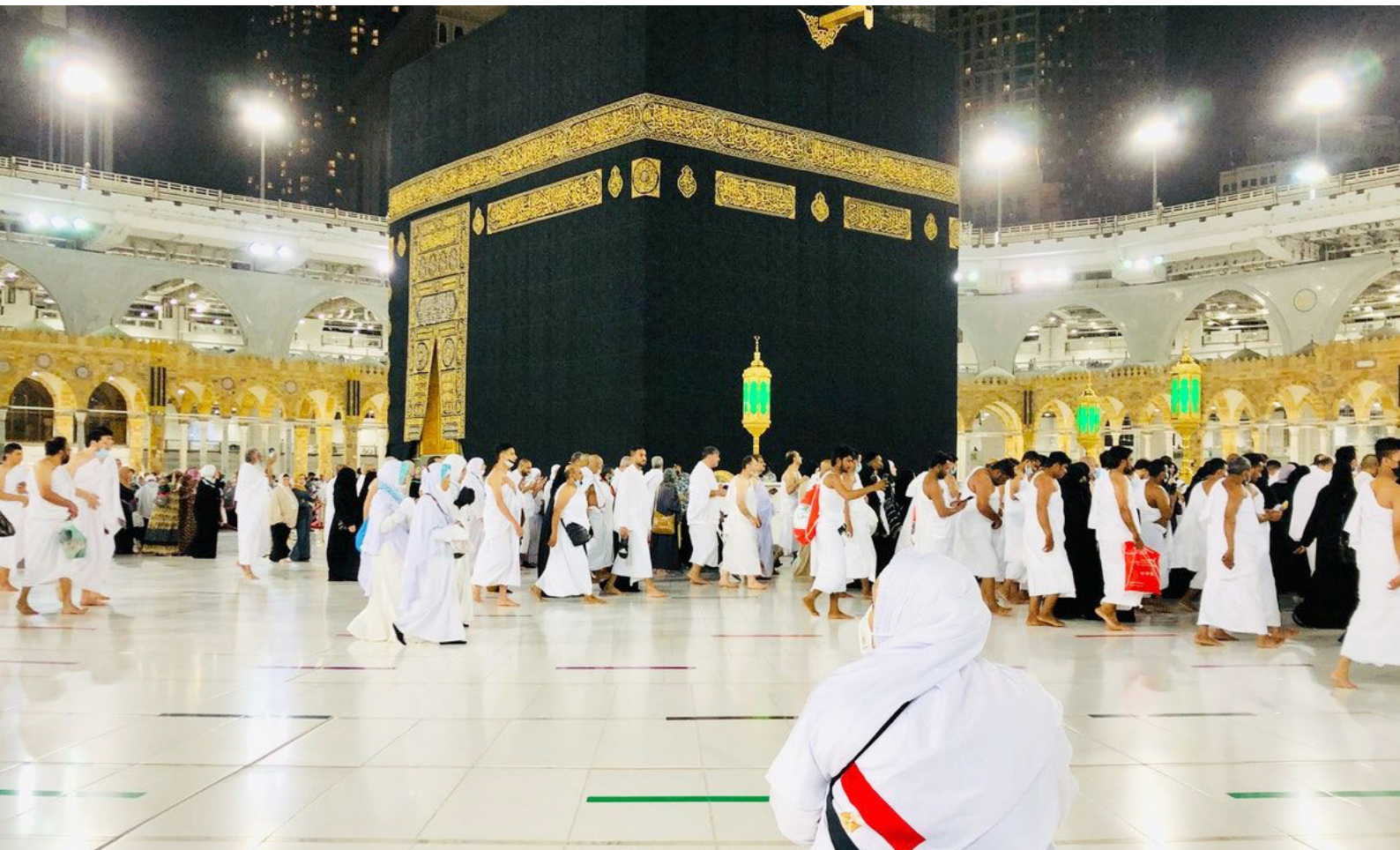
pembangunan,” ucapnya.

Hal ini disambut dan didukung sepenuhnya oleh Ketua Tim Surveyor Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS-DHP), Abdi Setia Kesuma, yang datang ke RSUD Sungai Lilin.

Abdi menyatakan, LARS DHP akan terus mendorong dan mendampingi kemajuan RSUD Sungai Lilin menjadi

gulan di tiga rumah sakit di Kabupaten Muba.

“Saya akan selalu mengingatkan dan terus bekerja sama dengan direktur dan manajemen di tiga rumah sakit di Kabupaten Muba, yaitu RSUD Sekayu, RSUD Sungai Lilin, dan RSUD Bayung Lencir untuk selalu meningkatkan pelayanan yang bermutu bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Muba,” tuturnya. ●



MENJAGA MANFAAT DANA HAJI UNTUK MASA DEPAN

Umat Muslim di Tanah Air patut berbahagia karena Kerajaan Arab Saudi memberikan kuota untuk berangkat haji 2023 kepada Indonesia sebanyak 221 ribu orang tanpa batasan usia. Namun, calon Jemaah haji Indonesia dihadapkan pada kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang diusulkan Kementerian Agama sebesar Rp69 juta.

Biaya haji 2023 ini naik naik Rp514.888 dibandingkan tahun lalu. Kemenag beralasan ongkos harus naik karena ada perubahan signifikan dalam komposisi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). BPIH adalah biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar jamaah ditambah komponen biaya yang dipenuhi dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, mengatakan, hal ini sudah mele-

wati proses kajian. "Ini atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji," kata Yaqut dalam rapat bersama Komisi VIII DPR di Jakarta, Jumat, 20 Januari 2023.

Kenaikan biaya haji dibandingkan tahun lalu terdapat perubahan signifikan antara komponen BPIH yang harus dibayarkan jemaah dan komponen yang anggarannya dialokasikan dari nilai manfaat (optimalisasi).

Yaqut mengatakan, rerata biaya perjalanan haji yang diusulkan mencakup

70 persen dari rata-rata BPIH yang diusulkan, yakni Rp98.893.733. Angka tersebut terdiri dari biaya perjalanan ibadah haji senilai Rp69.193.734 (70 persen) dan alokasi nilai manfaat pengelolaan dana haji Rp29.700.175 (30 persen). Adapun komponen BPIH 2022, yakni komposisi Bipih Rp39.886.009,00 (40,54 persen), dan nilai manfaat (optimalisasi) Rp58.493.012,09 (59,46 persen).

Dia menjelaskan, komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah,

yaknidigunakanuntukmembayarbiaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp33.979.784,00; akomodasi Makkah Rp18.768.000,00; akomodasi Madinah Rp5.601.840,00; living cost Rp4.080.000,00; visa Rp1.224.000,00; dan paket layanan masyair Rp5.540.109,60.

Yaqut mengatakan, formulasi ini untuk menyeimbangkan beban Jemaah, sekaligus menjaga keberlanjutan pemanfaatan pengelolaan dana haji.

"Jadi dana manfaat dikurangi jadi 30 persen, sedangkan 70 persen tanggung jawab jemaah," ujarnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu juga mengatakan, besaran ongkos haji merupakan usulan pemerintah. Namun, hal tersebut akan dibahas bersama DPR. "Berapa biaya yang nanti disepakati, tergantung pembicaraan di Panja," sambungnya.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan alasan rencana tersebut harus dilakukan. Proporsi pembayaran penyelenggaraan biaya ibadah haji atau PBIH harus sebesar 70:30 pada tahun ini. Jika tetap menggunakan proporsi 40:60, maka dana subsidi yang dikururkan pemerintah untuk jemaah haji akan habis sebelum 2033.

Seperti diketahui, pemerintah selama ini selalu mensubsidi jemaah haji agar dapat memenuhi PBIH. Sumber dana subsidi tersebut merupakan bagi hasil dari investasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sejauh ini, portofolio investasi yang dilakukan oleh BPKH adalah 70 persen di surat berharga syariah negara, sementara 30 persen ditanam di deposito perbankan syariah. Dengan rumus tersebut, BPKH dapat mensubsidi sekitar Rp20 triliun untuk setiap rombongan jemaah haji per tahun.

Muhadjir menjelaskan, peningkatan beban yang harus ditanggung jemaah haji yang akan berangkat tahun ini masih dalam tahap usulan. Menurut, keputusan akhir berada di tangan Komisi VIII DPR setelah berdiskusi dengan pemerintah.

Selain itu, Muhadjir mengatakan Presiden Joko Widodo belum membahas lebih lanjut mengenai peningkatan

beban tersebut.

Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, mengatakan, BPIH yang ditanggung jemaah haji bisa saja tidak naik. Namun, konsekuensinya ada tambahan biaya yang harus ditanggung pemerintah diambil dari jemaah 2024.

Dengan kata lain, BPKH memproyeksikan jemaah haji yang seharusnya berangkat pada 2024 akan diundur karena peningkatan biaya penyelenggaraan ibadah haji tidak dilimpahkan

proporsional. Pasalnya, sejak 2010-2022, penggunaan dana dari nilai manfaat terus mengalami kenaikan.

Dia memaparkan, pada 2010, nilai manfaat yang dikeluarkan hanya Rp4,45 juta (13 persen) dan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) Rp30,05 juta (87 persen) dari total biaya penyelenggaraan haji (BPIH) Rp34,50 juta. Pada 2011, nilai manfaat sebesar Rp7,31 juta (19 persen) dan Bipih Rp32,04 juta (81 persen) dari total BPIH Rp39,34 juta.



Menteri Agama, Yaquut Cholil Qoumas, bertemu Menteri Haji Arab Saudi, Tawfiq F Al Rabiah (2)

kepada jemaah haji 2023.

Fadlul menjelaskan subsidi tersebut dapat habis pada 2025 jika porsi pembayaran haji yang digunakan tetap 60:40. Menurutnya, hal tersebut berbahaya lantaran ibadah haji akan dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun pada 2027.

Fadlul menyebut skema pembiayaan pelaksanaan ibadah haji harus

Kemudian, rincian penggunaan nilai manfaat menjadi 19 persen pada 2012, 25 persen pada 2013, 32 persen pada 2014, 39 persen pada 2015, 42 persen pada 2016, 44 persen pada 2017, dan 49 persen pada 2018 dan 2019.

Sementara pada 2022, karena Arab Saudi menaikkan layanan biaya Masyair secara signifikan jelang dimulainya operasional haji (saat jemaah

sudah melakukan pelunasan), penggunaan dan nilai manfaat naik hingga 59 persen.

"Sekarang (2023) angkanya sekitar Rp98 jutaan juga. Jadi, nilai manfaat yang dibayarkan harusnya naik dua kali lipat dari biasanya. Secara angka, dari cuma nilai manfaat Rp30 jutaan menjadi hampir Rp60 juta," sebutnya.

Maka dari itu, skema yang diusulkan

nyelenggaraan haji tersebut disebabkan berubahnya perekonomian global. Kenaikan biaya tersebut setidaknya dipengaruhi oleh kurs Rupiah dan harga tiket pesawat.

Hilman mencatat, kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat terus berubah sepanjang 2022 hingga saat ini. Menurutnya, perubahan kurs tersebut mencapai Rp14.200-14.800 per Dolar

jut dengan calon vendor dalam ibadah haji tahun ini.

"Kami dari pemerintah akan berusaha menekan hal itu," ujar Hilman.

Menurut Hilman, usulan skema Bipih tahun ini mengusung prinsip berkeadilan dan keberlanjutan bagi semua calon jemaah haji Indonesia. Kemenag masih mencari solusi dan rasionalisasi bersama karena harus punya empati dan simpati bagaimana memiliki pembiayaan haji yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk semua antrean jemaah haji Indonesia.

"Kemenag sama sekali tidak ada niat memberatkan calon jemaah haji," kata Hilman.

Dia menjelaskan, BPIH yang tinggi memerlukan rasionalisasi dari Bipih dan nilai manfaat. Sehingga, Kemenag harus bisa menawarkan pembiayaan yang normal.

Namun, skema yang diusulkan itu akan kembali dibahas bersama Komisi VIII DPR untuk mencari jalan tengah. Kemenag ingin agar biaya haji dapat diterima oleh semua pihak demi keberlanjutan dana kelola haji.

"Kami akan berdiskusi bagaimana rasionalisasi haji bisa dilakukan agar kenaikan biaya haji seperti yang terjadi pada 2022 bisa diantisipasi lebih awal. Konsep berhaji itu adalah istithaah atau seseorang yang memiliki bekal secara finansial," terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR, Yandri Susanto, meminta calon jemaah haji untuk tidak risau dengan ongkos haji yang masih menjadi perdebatan saat ini. Sebab, Komisi VIII DPR bersama pemerintah akan membahas secara detail.

"Insyallah hasilnya kemungkinan besar tetap akan di bawah Rp69 juta," katanya saat memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023.

Menurutnya, terkait kepastian berapa jumlah dibayarkan, akan diputuskan di tingkat panitia kerja dan akan dibawa ke Rapat Kerja Komisi VIII DPR. Dia memastikan angka Rp69 juta tersebut masih sebatas usulan dari Kementerian Agama dan belum menjadi keputusan tetap.

Yandri menjelaskan, dirinya sebagai bagian dari Komisi VIII DPR dan Panja



Menteri Agama, Yaquut Cholil Qoumas



Kepala BPKH, Fadlul Imansyah

Kementerian Agama untuk penyelenggaraan ibadah haji 2023 adalah 30 persen dari nilai manfaat dan 70 persen dari Bipih sudah ideal demi menjaga keberlangsungan keuangan haji.

"Maka, usulannya 70:30. Ini sudah pas dengan angka-angka tahun sebelumnya berdasarkan rata-rata nilai manfaat yang dibagikan," ujarnya.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, mengatakan, kenaikan biaya pe-

Amerika Serikat.

"Saat kami tetapkan biaya haji yang ditanggung calon jemaah, semoga angkanya proporsional. Syukur-syukur nilainya di bawah Rp15.000 per Dolar Amerika Serikat," kata Hilman di Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023.

Sementara itu, Hilman menyampaikan harga tiket pesawat untuk ibadah haji pada tahun ini naik menjadi Rp29 juta per orang. Oleh karena itu, Hilman berencana untuk berdiskusi lebih lan-

Haji akan membahas secara detail dan transparan, sehingga nantinya keputusan terkait ongkos haji tidak memberatkan masyarakat.

"Kami harus berhitung agar uang haji atau uang yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) itu tetap sehat untuk keberlangsungan pelaksanaan ibadah haji di masa-masa yang akan datang," ungkapnya.

Wakil Ketua Umum PAN itu meminta Kementerian Agama, termasuk Panja Haji, serius memelototi semua item yang menyangkut besaran ongkos haji tersebut.

"Misalkan, apa benar tiket pesawat itu Rp33 juta, apa masih bisa ditekan turun. Menurut saya sih harusnya bisa. Kemudian hotel, katering, dan lain sebagainya," sambung Yandri.

Sebelumnya, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq F Al Rabiah, menandatangani kesepakatan kuota haji Indonesia 1444 Hijriah/2023 Masehi di Kota Jeddah, Arab Saudi, Minggu, 8 Januari 2023.

Kuota itu terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Adapun untuk petugas, tahun ini mendapat 4.200 kuota.

Dalam pertemuan tersebut, Yaqut dan Tawfiq juga menyepakati untuk meniadakan ketentuan batasan usia bagi jemaah haji yang diberangkatkan tahun ini. Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi menerapkan batasan usia jemaah haji di bawah 65 tahun pada pelaksanaan haji 2022 dengan tujuan meminimalkan penularan COVID-19 dan tahun ini sudah tidak berlaku.

"Sesuai kesepakatan, tahun ini sudah tidak ada pembatasan usia jemaah haji. Artinya, jemaah 65 tahun ke atas juga dapat berangkat haji tahun ini," ujar Yaqut.

Kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi juga mencakup pengaturan pendaratan pesawat pengangkut jemaah haji di Kota Jeddah dan Madinah serta pelaksanaan kebijakan-kebijakan baru mengenai pelayanan haji.

Dalam pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Yaqut juga melobi penambahan kuota jemaah haji bagi Indonesia guna memperpendek

masa antri berangkat berhaji yang sudah sangat panjang di Indonesia.

Di samping itu, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi menyampaikan bahwa negaranya mengedepankan keselamatan dan kenyamanan jemaah dalam menyelenggarakan pelayanan haji.

"Kenyamanan dan keselamatan ini prioritas. Namun saya katakan, Indonesia akan selalu mendapatkan prioritas dalam memperoleh kuota tambahan," kata Tawfiq.

Mengenai permintaan tambahan kuota jemaah haji bagi Indonesia, dia mengatakan mungkin ada negara yang mengurangi jemaah hajinya, sehingga kuota bisa diberikan ke Indonesia.

Tawfiq menyampaikan bahwa transformasi penyelenggaraan pelayanan haji di Arab Saudi sampai sekarang masih berlangsung. Saat ini, pelayanan haji di Arab Saudi tidak lagi dilakukan oleh muassasah, tetapi syarikah atau perusahaan. Ada enam syarikah yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pelayanan haji 2023 dan setiap negara bisa memilih syarikah penyedia layanan yang ditunjuk.

"Sehingga akan ada kesempatan untuk mendapatkan harga terbaik. Saya juga meminta agar perjanjian dibuat dengan detail agar dapat memberikan layanan terbaik juga. Jika detail, ini akan menjadi pegangan ketika syarikah melanggar. Jika mereka melanggar, kami bisa memberikan sanksi," ujar Tawfiq. •



Dirjen PHU Kemenag, Hilman Latief



PUTRA MAHKOTA PENDUKUNG JOKOWI

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei yang dilakukan dalam tiga periode, yaitu Juni 2022, September 2022, dan Januari 2023. Hasilnya, muncul dua segmen pemilih berbeda dalam Pilpres 2024.

Direktur Eksekutif LSI Denny JA, Denny Januar Ali, mengatakan, berdasarkan data LSI pada Januari 2023, ada 65,4 persen responden yang puas dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Dari 65,4 persen itu, 38,2 persen mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pengganti Joko Widodo.

Kemudian, dari 65,4 persen mereka yang puas dengan Jokowi, cuma ada 21,3 persen yang memilih Prabowo Subianto. Dan hanya ada 10,6 persen yang memilih Anies Baswedan. Hasil cukup kontras terjadi ketika survei dilakukan ke segmen lain.

Sebab, dari 30,8 persen mereka yang tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi, hanya 7,4 persen yang menginginkan Ganjar sebagai capres. Sebanyak 21 persen menginginkan Prabowo menjadi capres, dan 40,1 persen lain menginginkan Anies menjadi capres.

"Kami melihat dua segmen pemilih yang berbeda, yang puas dan tidak puas, memiliki juaranya yang berbeda, tapi jarak dengan peringkat kedua ketiga sudah dua digit," kata Denny, Selasa, 24 Januari 2023.

Selain itu, LSI menemukan angka dukungan itu kian meningkat.

Misalnya, dukungan untuk Ganjar dari mereka yang puasterhadap pemerintahan

Jokowi naik dari 27,4 persen pada Juni 2022, 32 persen pada September 2022, dan 38,2 persen pada Januari 2023.

Menurut Denny, hal ini menunjukkan kalau suka tidak suka, Ganjar menjadi semacam putra mahkota dari hati pendukung Jokowi. Kondisi serupa turut dialami Anies yang semakin menyerap suara mereka yang tidak puas terhadap pemerintahan Jokowi.

Sebab, dukungan dari mereka yang tidak puas terhadap pemerintahan Jokowi kepada Anies Baswedan baru 29,7 persen pada Juni 2022. Kemudian, dukungan itu naik pada September 2022 dengan 35,6 persen, dan menjadi 40,1 persen pada Januari 2023.

"Suka tidak suka, di hati pemilih yang tidak puas atas pemerintahan Jokowi, Anies menjadi calon putra mahkota mereka," ujar Denny.

LSI Denny JA juga memprediksi Pemilu 2024 menjadi pertarungan sengit antara kubu yang akan melanjutkan legacy Presiden Jokowi dengan kubu yang menginginkan perubahan.

"Banyak isu berputar. Ada isu yang paling keras untuk membelah Indonesia. Apakah akan lahir pemimpin yang melanjutkan legacy Jokowi. Atau pemimpin yang membawa isu perubahan," ujar Denny.

Denny menyebut, ada tiga sosok capres yang kokoh elektabilitasnya, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Selain itu, ada empat king maker yang sangat memengaruhi Pemilu 2024, yakni antara Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, dan Surya Paloh.

Keempat pemimpin partai politik ini amat berpeluang menghasilkan, baik dua ataupun tiga pasangan capres-cawapres, yang dapat berkompetisi di Pilpres 2024.

"Nasdem, Demokrat, dan PKS menyuarakan isu perubahan. Jadi desakan pada Nasdem, tarikan koalisi baru semakin keras. Partai-partai koalisi lama yang ada di pemerintahan Jokowi akan mencari cara agar Anies Baswedan gagal capres atau Nasdem keluar dari koalisi," ucap Denny.

Dua atau tiga bulan ke depan sampai pendaftaran capres di September 2023, Denny memprediksi tarikan antara dua kubu tersebut akan sangat keras.

"Karena ada yang berupaya melanjutkan legacy Jokowi, dan ada yang anti tesa terhadap Jokowi," tuturnya.

Apalagi, Partai Nasdem tidak akan sukarela menarik menteri-menterinya di Kabinet Indonesia Maju. "Yang terjadi

Nasdem akan bermain cantik dengan menyerahkan bola kepada Jokowi, terserah Jokowi mau di reshuffle atau tidak," ujarnya. ●



GANJAR MAKIN MELESAT ANIES-PRABOWO BERSAING KETAT

Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil simulasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pemilihan sampel dilakukan kepada 1.221 responden dengan metode random digit dialing (RDD) atau proses pembangkitan nomor secara acak. Adapun margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Wawancara survei dilakukan melalui telepon.

Dalam laporan hasil survei nasional yang dilakukan pada 7-11 Januari 2023 kepada 1.221 responden melalui metode random digit dialing (RDD) itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, masih menjadi pilihan terban-
yak jika pemilihan presiden (pilpres) diselenggarakan hari ini.

Elektabilitas Ganjar Pranowo yang juga kader PDIP itu berada di angka 27,2 persen.

Sementara itu, kandidat capres Pemilu 2024 lainnya, yakni mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berada di angka 16,8 persen. Anies bersaing ketat dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dengan elektabilitas sebesar 16 persen.

"Seperti biasa yang unggul adalah Ganjar Pranowo 27 persen, diikuti oleh Anies Baswedan

sekitar 17 persen, lalu Prabowo Subianto 16 persen," kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, dalam pemaparan hasil survei, Minggu, 22 Januari 2023.

Selain ketiga nama tersebut, kata Djayadi, ada juga nama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dengan 7,2 persen dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dengan 2,4 persen.

Kemudian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, dengan 2,1 persen, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dengan 1,8 persen, dan Menteri BUMN, Erick Thohir, di angka 1,3 persen.

Selanjutnya, ada nama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan elektabilitas 1,3 persen, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua DPR Puan Maharani dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo sama-sama berada di angka 1,0 persen.

Sementara itu, ada nama enam tokoh yang elektabilitasnya berada di bawah satu persen. Mereka adalah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, dan Ketua Majelis Per-

musyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo.

Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Djayadi menyatakan hasil survei Pilpres 2024 sedikit berbeda jika nama capres dikerucutkan menjadi 10 tokoh. Ganjar Pranowo disebut masih memimpin, tetapi Anies digeser oleh Prabowo Subianto di posisi kedua.

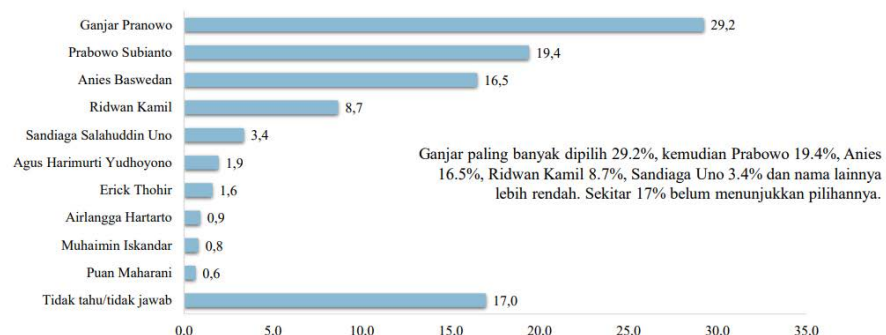
"Untuk 10 nama sedikit berubah di nomor 2 dan 3. Kalau 10 nama, Ganjar Pranowo masih di kisaran 29 persen, diikuti Prabowo, lalu Anies kisaran 16, 17 persen. Jadi Prabowo dan Anies saling kejar, tapi posisinya rebutan di posisi kedua tingkat dukungan yang mirip," ujar Djayadi.

"Simulasi 3 nama, maka Ganjar unggul sekitar 10 persen dibandingkan dengan pesaingnya nomor 2, yakni Anies 24,2 persen, diikuti oleh Prabowo. Jadi Prabowo sama Anies pada Januari 2023 ini berada pada posisi saling kejar atau pada posisi yang sama atau kompetitif," lanjutnya. ●

LSI
LEMBAGA
SURVEI
INDONESIA
akurat . terpercaya . berpengaruh

PILIHAN PRESIDEN [SIMULASI 10 NAMA]

Jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Ibu/Bapak pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut?... (%)





World Superbike (WSBK) Mandalika 2023

DISKON BESAR DI TAHUN KETIGA

Kejuaraan Dunia World Superbike (WSBK) akan kembali menyambangi Indonesia pada 3-5 Maret 2023 atau menjadi seri kedua musim ini. Seri kali ini perlu kerja keras penyelenggara karena waktunya yang berdekatan dengan musim lalu yang digelar 11-13 November 2022.

Satu hal yang menjadi kekhawatiran pada WSBK 2023 di Mandalika International Street Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), adalah terkait jumlah penonton. Pergeseran jadwal seri Indonesia, di mana pada dua edisi sebelumnya di akhir musim menjadi awal musim, kemungkinan akan membuat jumlah penonton yang datang ke sirkuit berkurang.

Jika dilihat dalam dua kali penyelenggaraan di Mandalika, tren jumlah penonton WSBK di sirkuit sepanjang 4,31 kilometer dengan 17 tikungan ini memang meningkat.

Pada 2021, karena masih dalam masa pandemi COVID-19, jumlah penonton dibatasi hanya 25 ribu orang.

Tahun lalu, jumlah penonton WSBK Mandalika menjadi yang terbanyak di antara seri lainnya, mencapai 51 ribu orang. Seri Mandalika mengalahkan jumlah penonton di Sirkuit Donington Park, Inggris, yang tercatat mencapai 42 ribu orang.

Kekhawatiran berkurangnya jumlah penonton pada seri WSBK Mandalika musim ini ternyata sudah diantisipasi oleh Mandalika Grand Prix Association (MGPA) dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Panitia penyelenggara mem-

berikan harga jual tiket dengan lebih murah, bahkan harga presale dijual dengan diskon 75 persen.

MGPA, ITDC, Pemerintah Provinsi NTB, hingga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), justru menargetkan peningkatan jumlah penonton, meski jarak dari WSBK 2022 hanya berselang empat bulan. 70 ribu penonton adalah target yang ingin dicapai panitia musim ini.

Direktur Operasi ITDC, Troy Reza Warokka, menyatakan melakukan review banyak hal penyelenggaraan selama dua tahun ke belakang. Dia optimistis target yang sudah disepakati bisa tercapai.

MGPA pun menyediakan diskon early bird sebesar 75 persen pada periode pembelian 12-30 Januari 2023 untuk semua kategori, yakni General Admission (GA), Regular Grandstand, dan Premium Grandstand.

Tiket di kelas termurah atau festival GA dijual Rp50.000 untuk harian, sedangkan 3 day pass hanya Rp62.500. Tiket regular grandstand Rp250.000 dan 3 day pass Rp312.500.

Sementara itu, tiket Premier Class dibanderol Rp5.500.000 dan Deluxe Class seharga Rp3.500.000. Tiket dapat dibeli melalui aplikasi Xplorin, Locket.com, Tiket.com, dan Mytours.

"Kemarin angka (target) kita 40 ribu, dan kita melewati itu. Kenapa enggak 100 ribu atau 80 ribu? Ini (70 ribu) menurut kami angka yang



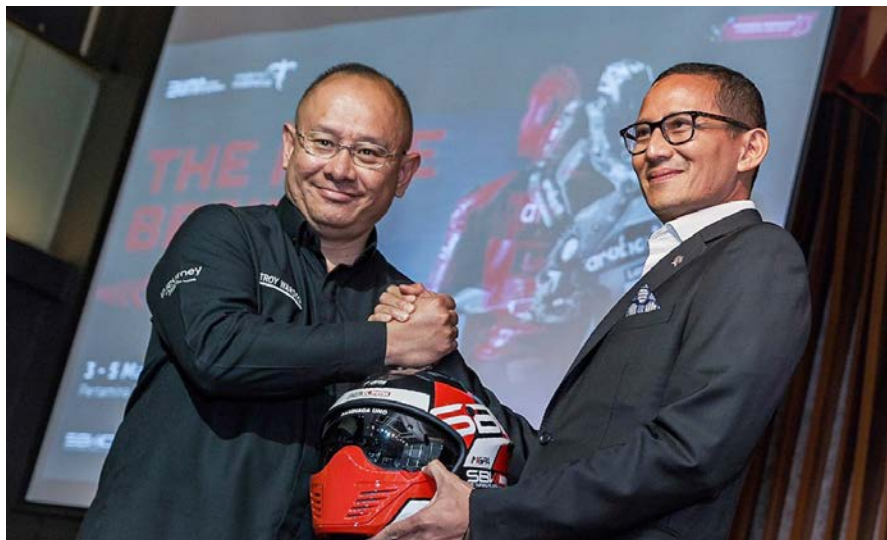
Harganya sudah cukup kompetitif, cukup bersahabat. Yang paling penting, keputusan presiden untuk mencabut pandemi itu adalah hal yang luar biasa.

cukup realistis," kata Troy saat konferensi pers di Jakarta, Kamis, 12 Januari 2023.

Troy mengatakan, harga tiket yang lebih murah, lalu dikemas dengan paket 3 hari yang lebih kompetitif dari tahun lalu merupakan upaya untuk mendorong masyarakat supaya datang lebih ramai ke Mandalika.

"Salah satunya kami menyiasati dengan memberikan 3 day pass, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi, kami mengharapkan bahwa ini langkah evaluasi kami dengan kami memberikan gimmick seperti itu. Penonton akan lebih antusias, dan hari ini pun kami lakukan informasi kepada publik lebih cepat mengetahui," ujarnya.





Pencabutan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga menjadi angin segar buat gelaran WSBK 2023. Maka, pihaknya meningkatkan target lebih tinggi.

"Harganya sudah cukup kompetitif, cukup bersahabat. Yang paling penting, keputusan presiden untuk mencabut pandemi itu adalah hal yang luar biasa," kata Troy.

"Pemerintah mendukung, menurut kami adalah momentum yang tidak bisa disia-siakan. Jadi dengan target 70 ribu, harga tiket yang kemudian turun, PPKM dicabut, kemudian iklimnya baik karena mudah-mudahan tidak hujan. Beberapa penerbangan sudah mulai normal, rasanya akan memudahkan para wisatawan, tidak hanya penggemar otomotif untuk da-

tang ke Mandalika," sambungnya.

Pekerjaan rumah lainnya adalah harga akomodasi dan penginapan. Sebab tarif kamar hotel jelang gelaran event internasional itu biasanya bisa naik berkali-kali lipat, sehingga disinyalir menjadi faktor penghambat keramaian WSBK. Misalnya, jelang WSBK di beberapa Online Travel Agent (OTA), kenaikan harganya menyentuh 3-4 kali lipat.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, sudah menyiapkan regulasi untuk menetapkan harga maksimal ketika gelaran berlangsung.

"Belajar dari MotoGP dan WSBK tahun lalu, kami bekerja sama dengan Asita dan beberapa rekan-rekan penyedia fasilitas akomodasi dan ekosistem parekraf. Kami buat regulasi yang bisa memberikan kepastian

harga tahun lalu, kami patok kenaikannya itu tidak boleh ugal-ugalan," kata Sandi.

"Tapi, ada panduan nanti disesuaikan ketersediaan akomodasi, karena banyak akomodasi yang dibangun sekarang di sekitar Mandalika, home-stay, villa, hotel-hotel. Nanti dilihat ini jumlahnya berapa, sampai di Gili mungkin nanti Mataram, Lombok Timur, setelah itu kami panggil semua pelaku parekraf agar harga ini tidak melonjak secara tajam, tapi ditambah pengalaman yang menyenangkan untuk wisatawan. Jadi, agar mereka tidak kapok dan balik lagi. Karena ini tiap tahun WSBK dan MotoGP tiap tahun, dan biasanya rentang naiknya 2-3 kali lipat," paparnya.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, Jamaluddin Maladi, mengatakan, pada awalnya ada tiga opsi usulan target jumlah penonton. ITDC dan MGPA menargetkan 60 ribu orang. Menparekraf menargetkan 75 ribu orang, dan Gubernur NTB targetkan 100 ribu orang. Namun, akhirnya diputuskan 75 ribu orang.

"Kenapa diputuskan 75 ribu orang, supaya wisatawan ke Lombok itu ramai. Seperti kata Pak Menteri, supaya orang Indonesia bangga dengan destinasi wisatanya sendiri," ujar Jamaluddin di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat.

"Jadi, WSBK 2023 nanti diharapkan bisa mengganggu kesuksesan WSBK pada November tahun lalu yang telah menarik minat lebih dari 51.629 orang penonton yang memadati sirkuit," terang Jamaluddin.

Selain itu, Pemprov NTB melalui Dinas Pariwisata, juga tidak akan berdiam diri. Bahkan, Kemenparekraf juga siap memberikan dukungan untuk itu. Hal ini juga sejalan dengan target kunjungan wisatawan asing ke Indonesia yang diharapkan bisa mencapai lima juta orang.

"Caranya bagaimana mengejar target itu, nanti seluruh destinasi wisata kita perbaiki, hospitality atau keramahan kita tingkatkan, begitu juga pelayanan hotel. Tadinya harga hotel mahal kita turunkan, hotel penuh ada homestay. Jadi, kita akan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pihak," ujarnya. •





Berebut Kursi Ketua PSSI

SEPAK BOLA DI TANGGA ISTANA

Sepak bola ibarat gula. Komoditas yang sangat berharga. Survei Nielsen pada 2022 menyebut, 69 persen penduduk Indonesia menggemari sepak bola. PSSI sebagai induk sepak bola adalah representasi dari Indonesia. Artinya, olahraga ini sangat strategis untuk mendorong citra dan popularitas.





Per 16 Februari 2023, PSSI sudah dijadwalkan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memilih ketua umum, wakil ketua umum, serta komite eksekutif (exco) untuk periode 2023-2027. KLB ini lebih cepat dilaksanakan dari yang seharusnya di akhir tahun ini karena adanya Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 yang merenggut nyawa ratusan orang yang hadir saat laga Arema FC melawan Persebayu Surabaya.

Pemilihan ketua umum PSSI nanti diyakini tak hanya jadi pertarungan untuk menjadi nomor satu di federasi sepak bola. Lebih dari itu, posisi ketua umum PSSI bisa menjadi batu loncatan untuk agenda yang lebih besar.

Seperti diketahui, 2023 menjadi tahun politik menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, baik Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, hingga Pemilihan Kepala Daerah. Para kandidat yang berhasrat untuk berkuasa tentu butuh lebih dari sekadar kendaraan politik, mereka perlu posisi yang bisa meningkatkan popularitasnya di masyarakat. Dengan banyaknya pecinta sepak bola di Tanah Air, posisi ketua umum PSSI tentu saja

menjadi sangat "seksi".

Saat ini, lima nama sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum PSSI. Mereka adalah Menteri BUMN, Erick Thohir; Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti; CEO Bandung Premier League, Doni Setiabudi; CEO Nine Sports, Arif Putra Wicaksono; dan Ketua Komsis DPR RI, Fary Djemy Francis.

Di antara lima calon tersebut, Erick Thohir dan La Nyalla Mattalitti, disebut jadi yang punya peluang lebih besar dibanding tida kandidat lainnya. Apalagi, keduanya adalah pejabat negara yang saat ini tengah menjabat. Erick dan La Nyalla juga sama-sama mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketum PSSI di Kantor PSSI, GBK Arena, Jakarta, Minggu, 15 Januari 2023.

Profil Erick dianggap mumpuni untuk mengemban jabatan tersebut. Terlebih, dia sudah malang-melintang di industri sepak bola, khususnya di luar negeri.

Saat melakukan pendaftaran, Erick mengungkapkan kalau dirinya merasa terpenggil untuk mengubah keadaan dunia persepakbolaan di Tanah Air. Dia ingin membuat yang 'bengkok' menjadi lurus.

"Yang dibutuhkan PSSI untuk maju hari ini adalah nyali untuk menerobos keterbatasan, dan berani menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri sepak bola nasional," kata Erick.

Dia menambahkan, Indonesia butuh nyali untuk bisa bersaing dengan negara lain, untuk bertarung, dan menang di gelanggang internasional.

Menurutnya, banyak potensi kemajuan yang belum muncul jadi kekuatan karena disinyalir banyak pihak yang mempengaruhi kepemimpinan PSSI.

Dia mengatakan, masalah sepakbola Indonesia dari dulu tak pernah berubah. Dia menyoroti pembinaan usia muda yang tak berjalan dengan baik, serta pengelolaan kompetisi liga yang semrawut. Dia juga menyorot persoalan integritas dan fair play dalam kompetisi, serta industri sepakbola yang tidak profesional.

Erick meyakini, mencari 11 orang dari 270 juta rakyat Indonesia untuk membentuk tim nasional yang kompetitif tidak sulit jika semua hal itu dibenahi dengan benar. Namun, membenahi sepak bola bukan hanya urusan teknis,

seperti taktik atau formasi, melainkan juga urusan manajerial, bisnis, dan penegakan hukum.

Erick diketahui merupakan pengusaha yang memiliki minat besar terhadap olahraga, termasuk sepak bola. Hingga saat ini, Erick sudah terlibat dalam sejumlah klub sepak bola, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Tercatat, dia pernah menjabat sebagai Presiden Inter Milan, pemegang saham mayoritas DC United dan Oxford United, serta menjadi pemegang saham di Persis Solo. Keterlibatannya mampu meningkatkan performa klub.

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, meyakini Erick telah mendapat izin dari Presiden Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai pembantu tugas presiden di pemerintahan.

Menurut Pramono, meski telah mendapat izin dari Presiden, bukan berarti pemerintah mendukung Erick sebagai calon Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Pramono memastikan Kepala Negara tidak akan mengintervensi proses pemilihan tersebut.

"Enggak mungkin Erick maju tanpa izin presiden, sehingga beliau secara resmi sudah ajukan diri jadi calon Ketua Umum PSSI periode 2023-2027," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 16 Januari 2023.

Pramono menyampaikan, dengan pencalonan Erick sebagai ketua umum PSSI, para pihak yang memiliki hak pilih punya kewenangan penuh menentukan pilihan.

Sementara itu, La Nyalla merupakan Ketua Umum PSSI Periode 2015-2019, sehingga dibandingkan Erick, dia lebih punya pengalaman dalam kepengurusan sepak bola Tanah Air. Meskipun, secara prestasi cukup sulit untuk menilainya. Sebab, saat La Nyalla menjabat, PSSI dibekukan oleh FIFA, buntut intervensi yang dilakukan oleh pemerintah.

Batu Loncatan Karir

Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI untuk pemilihan pengurus PSSI periode 2023-2027 pada 16 Februari 2023 mendatang, menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya, pejabat tinggi publik, pengusaha, selebritas, hingga legenda sepak bola, berlomba-lomba mengadu peruntungannya untuk menjadi nak-

hoda ataupun masuk kabinet baru PSSI.

Selain hadirnya Erick dan La Nyalla, posisi bakal calon Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI juga diramaikan selebritas kondang, Raffi Ahmad.

Raffi dan Erick, yang berada dalam satu koalisi, adalah orang-orang baru di bursa pencalonan pengurus PSSI. Kedua tokoh publik itu sudah punya popularitas, tahta, dan harta, yang tidak bisa dilihat sebelah mata, bahkan hanya bisa diimpikan mayoritas orang.

Pertanyaannya, mengapa mereka harus susah payah turun gunung untuk mencoba mengurus PSSI dan sepak bola nasional yang selama ini dikenal sarat persoalan, alih-alih prestasi?

Lalu, Edi Rahmayadi, Ketua Umum PSSI periode 2016-2019, mewujudkan ambisinya menjabat Gubernur Sumatera Utara. Dia bahkan sempat merangkap jabatan publik itu dengan Ketua Umum PSSI karena memang tak ada larangan tertulis di dalam Statuta PSSI. Jejak Edy disebut ingin ditiru Mochamad Iriawan yang sangat berminat menjadi Gubernur Jawa Barat.

Hal ini bisa saja dimanfaatkan oleh Erick Thohir dan La Nyalla Mattalitti, yang dalam beberapa waktu belakang memang santer diusulkan menjadi kandidat calon presiden maupun calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Dengan menjadi ketua umum PSSI, terlebih jika



Mengejar gaji ataupun harta agaknya tidak masuk alasan mereka. Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan, menyebut, jajaran Exco PSSI tidak menerima gaji.

Namun, sejarah berbicara, posisi nomor satu di PSSI biasanya menjadi batu loncatan untuk karir yang lebih tinggi. Berkat pengalaman pelik di PSSI, yaitu ketika dibekukan pemerintah, La Nyalla bisa meraih jabatan Ketua DPD, meskipun dia sempat didakwa kasus korupsi yang lantas tidak terbukti.

Ketua Umum PSSI 2011-2015, Djohar Arifin, berhasil ke Senayan sebagai Anggota DPR setelah meninggalkan PSSI.

bisa mengangkat prestasi tim nasional dan memperbaiki semrawutnya kompetisi, para pencinta sepak bola Tanah Air bukan tidak mungkin dengan senang hati memberikan dukungannya.

Koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali, berharap Erick Thohir dan La Nyalla Mattalitti tak menjadikan posisi Ketua PSSI hanya sebagai batu loncatan.

Dia mengatakan, nama keduanya sebenarnya cukup kompeten untuk memimpin PSSI. Namun, ada kans baik Erick maupun La Nyalla berpotensi membidik posisi politik.

Akmal mengatakan, nama Erick saat ini masuk bursa sebagai calon Wakil

Presiden pada Pemilu 2024. Sementara itu, LaNyalla telah berancang-ancang untuk mendapatkan kursi pada pemilu selanjutnya.

"Jangan sepak bola kita jadi batu loncatan dan enggak jadi prioritas. Jangan sampai pemilihan Ketua Umum PSSI, tapi tujuannya Pemilu 2024," kata Akmal dikutip dari Katadata.co.id, Kamis, 19 Januari 2023.

Akmal mengatakan, praktik tersebut bukan lagu baru dalam sejarah PSSI. Akmal pun mencontohkan Edy Rahmayadi yang rangkap jabatan sebagai Gubernur Sumatra Utara periode 2018-2023 dan Ketua Umum PSSI periode 2016-2020, sebelum akhirnya mengundurkan diri pada 2019. Dia juga menyebut Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan yang sempat santer dikabarkan mengincar posisi Gubernur Jawa Barat.

merujuk pada nama Iriawan dan Edy.

Sementara, pengamat sepak bola, Kesit Budi Handoyo, mengatakan, Erick memiliki pengalaman yang kuat untuk memimpin PSSI hingga 2027. Pasalnya, Erick pernah menjadi Presiden Inter Milan pada 2013. Erick juga pernah mengurus Persija dari balik layar saat Sutiyoso menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007. Ia juga pernah menjadi Wakil Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat.

Namun, Kesit menilai potensi PSSI menjadi batu loncatan politik untuk Pemilu 2024 oleh Erick cukup besar. Ia khawatir jika fokus Ketua Umum terpecah, maka kejadian buruk seperti Tragedi Kanjuruhan bisa berulang.

"Kalau figur Ketua Umum PSSI punya agenda lain, dalam hal ini perpolitikan nasional, siap-siap saja kita akan meng-

ketum PSSI. Apalagi, bos Mahaka Group ini pernah menjadi Presiden Inter Milan.

"Jadi dia cukup tahu persoalan-persoalan dunia sepak bola Indonesia," tuturnya.

Wartawan senior olahraga ini mengatakan, Erick Thohir bisa memberikan dampak yang positif dan perubahan bagi sepak bola di Indonesia.

"Memiliki hubungan dengan dunia Internasional, khususnya dunia sepak bola Eropa," ujarnya.

Sementara itu, La Nyalla juga menjadi kandidat kuat pengisi kursi ketum PSSI. Ketua DPD RI ini juga cukup memahami tentang sepak bola.

"Dia kan mantan pengurus PSSI walaupun belum bisa dikatakan berhasil. Karena, dia (La Nyalla) berhenti di tengah jalan," tuturnya.

Berhentinya La Nyalla saat menjabat Ketua Umum PSSI, buntut dari pembekuan PSSI oleh FIFA. Jadi, kata Kesti, sulit menilai keberhasilan La Nyalla saat menjabat kala itu.

"Jadi untuk menilai secara umum sepak terjangnya di sepak bola berhasil atau tidak ya belum bisa. Bahwa di tahu permasalahan sepak bola Indonesia itu iya," ujarnya.

Anggota Komisi X DPR, Robert J Kardinal, meminta para pejabat negara tidak ikut cawe-cawe dalam kepengurusan PSSI. Menurutnya, anjloknya prestasi sepak bola Indonesia saat ini karena diurus oleh orang-orang yang sama sekali tidak kompeten. Masuk PSSI cuma kejar jabatan dan juga popularitas.

"Sepak bola kita ini sudah berpuluh-puluh tahun, persoalannya ya itu-itu saja dan tidak pernah ada perbaikan. Itu karena sepak bola kita dikelola orang-orang yang sama sekali bukan di bidangnya. Masuk PSSI cuma kejar jabatan, kejar popularitas," kata Robert dalam keterangannya, Senin, 16 Januari 2023.

Politisi asal Papua Barat ini mencermati jabatan ketua umum dan jajaran pengurus PSSI selama ini justru ditempati oleh orang-orang yang sebenarnya sepanjang karirnya justru tidak pernah berurusan dengan sepak bola. Bahkan mengelola klub pun tidak pernah.

"Akhirnya (kelola sepak bola) pakai duit negara pun tidak berhasil. Sponsor kabur, pengusaha juga ogah jadi sponsor karena sepak bola kita dikelola



Anggota Komisi X DPR, Robert J Kardinal

Oleh karena itu, Akmal berharap Erick dan La Nyalla menyatakan komitmen tertulis untuk tidak menjadikan PSSI sebagai batu loncatan politik.

Di sisi lain, Akmal menilai Erick dan La Nyalla memiliki latar belakang dan pengalaman yang cukup untuk menjadi Ketua Umum PSSI selanjutnya.

Akan tetapi, anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan ini menilai, latar belakang dan pengalaman saja belum cukup untuk menjadi Ketua Umum PSSI.

"Kemampuan Erick dan La Nyalla untuk memimpin sepak bola untuk memerangi mafia sepak bola harus diuji. Pasalnya, dua tahun terakhir, dua jenderal bintang dua tumbang," kata Akmal

hadapi masalah yang sama," kata Kesit.

Kesit juga mengatakan, kedua tokoh tersebut sangat dipercaya dapat menjabat posisi Ketua Umum PSSI. "La Nyallah dan ET (Erick Thohir) sama-sama favorit. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan," kata Kesit kepada Info Indonesia, Selasa, 17 Januari 2023.

Erick Thohir dengan segudang pengalamannya berkecimpung di dunia olahraga menjadikan dirinya kandidat kuat pengisi kursi nomor satu di PSSI. Awalnya, Erick berkecimpung di dunia basket. Selain itu, dia juga dinilai aktif dalam perkembangan sepak bola di Tanah Air meski jarang terekspor.

Kesit menilai, Erick cukup memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjabat

serampangan. Jangankan berprestasi di Asia Tenggara, lawan Vietnam yang sepak bolanya baru bangkit kita pun tidak pernah menang," ujarnya.

Dia pun meminta PSSI belajar dari negara-negara lain yang sukses dalam mengelola sistem olahraga sepak bolanya. Mereka bisa maju karena sepak bola dikelola secara profesional oleh orang-orang yang jiwa dan raganya memang sudah di sepak bola.

"Mereka ini para pemain, pelatih, dan pihak lainnya yang memang setiap harinya bergelut di industri sepak bola. Jadi bukan karena punya jabatan, punya uang, lalu mendadak daftar dan jadi ketua umum PSSI. Akhirnya sepak bola kita prestasinya jadi hancur," tegasnya.

Politisi senior Golkar ini menilai, banyak cara untuk ikut berkontribusi dalam mendukung kemajuan sepak bola Indonesia tanpa harus duduk di PSSI.

"Kalau mau support, ya dalam bentuk lain, misalnya jadi sponsor, berikan pendanaan atau bentuk lainnya. Tapi tidak perlu jadi ketua umum. Itu namanya gotong royong," ujarnya.

Dia pun menyayangkan masih ada pejabat negara yang ikut cawe-cawe dalam bursa ketua umum PSSI. Padahal, dia punya tugas negara lebih besar di jabatan tersebut. Menurutnya, prestasi sepak bola akan sulit diraih jika masih terus diseret ke urusan politik.

"Sebaiknya (Ketua Umum PSSI) ini diberikanlah kepada para mantan-mantan pemain bola, pelatih, atau memang yang kompeten urus PSSI. Jiwa dan raganya benar-benar di sepak bola, tidak berpikiran politik, cari duit, cari popularitas," ujarnya.

Menurutnya, negara ini harus belajar kepada negara-negara seperti Jerman, Belanda, Brasil, Spanyol, Inggris, Argentina dan lainnya yang sudah sangat maju sepak bolanya. Sepak bola mereka maju bukan hanya karena dukungan iklim dan kompetisi yang bagus, tapi memang pengurus PSSI-nya diemban oleh pihak-pihak yang sangat kompeten. Dalam arti, jiwa dan raganya memang sudah di sepak bola.

"Di Jerman itu (PSSI-nya) Franc Beckenbauer, di Belanda ada Ruud Gullit, jadi di mana-mana itu pemain bolanya jadi ketua umum. Di sini, karena para (mantan) pemainnya tidak punya duit, tidak

punya dukungan politik, pangkat dan jabatan, jadilah mereka semua diam. Karena sistem juga," ujarnya.

Untuk itu, dia meminta pemerintah dan semua pihak untuk berbesar hati mendukung para pemain profesional sepak bola untuk duduk di kursi PSSI. Menurutnya, banyak mantan pemain top yang sebenarnya bisa maju mengurus sepak bola dalam negeri, seperti Boas Solossa, Bambang Pamungkas, Kurniawan Dwi Yulianto, Robi Darwis, Aji Santoso, dan lainnya.

"Ayo kembalikan sepak bola kita kepada yang benar-benar mencintai dan mengerti sepak bola," pungkasnya.

Jangan Dipolitisasi

Founder Football Institute, Budi Setiawan, meminta agar pencalonan Menteri BUMN, Erick Thohir dan, Menteri

tik nadir dari kesabaran masyarakat yang telah cukup bersabar melihat kondisi persepakbolaan kita hari ini," kata Budi dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, 28 Januari 2023.

Tampilnya dua menteri tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menjawab ekspektasi besar masyarakat dengan keseriusan membenahi sepak bola dari top level. "Keduanya tentu telah memperoleh izin dari Presiden Jokowi untuk menyelesaikan PSSI secara serius dan menyeluruh," sambungnya.

Budi menambahkan, kehadiran kedua menteri ditambah satu orang wakil menteri dalam bursa Ketum, Waketum dan Anggota Komite Eksekutif PSSI menunjukkan tren meningkatnya ekspektasi atau harapan stakeholder ke pemerintah.

"Hal itu juga perlu dilihat sebagai



Pengamat Sepak Bola, Kesit Budi Handoyo

Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, yang mendapatkan dukungan voter untuk maju dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 tidak dipolitisasi.

Menurutnya, baik Erick Thohir dan Zainudin Amali murni untuk memajukan PSSI dan sepak bola Indonesia. Sehingga, isu yang bergeser ke politik akan mencederai semangat sportivitas, pluralism, persatuan dan integritas dalam sepak bola.

Budi mengatakan, masyarakat justru berekspektasi kepada pemerintah agar secara serius membenahi sepak bola nasional, terutama pasca tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan jiwa.

"Tragedi Kanjuruhan ini merupakan ti-

langkah serius Presiden Jokowi untuk membenahi kinerja dan kompetensi pengurus PSSI secara khusus dan persepakbolaan nasional secara umum," ujarnya.

Budi berharap, dengan posisi sebagai pejabat publik yang memiliki jejaring kerja kemitraan luas, maka akan mempermudah proses penyelesaian masalah sepak bola di Tanah Air. Apalagi, menteri-menteri itu juga bukan orang baru dalam dunia olahraga dan kepemudaan.

Erick Thohir punya pengalaman dan kapasitas manajerial sepak bola modern. Zainudin Amali juga cukup senior dan pandai dalam membuka jaringan komunikasi dan kolaborasi dengan banyak pihak, khususnya di dalam negeri. ●



9 TREN WISATA YANG AKAN BOOMING SEPANJANG 2023

Pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022 diyakini akan membuat tren perjalanan wisata pada 2023 kembali bangkit.

Selama masa pandemi tiga tahun terakhir, masyarakat terpaksa harus menahan hasrat pergi ke berbagai negara. Terlebih jika melihat banyak negara yang membuka kembali perbatasan dan menghapus persyaratan Covid-19 dan diprediksi akan terjadi lonjakan traveler di seluruh dunia.

Sebenarnya, situasi ini sudah mulai terlihat sejak akhir 2022. Namun, kini traveler sudah mempersiapkan secara matang untuk perjalanan dibandingkan sebelumnya. Apalagi, setelah melewati masa-masa penuh tekanan, ketidakpastian, pembatasan, dan merepotkan selama pandemi Covid-19.

Menurut Travel Off Path, beberapa tren traveling diprediksi akan booming di 2023.

Negara Tanpa Pembatasan Perjalanan

Traveler kini sudah tidak mau terikat





• INFO WISATA

pada pembatasan perjalanan. Jadi, memilih tujuan wisata yang tidak ada pembatasan perjalanan, tes Covid-19, vaksinasi dan karantina menjadi pertimbangan utama. Sudah banyak juga negara di dunia yang telah mencabut kebijakan pembatasan tersebut.

Berdasarkan data Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), ada 117 negara yang telah membebaskan larangan perjalanan dari luar negeri terkait Covid-19 sejak 12 Desember 2022. Mayoritas atau 46 negara yang mencabut pembatasan perjalanan terkait Covid-19 berada di Eropa.

Bahkan, penghapusan pembatasan akibat pandemi dan mulai hidup normal sudah diterapkan di Eropa sejak Februari 2022, diawali dengan pemerintah Denmark pada September 2021.

Denmark juga berhenti menyebut Covid-19 sebagai penyakit kritis, pemerintah tak akan lagi memiliki dasar hukum untuk memberlakukan pembatasan yang luas. Kemudian diikuti oleh negara-negara di Eropa lainnya.

Di Amerika, ada 30 negara yang telah mencabut kebijakan tersebut. Lalu, terdapat 17 negara di Afrika yang telah membebaskan pembatasan perjalanan terkait Covid-19.

Hal serupa juga telah diberlakukan di 15 negara di Asia pasifik, hanya sembilan negara di Timur Tengah yang telah mencabut pembatasan perjalanan yakni Bahrain, Mesir, Irak, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Yaman.

Paket Wisata Lengkap

Sebagian traveler kini sudah tidak mau dibuat ribet dengan apapun, sehingga paket liburan lengkap yang ditawarkan jasa perjalanan menjadi solusi.

Paket wisata merupakan produk perjalanan yang dijual oleh suatu perusahaan biro perjalanan atau perusahaan transportasi. Harga paket wisata tersebut telah mencakup biaya perjalanan, hotel ataupun fasilitas lainnya, lama waktu wisata dan tempat yang akan dikunjungi, akomodasi, transportasi, serta makanan dan minuman telah ditentukan oleh biro perjalanan

dalam suatu harga yang telah ditentukan jumlahnya.

Komponen wisata meliputi fasilitas-fasilitas yang terlibat dalam penyelenggaraan wisata, di mana wisata terjadi karena adanya keterpaduan antara berbagai fasilitas yang saling mendukung dan berkesinambungan.



Adapun komponen wisata meliputi sarana transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, dan atraksi wisata. Sarana hiburan, toko cinderamata hingga pramuwisata dan pengatur wisata (guide dan tour manager).

Konser

Sebelumnya, konser-konser dilakukan secara virtual mulai digelar secara langsung. Audio menggelegar dan pemandangan sang idola langsung di depan mata bisa kembali dinikmati.

Pada 2023, diperkirakan konser

masih akan terus digandrungi, apalagi sederet daftar tour artis yang mampir ke Indonesia terus diumumkan, baik itu musisi lokal maupun internasional.

Co-Founder & Chief Marketing Officer tiket.com, Gaery Undarsa, pada Desember lalu mengatakan animo konsumen untuk menonton konser

sangat tinggi bila dilihat dari pemesanan di platformnya.

"Kalau tahun 2023 kita lihat ada beberapa (acara) cukup besar, kita coba dan yakin akan lebih besar dari 2022 terutama untuk event-event dan konser-konser ini," kata Gaery.

Salah satu yang dinanti tentunya adalah konser dari para artis K-pop yang beberapa tahun belakangan sangat digilai di Tanah Air.

Menurut Gaery, bukan cuma acara musik yang melibatkan artis internasional, festival yang diramalkan oleh

musisi Indonesia juga kembali naik daun di tengah situasi yang mulai kembali kondusif.

Solo Traveling

Tren solo traveling akan terus berkembang di sepanjang 2023. Ada begitu banyak alasan mengapa beper-

belajar tentang budaya dan sejarah tempat tertentu. Destinasi yang kaya akan tradisi seperti Yordania, Meksiko, dan banyak negara Eropa. Sehingga, memudahkan wisatawan untuk menikmati liburan ke luar negeri sambil belajar lebih banyak tentang dunia yang ditinggali bersama.



gian sendirian adalah ide bagus, untuk belajar lebih banyak tentang diri kamu dan mendapatkan kepercayaan diri.

Bepergian sendiri menjadi lebih terbuka untuk bertemu dengan orang baru dan benar-benar membenamkan diri di tempat tujuan. Bepergian tanpa pendamping juga memberikan kebebasan untuk menjelajahi rencana perjalanan sesuai jadwal sendiri.

Destinasi Budaya dan Sejarah
Traveler akan memiliki destinasi berdasarkan keinginan mereka untuk

Kunjungan Beberapa Negara dalam Satu Tujuan

Untuk memaksimalkan waktu luang, traveling ke beberapa negara dalam satu tujuan adalah cara terbaik. Karena sudah diketahui bahwa seberapa mudah dan cepat kesempatan travelling dapat diambil, maka memanfaatkan waktu yang kita miliki untuk menjelajah adalah hal yang populer.

Eropa sangat bagus untuk tren ini, karena jarak negara yang dekat dan kemudahan perjalanan dengan kereta api.

Perjalanan Secara Group dengan Influencer

Media sosial kini semakin canggih dan terdepan, seperti banyaknya influencer perjalanan dari TikTok, Instagram dan blog perjalanan kini menawarkan tur group yang dikurasi kepada pengikut.

Meskipun tur bervariasi menurut influencer kepada pengikut yang bisa menyatukan orang-orang yang berpikiran sama untuk mengejar pengalaman perjalanan yang menarik yang mereka lihat di media sosial.

Workcation atau Business Leisure

Situasi pasca-pandemi COVID-19 menciptakan pola kerja yang lebih fleksibel, di mana orang-orang tak lagi harus bekerja dari kantor. Hal ini juga berdampak pada munculnya tren workcation yang memungkinkan seseorang bekerja atau menjalani aktivitas bisnisnya sembari liburan.

Terlebih situasi ini juga telah didukung pemerintah yang mulai mengeluarkan kebijakan visa digital nomad yang memungkinkan para pekerja jarak jauh (remote worker) datang ke Indonesia untuk bekerja sambil liburan.

Glamping & Hidden Gems

Selain itu, tren wellness tourism yang menawarkan konsep wisata dengan tujuan untuk menjaga dan memelihara kesehatan mental dan jasmani diperkirakan akan terus berlangsung sepanjang 2023 nanti.

Masyarakat di perkotaan akan semakin tertarik bepergian menuju destinasi alam dan glamping di layanan akomodasi yang juga menawarkan pengalaman inap di tengah alam untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari sekaligus menenangkan pikiran.

Selain itu, tren travelling ke sejumlah destinasi alam cantik yang belum diketahui banyak orang (hidden gems) juga akan tumbuh, terutama di kalangan Gen-Z yang tertarik mengeksplorasi hal-hal baru dan menjadikan destinasi alam sebagai destinasi favorit mereka. ●



Kehidupan selebritis tidak luput dari konsumsi publik. Setiap gerak gerik artis selalu menjadi sorotan. Bahkan, kisah percintaan dan rumah tangga sengaja diumbar ke publik.



1

7 ARTIS KORBAN KDRT

Selain keharmonisan dan asmara yang sedang berbunga-bunga, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga kerap dirasakan oleh publik figur dan kemudian 'dirujak' oleh warganet.

Terbaru, artis Venna Melinda melaporkan suaminya Ferry Irawan ke Polda Jawa Timur atas kasus KDRT. Bahkan, Ferry sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Jatim.

Berikut sejumlah artis di Tanah Air yang mengalami KDRT:

1. VENNA MELINDA

KDRT yang dialami Venna Melinda terungkap pada 8 Januari 2023 saat pasangan ini berada di Kediri, Jatim.

Venna memperlihatkan kondisinya penuh darah yang keluar dari hidung, akibat ditekan menggunakan kening oleh Ferry Irawan.

Tidak hanya itu, diketahui ibu Verrel Bramasta dan Athalla Naufal itu mengalami keretakan pada tulang rusuknya.

"(Korban) sudah melakukan visum. Dari keterangan, korban mengalami luka di bagian hidung," kata Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, AKBP Hendra Eko Triyulianto, di Mapolda Jawa Timur, Surabaya, Selasa, 10 Januari 2023.

Dari keterangan korban, Hendra mengatakan luka tersebut timbul setelah pihak terlapor menekan bagian hidung korban dengan menggunakan keningnya.

"Kalau hasil keterangan korban, dia ditekan sama kepalanya terlapor, menekan hidungnya sampai berdarah," kata Hendra.

2. LESTI KEJORA

Kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora oleh suaminya Rizky Billar sempat membuat heboh publik. Pasalnya, pasangan ini sering mengumbar kemesraan di layar

kaca dan media sosial bak pasangan sempurna.

Lesti Kejora melaporkan Rizky Billar ke polisi atas kasus KDRT. Laporan tersebut dikonfirmasi Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Laporan itu juga sudah diterima dengan nomor LP/B/2348/IX/2022/SPKT/POLRES METRO JAKARTA SELATAN/POLDA METRO JAYA.

"Dia melaporkan suaminya karena dia di-KDRT. Semalam dia buat laporan," ucap Nurma, Kamis, 29 September 2022.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, mengatakan, berdasarkan laporan Lesti Kejora, dugaan KDRT itu berawal dari sang penyanyi dangdut yang mengetahui Rizky Billar selingkuh.

Lesti kemudian meminta Rizky Billar mengembalikannya ke rumah orang tua. Namun, permintaan itu ternyata memantik api amarah Rizky.

"Terlapor (Rizky) emosi dan berusaha mendorong korban (Lesti) dan membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban, sehingga korban terjatuh ke lantai," ucap Zulpan.

Zulpan menyampaikan, Rizky melakukan tindak kekerasan itu dilakukan secara berulang terhadap istrinya. Kemudian, Rizky juga sempat menarik tangan Lesti ke arah kamar mandi dan membanting ke lantai.

"Sehingga tangan kanan (korban) dan kiri leher dan tubuhnya merasa sakit," kata Zulpan.

Tapi publik seperti di prank oleh pasangan ini. Karena setelah polisi menetapkan Rizky Billar sebagai tersangka, Lesti Kejora justru mencabut laporannya.

3. THALITA LATIEF

Thalita Latief juga mengalami KDRT oleh suaminya, Dennis Lyla, pada 2021. Sehingga rumah tangga keduanya berujung perceraian dan hak asuh anak jatuh pada Thalita Latief.

Selama menikah, ternyata ia malah mendapatkan kekerasan dari sang suami. Thalita sempat memberikan

kesempatan kepada sang suami pada 2018 ketika mereka memutuskan untuk tinggal di tempat yang terpisah.

Namun, tak ada yang bisa mengubah tabiat buruk tersebut. Thalita tidak memungkiri bahwa ia merasa sangat berat untuk berpisah dari sang suami. Meski mendapatkan tindakan KDRT, menurutnya ada banyak hal yang membebani pikiran seorang korban kekerasan, sehingga membuat mereka sulit untuk berpisah.

"Pertimbangan perempuan itu banyak, mulai dari anak. Aduh, nanti kalau pisah, bapaknya gimana nih. Pokoknya seputar anak pasti jadi pertimbangan," ucapnya.

"Lalu yang kedua itu malu, aib yang



selama ini ditutupi jadi terbongkar. Lalu ada pergolakan batin, mampu enggak kita sama dia? Padahal kenyataannya ya kita yang kerja sendiri," imbuhnya.

4. DHENA DEVANKA

Setelah menjalani pernikahan 9 tahun dengan Jonathan Frizzy, Dena Devanka akhirnya memutuskan untuk berpisah karena mengalami KDRT. Kasus keduanya sempat memanaskan setelah saling melaporkan atas kasus KDRT.

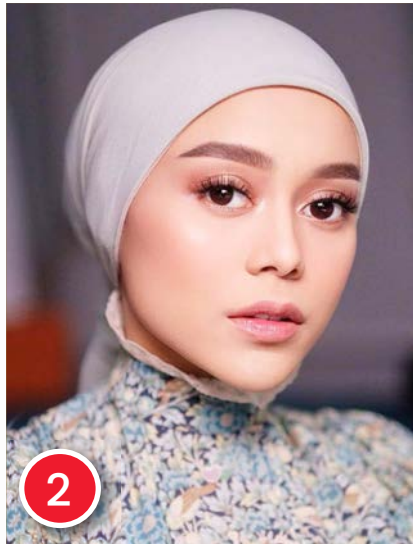
Bukan sekali dua kali, perlakuan kasar itu dilakukan Ijonk pada Dena Devanka. Bahkan, hingga muncul luka lebam di tubuh Dena. Hanya saja, Dena tidak langsung melaporkan KDRT yang dilakukan Jonathan Frizzy.

Artis cantik itu sempat menahan diri dan membiarkan tabiat buruk Ijonk padanya. Sebab, Dena memikirkan nasib anak-anaknya sehingga waktu itu ia memilih untuk mempertahankan pernikahannya.

"Ya demi anakanak lah, ya," ucap Dena.

5. MEDINA ZEIN

Medina Zein melaporkan suaminya Lukman Azhari ke Polresta



Bandung atas kasus KDRT, sehingga keduanya menjadi sorotan. Akibat kekerasan yang diterima berulang-ulang, akhirnya Medina Zein memutuskan untuk bercerai.

Medina Zein melaporkan Lukman Azhari atas tuduhan KDRT pada 23 April 2022. Laporan itu berawal dari perdebatan antara Medina dan Lukman di sebuah kamar hotel.

Ini bukan kali pertama pasangan tersebut mengalami masalah rumah

tangga. Pada Februari 2022, Medina dan Lukman dikabarkan pisah rumah akibat bertengkar.

Tidak hanya itu, Medina Zein juga menuduh suaminya berselingkuh dengan perempuan lain. Tuduhan itu disampaikan dalam sebuah unggahan Instagram yang menampilkan foto pria dan wanita yang tengah duduk bersama.

6. GRACIA INDRI

Pernikahan Gracia Indri hanya bertahan hingga 4 tahun. Gracia memilih untuk bercerai pada 2018 dari David Noah setelah mengalami KDRT dan tidak diberikan nafkah selama menjadi istrinya.



7. NINDY AYUNDA

Nindy Ayunda juga menjadi salah satu korban KDRT dari mantan suaminya Askara Parasady Harsono. Dari hasil visum terhadap Nindy, menunjukkan terdapat bekas luka lebam di bagian wajah, lengan, dan paha hingga rumah tangga mereka berujung perceraian.

Nindy melaporkan mantan suaminya pada akhir 2020 dan resmi bercerai pada Mei 2021. ●

MERANTI

Gunawan Effendi

Meranti sebagai salah satu jenis kayu sudah banyak yang mengetahui. Namun, meranti lekat dengan nama sebuah kabupaten mungkin masih ada yang belum mafhum: Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

Sebagai jenis kayu, meranti (genus *shorea*) bersifat endemik, menyebar luas, di kawasan hutan hujan tropis Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Kalimantan. Mulai dari meranti di hutan pedalaman seperti tengkawang majau (*Shorea palembanica*) yang buahnya pun bernilai komersial; hingga jenis yang tumbuh di hutan rawa payau wilayah pesisir, semisal meranti paya (*Shorea scaberima*) yang secara tradisional populer sebagai bahan baku pembuatan perahu dan kapal kayu.

Namun, sebagai kabupaten kepulauan, ternyata tak ada pulau bernama meranti di kabupaten yang terbentuk pada 16 Januari 2009 itu. Yang ada malah Pulau Merbau, lekat dengan nama kayu kelas premium, sejajar jati (*Tectona grandis*) dan lebih tinggi nilai komersialnya dari meranti. Merbau (*Intsia bijuga*) sering menjadi incaran para pelaku illegal logging, pembalak, karena nilai komersial itu. Terutama karena karakternya yang keras dan tahan terhadap aneka perubahan cuaca. Untuk mudahnya, merbau lebih dikenal sebagai kayu besi di kawasan Indonesia Timur.

Apapun, sangat boleh jadi meranti dan merbau pernah tumbuh subur di hutan-hutan kabupaten yang beribu kota di Selatpanjang itu. Selain meranti dan merbau, kabupaten yang sebelumnya menjadi wilayah Kabupaten Bengkalis ini juga memiliki aneka jenis kayu lain. Sebut saja misalnya, kulim, sungkai, punak, jelutung, medang, tembusu, bintangor, dan bakau. Jika tidak semua, hampir seluruh jenis kayu itu bernilai komersial, dan karena itu juga bernilai konservasi lingkungan. Alhasil, memang perlu identifikasi ulang terhadap jenis-jenis kayu itu di lokasinya.

Nah, mengapa kemudian nama kabupaten itu menjadi Kepulauan Meranti? Ya itulah gaya melayu dan Indonesia umumnya yang sering menyingkat atau meringkas berbagai nama menjadi satu. Ternyata Meranti di salah satu kabupaten provinsi Riau itu adalah singkatan dari beberapa nama pulau di sana: Merbau, Ransang, dan Tebing Tinggi. Jadilah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sialnya, kabupaten ini memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang jika bukan terkecil, termasuk kecil dibandingkan dengan ka-

bupaten-kabupaten lain di Riau. Per 2023, APBD Kepulauan Meranti tercatat Rp1,4 triliun.

Namun, kekayaan Kepulauan Meranti tak hanya kayu. Buktinya, belakangan ini nama kabupaten ini berkali-kali muncul dalam pemberitaan. Bermula dari kejengkelan bupatinya H Muhammad Adil, yang kesulitan mengurus dana bagi hasil minyak dan gas (DBH Migas). Hingga akhirnya ia berkisah dan berkeluh-kesah dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se Indonesia di Pekanbaru pada Kamis, 9 Desember 2022.

Adil bercerita, Kepulauan Meranti memproduksi delapan ribu barel minyak per hari. Namun, tak ada penjelasan rinci mengenai penerimaan daerah yang menjadi bagian kabupatennya. Ia kian kesal karena permintaan untuk berdiskusi dengan Kemenkeu justru ditawarkan lewat online atau virtual. Respons berbeda malah datang dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mau menerima permohonan audiensinya.

"Ini untuk Pak Dirjen ketahui, berulang kali saya, sampai tiga kali, menyurati Ibu Menteri (Menkeu Sri Mulyani) untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online. Kalau dituntut untuk pendapatan bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar. Kami ngadu ke Kemendagri kok bisa offline?" ujar Adil di

hadapan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman yang hadir dalam rapat itu.

Pak Bupati mengaku, pada 2022 ini DBH minyak hanya mendapat Rp114 miliar dengan hitungan US\$60/barel pada perencanaan pembahasan APBD. Namun, pada pembahasan APBD 2023 direncanakan naik usai mengikuti nota pidato Presiden Joko Widodo yang menyebut satu barel bernilai US\$100 setara Rp1.560.300 (asumsi kurs Rp15.603).

"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dollar/barel. Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadir waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong: Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan," kata Adil.

Tinggal memilih saja. Mau menyoal iblis-setan atau fokus pada substansinya tentang DBH Migas di Kepulauan Meranti. ●





PENDAPATAN RENDAH, PENDUDUK MISKIN BERTAMBAH

Jumlah penduduk miskin Indonesia kembali meningkat. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), per September 2022, ada sekitar 26,36 juta penduduk miskin di Tanah Air. Jika dibandingkan Maret 2022, jumlah itu bertambah sekitar 200 ribu jiwa.



Dalam Laporan Profil Kemiskinan yang dirilis BPS pada 16 Januari 2023, persentase penduduk miskin nasional naik dari 9,54 persen pada Maret 2022 menjadi 9,57 persen pada September 2022.

Kepala BPS, Margo Yuwono, menyatakan, jumlah orang miskin pada September 2022 turun 140 ribu orang dibandingkan September 2021. Meski naik dibandingkan Maret 2022

“Ini merupakan kenaikan tertinggi dalam sembilan tahun terakhir sejak September 2013 yang naik 6,84 persen setelah kenaikan harga BBM,” ujar Margo dalam konferensi pers, Senin, 16 Januari 2023.

Garis kemiskinan sebesar Rp535.547 terdiri dari komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp397.125 atau 74,15 persen dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp138.422 atau 25,85 persen.

orang anggota rumah tangga pada September 2022. Dengan demikian, garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.324.274 per bulan.

BPS juga mencatat jumlah orang miskin bertambah di perkotaan maupun perdesaan. Jumlah orang miskin di perkotaan pada September 2022 bertambah 160 ribu orang dibandingkan Maret 2022 menjadi 11,98 juta orang, sedangkan di perdesaan ber-



yang mencapai 9,54 persen, tingkat kemiskinan tercatat turun dibandingkan September 2021 yang mencapai 9,71 persen.

Kenaikan tersebut terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal itu sama seperti yang terjadi pada periode September 2013 dan Maret 2015.

Margo menjelaskan, perhitungan kemiskinan di Indonesia ditetapkan berdasarkan garis kemiskinan. BPS menetapkan garis kemiskinan pada September 2022 sebesar Rp535.547 per orang per bulan, atau naik 5,95 persen dibandingkan Maret 2022.

Besarnya kontribusi makanan dalam garis kemiskinan membuat kenaikan harga pangan berkontribusi signifikan pada kenaikan jumlah orang miskin.

Berdasarkan catatan Margo, sejumlah harga komoditas yang dikonsumsi orang miskin memang meningkat pada September 2022 dibandingkan Maret 2022. Harga beras naik 1,46 persen, tepung terigu 13,97 persen, gula pasir 2,35 persen, telur ayam 19 persen, hingga cabai merah mencapai 43,6 persen. Di luar pangan, biaya sewa rumah naik 0,98 persen, gas naik 1,58 persen, sedangkan harga BBM naik 16-30 persen.

Menurut BPS, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34

tambah 40 ribu orang menjadi 14,38 juta orang. Berdasarkan persentasenya, tingkat kemiskinan di perkotaan naik dari 7,5 persen menjadi 7,53 persen, sedangkan di pedesaan naik dari 12,9 persen menjadi 12,36 persen.

Berdasarkan laporan tersebut, provinsi Jawa Timur menjadi daerah dengan penduduk miskin terbanyak di Indonesia, yakni 4,23 juta orang. Jawa Barat berada di posisi kedua dengan 4,05 juta orang, lalu Jawa Tengah 3,85 juta orang. Selanjutnya, Sumatera Utara di posisi keempat dengan 1,26 juta orang. Nusa Tenggara Timur menempati urutan kelima jumlah penduduk terbanyak dengan 1,15 juta orang.

Lima provinsi lainnya yang masuk 10 besar daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak adalah Sumatra Selatan (1,05 juta orang), Lampung (995,59 ribu orang), Papua (936,32 ribu orang), Banten (829,66 ribu orang), dan Aceh (818,47 ribu orang).

Selain dampak kenaikan BBM, Margo menjelaskan, angka kemiskinan kembali meningkat akibat masifnya pemutusan hubungan kerja (PHK). Ada beberapa fenomena yang mempengaruhi kenaikan kemiskinan pada September 2022 sekalipun pemulihan ekonomi berlanjut.

Pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga 2022 secara kuartalan melambat jika dibandingkan kuartal sebelumnya, meskipun secara tahunan tumbuh menguat. Pertumbuhan konsumsi masyarakat sepanjang Juli-Agustus 2022 secara tahunan juga melambat 0,12 persen dibandingkan kuartal sebelumnya. Upah buruh tani harian pada September 2022 juga turun 1,99 persen dibandingkan Maret.

"Peristiwa-peristiwa lain yang juga akan berpengaruh kepada kemiskinan kita yakni sepanjang September 2022 itu terjadi PHK di sektor padat karya, seperti industri tekstil, alas kaki dan perusahaan teknologi," kata Margo.

Aksi PHK masif terjadi sejak beberapa bulan lalu terutama di pabrik-pabrik tekstil dan alas kaki. Pengusaha mengklaim pemangkasan tenaga kerja sebagai imbas lesunya permintaan dari ekspor di tengah bayang-bayang pelemahan ekonomi dunia.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menilai, tren PHK beberapa bulan terakhir di beberapa sektor membuat daya beli masyarakat menurun. Pekerja yang kehilangan pekerjaannya karena PHK otomatis menurunkan daya belinya. Ini karena mereka kehilangan sumber penghasilan atau beralih ke sektor informal yang upahnya jauh lebih rendah di tengah harga-harga barang meningkat.

"Kalau pendapatannya jatuh menjadi lebih rendah, otomatis dia sangat mungkin yang tadinya sedikit di atas garis kemiskinan, kemudian jatuh ke bawah garis kemiskinan," kata Faisal

dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023.

Dia juga menduga ada kemungkinan penduduk miskin baru pada September 2022 adalah mereka yang pengeluarannya sudah mendekati garis kemiskinan kemudian berdampak PHK. Garis kemiskinan ini mencerminkan nilai pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Oleh karena itu, mereka yang pengeluaran bulannya di bawah garis kemiskinan berarti tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan dikategorikan miskin.

Faisal menambahkan, naiknya angka kemiskinan pada September 2022 serta semakin timpangnya

masyarakat yang paling membutuhkan, terutama di area perdesaan yang umumnya lebih susah dijangkau.

Penelitian yang dilakukan CORE pada 22 Oktober-30 November 2022 menunjukkan, dampak kenaikan harga BBM bersubsidi memukul kelompok nelayan kecil dan usaha mikro kecil di perdesaan. Mereka mengalami kenaikan biaya produksi akibat naiknya harga BBM, tetapi tidak bisa menaikkan harga jual. Akibatnya, daya beli mereka jatuh, tergerus kenaikan biaya hidup.

"Pemerintah memang memberi BLT BBM, tetapi itu tidak sampai ke mereka. Bansos lebih banyak diterima orang miskin kota, yang lebih mudah dijangkau. Ini menunjukkan kalau dari



Kepala BPS, Margo Yuwono

tingkat kemiskinan di perkotaan dan perdesaan menunjukkan pemulihan ekonomi pascapandemi belum terjadi secara merata.

Efek berkepanjangan (scarring effect) akibat pandemi dan luka baru akibat inflasi membuat masyarakat yang selama ini hidup di sekitar garis kemiskinan, terutama di perdesaan, jatuh miskin.

"Ini yang sering kali tidak tertangkap oleh indikator-indikator makro. Secara agregat, ekonomi kita memang terus tumbuh tinggi, tapi di bawah, angka kemiskinan naik," jelasnya.

Faisal mengatakan, kendati pemerintah mencoba mengompensasi kenaikan harga BBM melalui penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), namun bantuan itu belum sampai ke

sisi efektivitas bansos sebenarnya masih rendah dan sifatnya hanya solusi jangka pendek," ujarnya.

Upah Masih Rendah

Persandingan data Profil Kemiskinan di Indonesia per September 2022 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Agustus 2022 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, hampir semua provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi memiliki tingkat rata-rata upah serta standar upah minimum yang rendah.

Ada total 16 provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan dua digit di atas rata-rata persentase kemiskinan nasional, yakni 9,57 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 provinsi mempunyai tingkat upah di bawah rata-

● INFO KHUSUS

rata nasional (Rp3,07 juta per bulan). Sebagian besar juga merupakan daerah dengan standar upah minimum provinsi (UMP) paling rendah se-Indonesia.

Sebagai contoh, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi ketiga (20,23 persen) memiliki rata-rata upah

tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa dan tertinggi ke-12 secara nasional (11,49 persen) memiliki rata-rata upah terendah ketujuh sebesar Rp2,46 juta. Yogyakarta juga memiliki standar UMP paling rendah kedua, yaitu Rp1,84 juta per bulan.

Hal serupa terlihat di Aceh yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi

Di luar itu, masih ada 11 provinsi lain dengan angka kemiskinan tertinggi serta standar upah di bawah rata-rata nasional, yaitu Maluku, Gorontalo, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menilai, besaran upah dan pendapatan seseorang berkaitan erat dengan daya tahan-nya dalam menghadapi guncangan ekonomi, seperti kenaikan inflasi sebesar 5,51 persen pada 2022.

"Semakin rendah upah seseorang, pemenuhan kebutuhan dasarnya tentu lebih terbatas. Ketika ada gejolak inflasi tahun lalu, buruh berupah pas-pasan yang tidak mendapat kenaikan upah signifikan tentu terkena dampak. Mereka sangat rentan dan lebih mudah untuk jatuh miskin," kata Tauhid, Rabu, 18 Januari 2023.

Tauhid mengatakan, perlu ada perbaikan standar pengupahan dan penciptaan lapangan kerja yang layak untuk memperkuat daya beli masyarakat, terutama di daerah-daerah yang menjadi basis kemiskinan. Menurut dia, bansos memang dibutuhkan untuk jangka pendek, tetapi harus ada solusi berkelanjutan.

"Tidak sehat kalau kita terus bergantung pada bansos. Harus ada terobosan memunculkan lapangan kerja formal dengan upah layak, terutama di sektor pertanian dan sektor rural lainnya. Sekarang ini, meski produksi bertambah, nilai jualnya tetap tidak signifikan, sehingga menekan daya beli petani dan buruh tani," ujarnya.

Tauhid juga mengingatkan agar kebijakan upah minimum yang kontroversial seperti pada 2022 tidak diulangi lagi. Saat itu, rata-rata kenaikan UMP hanya 1,09 persen, jauh berada di bawah tingkat inflasi. Kebijakan pengupahan yang rendah itu ikut berkontribusi pada tergerusnya daya beli buruh formal saat menghadapi gejolak inflasi tahun lalu.

Peneliti dari SMERU Research Institute, Ridho Al Izzati, menambahkan, peningkatan level pendapatan



Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal



Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad

paling rendah secara nasional, yaitu Rp2,1 juta per bulan. NTT juga merupakan provinsi dengan standar UMP paling rendah kelima, yakni sebesar Rp1,97 juta per bulan.

Demikian pula Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selaku provinsi dengan

keenam (14,75 persen). Meski standar UMP Aceh termasuk yang tertinggi, yakni sebesar Rp3,16 juta per bulan, realisasi rata-rata upah di wilayah itu jauh di bawah UMP, yaitu Rp2,32 juta per bulan, atau paling rendah kelima secara nasional.

masyarakat pada dasarnya bisa membantu menurunkan kemiskinan atau mencegah munculnya orang miskin baru. Namun, upaya perbaikan pendapatan itu lebih dibutuhkan di sektor informal ketimbang formal. Sebab, jumlah orang miskin yang bekerja di sektor informal lebih banyak.

Seiring dengan itu, upaya untuk mengendalikan inflasi agar tetap stabil dan rendah, serta kebijakan perlindungan sosial yang berkelanjutan harus terus dijalankan sebagai bantalan sosial bagi warga rentan.

"Dibandingkan upah minimum yang berlaku di sektor formal, kebijakan yang fokus pada sektor informal akan memberi dampak lebih berarti. Seperti bantuan bagi usaha mikro dan kecil atau bantuan bagi petani," kata Ridho.

Turun Tapi Tidak Signifikan

Dalam rilis BPS, Jawa Barat dan DKI Jakarta menjadi dua provinsi yang paling banyak menurunkan angka kemiskinan pada September 2022. Jawa Barat berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 17,36 ribu jiwa, sementara DKI Jakarta sebesar 7,11 ribu jiwa.

Sayangnya, Jawa Barat juga menghadapi jurang ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan yang tak kunjung selesai dalam lebih dari satu dekade lalu.

BPS Jabar mencatat, persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan pada September 2022 sebesar 7,52 persen, sementara di wilayah perdesaan sebesar 9,75 persen. Artinya angka kemiskinan lebih besar terdapat di perdesaan Jawa Barat.

Selain itu, BPS merilis Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio) Jawa Barat pada September 2022 sebesar 0,412. An-

gka ini menurun tipis 0,005 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,417. Namun, ketimpangannya meningkat 0,006 poin dibandingkan dengan Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,406. Catatannya, ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan.

Sementara itu untuk DKI Jakarta, meski ada penurunan jumlah, angka penurunannya dinilai kecil. Pemprov DKI Jakarta seharusnya menginter-

garuhi indikator makro, di antaranya meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan turunnya pengangguran.

Dia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta mencapai 5,94 persen pada triwulan III-2022 atau naik sebesar 5,62 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Tingkat pengangguran juga berkurang 63.000 orang. Lalu, ada penambahan angka tenaga kerja baru 138.000 orang.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Tri Sakti, Trubus Rahadiansyah, menyatakan, meski menurun, angka yang berkurang itu kecil sekali dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin. Belum lagi ada fenomena kemiskinan ekstrem dan rentan ekstrem.

Menilik APBD DKI Jakarta 2023 yang mencapai Rp83,7 triliun, seharusnya angka kemiskinan bisa ditanggulangi. DKI Jakarta harus membuat kebijakan untuk mengangkat dan mengatasi kemiskinan.

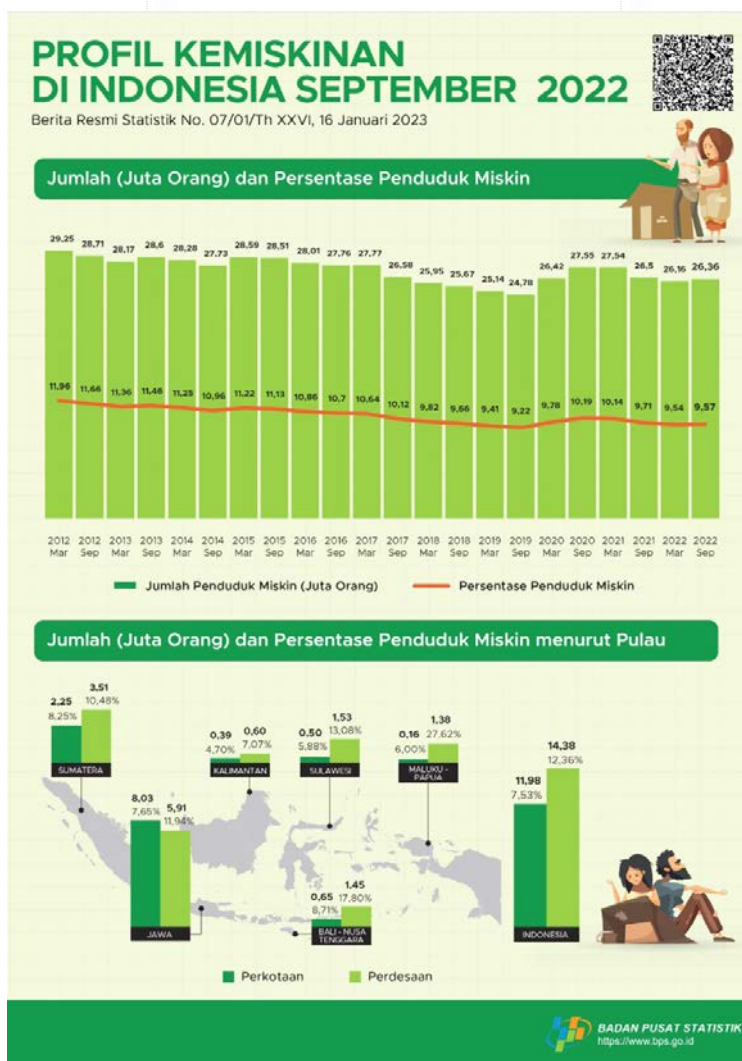
"Harus ada kebijakan dari DKI Jakarta untuk menyusun kebijakan padat karya yang akan menyerap penduduk, menyerap tenaga kerja. Ini untuk jangka pendek," ucap Trubus.

Dia menyarankan kebijakan itu lantaran salah satu program Penjabat Gubernur DKI Jakarta adalah mengatasi banjir. Program padat karya akan melibatkan penduduk miskin sebagai tenaga kerja untuk membersihkan gorong-

gorong ataupun pengerukan kali bersama petugas yang ada.

Langkah kedua, Pemprov DKI Jakarta bisa menghidupkan UMKM lewat pajak yang dibebaskan. Pegiat UMKM bisa mengisi pusat-pusat belanja yang saat ini sepi.

"Untuk mengatasi kemiskinan, paling penting adalah penciptaan lapangan kerja," kata Trubus. •



vensi untuk penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program.

Statistik Ahli Madya BPS DKI Jakarta, Dwi Paramita Dewi, menjelaskan, secara persentase, angka kemiskinan di ibu kota per September 2022 turun menjadi 4,61 persen dari sebelumnya 4,69 persen dari total penduduk Jakarta. Berkurangnya jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta dipen-



SUBSIDI APBN PEREDAM LAJU KEMISKINAN

Menurunkan angka kemiskinan di Indonesia menjadi pekerjaan teramat sulit, meski bukan hal yang mustahil. Pada 2022, pemerintah memiliki target angka kemiskinan berada di kisaran 8,5-9 persen, di mana per September 2022 berada di angka 9,57 persen.

Ekonom pun memprediksi target sasaran kemiskinan pemerintah pada 2022 bakal meleset. Tingkat kemiskinan pada 2022 tak akan berbeda jauh dengan hasil pada September 2022.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebut, hal itu didasarkan faktor yang mendorong kenaikan tingkat kemiskinan. Inflasi menjadi salah satu faktor kenaikan tingkat kemiskinan yang secara tahunan berada di kisaran angka 5 persen pada September 2022.

Yusuf menyebut, komoditas pangan sebenarnya menjadi salah satu komoditas penghitungan garis kemiskinan yang dilakukan Badan Pusat Statistik

(BPS). Ketika komoditas pangan mengalami kenaikan, maka akan ikut memengaruhi jumlah orang yang dikategorikan sebagai penduduk miskin.

"Hal tersebut yang membuat tingkat kemiskinan mengalami kenaikan menjadi 0,03 persen dibandingkan tingkat kemiskinan Maret 2022 sebesar 9,54 persen," ungkap Yusuf dikutip dari Kontan, Senin (23/1/2023).

Yusuf juga memperkirakan angka inflasi sebenarnya relatif masih berada pada angka 5 persen di sisa bulan 2022. Atas dasar itu pula, dia memprediksi garis kemiskinan masih akan relatif sama dengan pencapaian pada September 2022.

Namun, Yusuf menyebut tingkat

kemiskinan di Indonesia bisa turun pada 2023 dengan sejumlah syarat. Salah satunya bisa menekan inflasi. Angka inflasi akan memengaruhi penghitungan garis kemiskinan dan pada muaranya akan mempengaruhi penghitungan dari jumlah penduduk miskin. Dengan demikian, dapat mencapai target yang telah direncanakan pemerintah sebesar 7,5-8,5 persen tahun ini.

Yusuf menyebut, tingkat kemiskinan pada 2023 juga akan dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menyerap atau menyediakan lapangan kerja untuk angkatan kerja yang diperkirakan akan mengalami peningkatan.

Dia mengatakan, angkatan kerja juga berpotensi bertambah jika tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sebenarnya terjadi di akhir 2022 kembali berlanjut pada 2023. Selain itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan masih akan berada pada level pertumbuhan 5 persen pada 2023 berpotensi bisa menekan laju tingkat kemiskinan.

"Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi bisa membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat," kata dia.

Jika hal tersebut dilakukan, tentu akan membantu pemerintah untuk mencapai target tingkat kemiskinan 2023. Selain itu, program bantuan sosial yang masih berjalan, terutama untuk kelompok menengah ke bawah, juga akan mempengaruhi capaian pemerintah untuk mencapai target tingkat kemiskinan 2023.

"Menurut saya, untuk mencapai target kemiskinan di tahun ini tidak mudah, tetapi pemerintah punya amunisi yang bisa dioptimalkan untuk mencapai target tersebut," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan, seperti biasa, garis kemiskinan akan rutin dievaluasi setiap tahun sesuai standar indeks biaya hidup yang diterapkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Dia meyakini, perubahan batas garis kemiskinan oleh Bank Dunia tidak akan banyak berdampak pada target pemerintah tahun ini.

"Kita memang lakukan evaluasi garis kemiskinan setiap tahun, kita pastikan sesuai dengan minimum standar hidup

terbaru," katanya.

Febrio mengatakan, secara umum, kenaikan angka kemiskinan bisa diredam lewat peran APBN. Selain melalui program bansos dan alokasi belanja untuk stabilisasi harga pangan, juga lewat mekanisme subsidi energi.

Dia meyakini tingkat kemiskinan kembali menurun seiring dengan tren penurunan inflasi bahan pangan (volatile food) dari 9,0 persen pada September 2022 menjadi 5,6 persen pada Desember 2022. Perbaikan pendapatan masyarakat juga diyakini tercapai dengan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2022 sebesar 68,63 persen.

"Ke depan, pemerintah perlu menjaga momentum penurunan inflasi dan mengakselerasi realisasi belanja APBN pada triwulan I-2023 untuk menurunkan angka kemiskinan," katanya.

Sementara, menurut Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatar-

wata, evaluasi garis kemiskinan akan dibahas lintas kementerian. Standar yang ditetapkan Bank Dunia akan menjadi salah satu pertimbangan, tetapi dia belum bisa memastikan jika Indonesia akan mengikuti standar Bank Dunia. Selama ini, BPS memang menggunakan penghitungan garis kemiskinan yang berbeda dengan Bank Dunia.

"Ini akan jadi bahan evaluasi dan diskusi di kabinet. Mau berubah ataupun tidak, pasti akan tetap ada review terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," ujar Isa.

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Maliki, mengatakan, untuk memastikan penyaluran bansos yang lebih merata, perbaikan data bansos terus dilakukan, berbekal pada hasil pengumpulan data melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Harapannya, mulai tahun ini sudah



Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati

ada pendataan tunggal yang bisa dijadikan landasan untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran, termasuk untuk masyarakat rentan miskin dan miskin di wilayah perdesaan. Apalagi, target penurunan tingkat kemiskinan yang dipasangkan pemerintah untuk 2023 terhitung ambisius, yakni 7,5-8,5 persen.

"Untuk mencapai target, kita memang butuh data yang lebih baik. Kami harapkan dengan selesainya pendataan

"Mungkin putaran ini belum sempurna sekali, tapi kita berupaya mendata semua (penduduk), dari masyarakat homeless sampai yang ada di apartemen mewah," ujarnya.

Secara jangka panjang, pemerintah terus menguatkan program penanggulangan kemiskinan lewat penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan rentan. Untuk itu, iklim investasi perlu terus dijaga.



Tenaga Ahli Utama KSP, Abraham Wirotomo



Kepala BKF Kemenkeu, Febrio Kacaribu

Regsosek, itu bisa jadi pegangan dalam menentukan target program yang lebih terintegrasi sehingga dampaknya bisa lebih optimal," kata Maliki.

Dia mengakui, pengumpulan data Regsosek belum sempurna. Masih ada beberapa kelompok masyarakat yang belum terdata di putaran pertama.

"Selain itu, kelanjutan pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan, juga jadi sasaran prioritas pemerintah," kata Maliki.

Subsidi Energi Jadi Peredam

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menyatakan,

keputusan pemerintah menaikkan subsidi energi menjadi Rp551 triliun pada 2022 sebagai faktor utama yang mampu meredam angka kemiskinan. Selain tambahan guyuran subsidi, gerak cepat menurunkan inflasi pangan ikut memberi andil mengendalikan angka kemiskinan.

Dia menyebut, kenaikan tipis angka kemiskinan pada September 2022 disebabkan kenaikan inflasi bahan pangan pada periode Juni, Juli, Agustus, dan September yang sempat mencapai puncaknya di 11,5 persen pada Juli 2022.

Febrio menyebutkan perekonomian nasional pada 2022 dihadapkan pada tekanan inflasi yang bersumber dari peningkatan harga komoditas global, khususnya energi dan pangan akibat perang Rusia-Ukraina.

Namun, dibandingkan dengan banyak negara lainnya, seperti Amerika Serikat (AS) dan negara-negara di Eropa, inflasi mencapai rekor tertinggi dalam empat dekade terakhir. Laju inflasi di Indonesia yang lebih moderat, terutama karena peran krusial APBN sebagai peredam gejolak (shock absorber) inflasi global melalui mekanisme subsidi energi dan alokasi belanja stabilisasi harga pangan.

Sementara itu, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia atau rasio gini pada September 2022 tercatat sebesar 0,381, atau menurun 0,003 poin dari Maret 2022 yang sebesar 0,384. Hal itu dipengaruhi oleh penurunan ketimpangan di perkotaan dan perdesaan, yang masing-masing menurun tipis 0,001 dari posisi Maret 2022.

"Upaya pemerintah untuk mendorong inklusivitas pertumbuhan ekonomi terlihat dari penurunan ketimpangan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Bahkan ketimpangan di perdesaan juga terus menunjukkan perbaikan dibandingkan level prapandemi," lanjutnya.

Dengan inflasi bahan pangan atau volatile food yang menunjukkan tren penurunan signifikan dari September 2022 yang tumbuh 9 persen, melambat menjadi 5,6 persen, maka dia memperkirakan tingkat kemiskinan dapat kembali menurun.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Abraham Wirotomo, mengatakan, kebijakan Bantuan Langsung

Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) berhasil meredam kenaikan angka kemiskinan di Indonesia.

Menurutnya, hal itu dibuktikan dengan persentase angka kemiskinan pada September 2022 yang mampu ditahan pada angka 9,57 persen, meskipun saat terjadi kenaikan harga BBM global, angka kemiskinan September 2022 diprediksikan sekitar 11 persen.

“Berdasarkan data dan kajian yang ada, kebijakan BLT BBM salah satu yang berhasil meredam kenaikan angka kemiskinan yang menjadi kekhawatiran banyak pihak,” tutur Abraham dalam siaran pers di Jakarta, Kamis, 19 Januari 2023.

Abraham optimistis angka kemiskinan akan terus menurun pada 2023 karena kondisi ekonomi Indonesia terus tumbuh positif. Terlebih pemerintah telah berhasil mengendalikan pandemi dan mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Selain itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai program bantuan sosial bagi masyarakat rentan. Abraham menyebut, dalam waktu dekat, yakni pada Triwulan I-2023, Kementerian Sosial segera menyalurkan program sembako untuk 18,8 juta keluarga dan program PKH untuk 10 juta keluarga.

“Angka tersebut sama besar ketika kita sedang menghadapi pandemi tahun lalu. Jadi, meski sudah tidak ada PPKM, tapi besaran bansos tetap sama seperti saat masih ada PPKM,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Abraham mewanti-wanti soal krisis geopolitik dan krisis ekonomi global yang masih menjadi ancaman pada 2023.

“Pemerintah sudah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi kondisi tersebut agar tidak menambah beban dan jumlah masyarakat miskin,” ujarnya.

Pengamat Energi dari Univeristas Gadjah Mada, Fahmi Radhi, mengakui kenaikan anggaran subsidi energi untuk menekan kenaikan angka kemiskinan memang pilihan yang harus diambil pemerintah.

Dari berbagai penyaluran subsidi energi seperti bahan bakar minyak, mulai dari pertalite, solar, kemudian subsidi listrik, dan gas elpiji ukuran tiga kilogram

masih menyisakan pertanyaan soal apakah sudah tepat sasaran atau belum.

“Sebelum ada kenaikan harga BBM, Menkeu Sri Mulyani mengatakan subsidi untuk pertalite 70 persen tidak tepat sasaran, 80 persen solar tidak tepat sasaran, dan 70 persen untuk LPG 3 kilogram juga tidak tepat sasaran. Pekerjaan rumah besar bagaimana subsidi ini tepat sasaran,” kata Fahmi.

Optimalkan Dana Perlindungan Sosial

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan, alokasi dana perlindungan sosial (Perlinsos) dalam APBN 2023 mencapai Rp476 triliun. Alokasi ini akan diserap untuk melanjutkan program bantuan sosial (bansos).

Sri Mulyani menjelaskan anggaran Perlinsos pada 2023 hampir sama dengan anggaran 2022. Kendati demikian,

Youtube, Jumat, 20 Januari 2023.

Sri Mulyani menegaskan, anggaran perlindungan sosial memang tujuannya untuk melindungi masyarakat yang paling rentan dan paling miskin. Perlindungan sosial merupakan salah satu alokasi belanja strategis negara untuk menangkai guncangan ekonomi global yang diperkirakan terjadi pada tahun ini.

Selain perlindungan sosial, Kementerian Keuangan juga telah mengalokasikan belanja untuk ketahanan pangan senilai Rp104,2 triliun. Anggaran tersebut diharapkan mampu menjaga pertahanan dan stabilitas pangan Indonesia.

Di sektor energi, pemerintah menyiapkan dana Rp341 triliun guna menjaga ketahanan dan laju produksi. Adapun alokasi belanja di sektor infrastruktur disiapkan senilai Rp392 triliun. Sementara



Ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet

terdapat sejumlah komponen yang diubah atau didesain ulang karena beberapa program bantuan pada 2022 tidak dilanjutkan ke tahun ini. Sebagai contoh, dana bantuan minyak goreng dan subsidi upah merupakan respons terhadap guncangan ekonomi pada tahun lalu.

“Pada 2023, anggaran perlindungan sosial di APBN sebesar Rp476 triliun, saya bersama-sama Bu Risma akan melihat aktivitas Kementerian Sosial yang memang betul-betul telah memberikan hasil yang sangat nyata dan diteruskan,” kata Sri Mulyani dalam siaran langsung

itu, belanja untuk sektor kesehatan Non COVID-19 dialokasikan sebesar Rp178 triliun. Lalu, belanja pendidikan mencapai Rp612 triliun.

Sri Mulyani berharap seluruh anggaran perlindungan sosial tahun ini benar-benar bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh mereka yang membutuhkan.

Tahun lalu, kata Sri Mulyani, Menteri Sosial juga sempat meminta anggaran spesial tambahan dari Kementerian Keuangan senilai Rp198 miliar. Anggaran ini untuk memberikan makanan bagi warga lanjut usia, yang mana telah diberikan sebanyak Rp183 miliar. ●

FOKUS CIPTAKAN LAPANGAN KERJA BARU

Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memfokuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 pada kegiatan produktif, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Presiden Jokowi menjelaskan, selain pada program yang produktif, APBN 2023 juga difokuskan untuk menyelesaikan program prioritas nasional, seperti penurunan angka stunting, penurunan kemiskinan ekstrem, serta agenda men-

dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 16 Januari 2022.

Kepala Negara juga mengingatkan agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sinkron dengan APBN yang

runkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada 2024 mendatang. Pada 2022, kemiskinan ekstrem masih berada pada angka 2 persen dan 14 provinsi berada di atas angka nasional.

"Target kita di 2024 kemiskinan ek-



jelang Pemilu 2024.

Atas arahan tersebut, Presiden meminta agar kementerian terkait dapat mendorong pemerintah daerah dalam pemanfaatan dana desa guna memacu ekonomi daerah.

"Jangan sampai dana yang ditransfer tidak memberikan efek memacu ekonomi di daerah," kata Presiden

fokus pada program-program prioritas nasional, seperti ekonomi kerakyatan, ekspor, dan investasi.

Selanjutnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia Tahun 2023, Presiden Jokowi mendorong segenap pimpinan daerah untuk menu-

strem ini harus berada pada 0 persen. Ini target yang tidak mudah. Di 2022, masih 2 persen dan 14 provinsi di atas nasional. Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa, sasaran siapa sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilaku-

kan, semua pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan,” ungkapnya pada kegiatan yang digelar di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 17 Januari 2023.

Pemutakhiran DTKS

Menteri Sosial, Tri Rismaharini, mengatakan, pemerintah terus berikhtiar dalam menangani kemiskinan, pengangguran, serta memperkuat jaring pengaman sosial. Upaya tersebut dilakukan salah satunya oleh Kementerian Sosial dengan memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Apalagi perbaruan data tersebut merupakan amanat dari undang-undang.

“Hampir setiap hari ada bencana, sehingga kemudian ada lahir orang miskin baru, rumahnya hilang dan sebagainya. Kemudian evaluasi realisasi mingguan, kita sudah sampaikan kepada daerah, itu kenapa yang lahir, mati, pindah, datang, itu bisa terdata (ya karena perbaikan DTKS),” ujar Risma pada Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 di Sentul International Convention Center, Bogor, Selasa, 17 Januari 2023.

Dia mengungkapkan, upaya berikutnya kemudian disempurnakan dengan membentuk program pahlawan ekonomi nusantara. Program ini mengakomodir masyarakat miskin untuk memperoleh modal berupa barang-barang yang diperlukan. Langkah ini diketahui telah dapat membantu lebih dari 1,2 juta masyarakat untuk keluar dari kelompok miskin.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menambahkan, pemerintah juga konsisten membantu mengurangi angka tingkat pengangguran terbuka. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Reformasi tersebut hadir dengan adanya Perpres 68/2022.

“Sudah tidak zamannya lagi melakukan pendidikan dan pelatihan vokasi tidak berkesesuaian dengan pasar kerja. Jadi, seluruh kebutuhan di pasar kerja dipenuhi dengan penyiapan baik pendidikan maupun pelatihan vokasi,” ujarnya.

Upaya selanjutnya yakni dengan

perluasan kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan perbaikan iklim investasi untuk penciptaan lapangan kerja. Di samping itu, dilakukan pula perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan di kawasan super prioritas dan sebagainya.

“Dan yang terakhir optimalisasi sistem informasi dan layanan pasar kerja melalui penguatan database suplai angkatan kerja dan demand, Bapak/Ibu bisa memanfaatkan pusat informasi pasar kerja yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan yang me-link-an dengan pemerintahan Bapak/Ibu masing-masing,” terangnya.

karena itu, penerima manfaat program bisa berasal dari warga yang sedang mencari kerja, sudah bekerja, dan terkena dampak pemutusan hubungan kerja. Program seperti ini perlu diimbangi dengan upaya pemerintah memperbaiki permintaan lapangan kerja.

“Program Kartu Prakerja bukan program kebekerjaan. Dari pihak kami tidak menjanjikan jaminan kebekerjaan, seperti jaminan peserta bisa langsung terserap industri (pasar kerja) ataupun berwirausaha. Program ini menyiapkan suplai angkatan kerja,” kata Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem Mana-



Program Kartu Prakerja

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut, program Kartu Prakerja akan dilanjutkan dengan skema normal atau tidak lagi dengan skema semi bantuan sosial (bansos) sebagaimana diatur dalam Perpres 113/2022.

Pelaksanaan program Kartu Prakerja diatur oleh Permenko Perekonomian 17/2022 dengan anggaran tahap awal senilai Rp2,67 triliun.

Fokus pelaksanaan program Kartu Prakerja 2023 adalah meningkatkan kemampuan hingga memberikan keterampilan baru yang dibutuhkan oleh angkatan kerja usia produktif. Oleh

jemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja, Kurniasih Suditomo, di Jakarta, Rabu, 18 Januari 2023.

Jika lembaga pelatihan kerja (LPK) yang sudah bermitra dengan perusahaan tertentu dan memberikan penawaran jaminan terserap/diterima kerja, lalu LPK bersangkutan mendaftar dalam ekosistem program Kartu Prakerja, hal seperti itu diperbolehkan. Namun, PMO Program Kartu Prakerja sejak awal tidak pernah menjanjikan jaminan keterserapan ke pasar kerja ataupun berhasil dalam berwirausaha.

Program Kartu Prakerja perlu dilihat sebagai upaya pemerintah memberikan beasiswa pelatihan keterampilan dan keahlian kerja bagi angkatan kerja usia

• INFO KHUSUS

produktif, yakni 18-64 tahun. Siswa/mahasiswa tidak diperbolehkan ikut serta. Begitu pula dengan aparatur sipil negara, TNI, dan Polri juga dilarang.

Karena pendekatannya adalah beasiswa pelatihan, Kurniasih menjelaskan, satu nomor induk kependudukan (NIK) angkatan kerja usia produktif hanya boleh sekali berkesempatan jadi penerima manfaat.

Kepala Kemitraan dan Program Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Dwina M Putri, menambah-

manufaktur, ekonomi kreatif, teknik, pertanian, jasa perseorangan, dan hospitality,” kata Dwina.

Dari awal pembukaan gelombang 1 pada April 2020 hingga gelombang 47 pada akhir 2022, program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bagi 16,42 juta penerima dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan data Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, jumlah peserta 2022, sebanyak 53,6 persen peserta di antaranya berasal dari 212 kabupaten/kota yang menjadi

bersinergi dengan perusahaan/industri untuk memastikan agar program berjalan efektif, terutama untuk turut membantu mengatasi pengangguran. Harapannya agar penerima manfaat Kartu Prakerja dapat mudah terserap ke pasar kerja.

Agar program berjalan efektif, cara lain yang bisa ditempuh pemerintah adalah memperbaiki kurikulum dan model pembelajaran. Dia memandang kurikulum semestinya bisa menyesuaikan dengan karakteristik kebutuhan



kan, bidang-bidang pelatihan yang tersedia dalam ekosistem program akan diprioritaskan pada keterampilan yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang. Hal ini merujuk pada riset Kemenko Perekonomian, Bappenas, dan Bank Dunia.

Dia mencontohkan laporan Critical Occupation List 2018, laporan Indonesia's Occupational Tasks and Skills 2020, studi World Economic Forum Future Job Report 2020, serta riset Online Vacancy Outlook 2020.

“Pekerjaan-pekerjaan yang paling dibutuhkan sesuai kajian tersebut, antara lain bidang bisnis, perkantoran,

target penurunan kemiskinan ekstrem, serta mencakup calon pekerja migran Indonesia dan penyandang disabilitas.

Kurniasih juga mengajak lembaga pelatihan berkualitas seluruh Indonesia, yang pernah bergabung maupun yang belum, untuk menjadi bagian dari ekosistem Prakerja dengan ikut seleksi penyedia pelatihan. Seleksi lembaga pelatihan akan melibatkan tim ahli independen yang menjalankan fungsi akreditasi.

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM), Hempri Suyatna, berpendapat, pelaksanaan program Kartu Prakerja perlu

pasar kerja di setiap daerah. Lalu, sistem evaluasi yang dikembangkan ke peserta harus komprehensif dan menjamin peningkatan kualitas kompetensi mereka.

“Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, efektivitas pelaksanaan program Kartu Prakerja (bagi angkatan kerja) banyak dipertanyakan. Berbagai upaya mengefektifkan program bisa dilakukan, termasuk mengintegrasikannya dengan program pemerintah lain terkait peningkatan mutu keterampilan pekerja ataupun kemudahan mendirikan usaha bagi peserta yang ingin berwirausaha,” katanya. •

info indonesia

www.infoindonesia.id

Network

INFO PASANG
KIKI IBRAHIM
+62 818 931 562
IKLAN



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **info** kepada masyarakat Sumsel

Koran Cetak Info Indonesia



www.infoindonesia.id

facebook @infoindonesia.id twitter @_infoindonesia

Instagram @info_indonesia.id YouTube : infoindonesiatv

JAKARTA
JL. Raya Kalibata No. 8
Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781
Email : redaksi@infoindonesia.id



CALON KUAT KETUA PSSI ATAU GUBERNUR DKI JAKARTA